

**Dr. Ramdani Wahyu Sururie, M.Ag., M.Si.
Iir Abdul Haris, M.Ag.**

PERSPEKTIF BARU



2016

PENGABDIAN KEPADA MASYARKAT

DI PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM NEGERI

KATA PENGANTAR

Segala puji mutlak milik Allah SWT, yang memelihara alam raya ini dengan teratur. Shalawat dan salam senantiasa dicurahkan kepada nabi kita Muhammad SAW., yang telah melakukan transformasi dan perubahan sosial pada masyarakat yang disebut *jahiliyah* ke masyarakat yang beradab (*madaniyah*).

Laporan hasil penelitian ini berjudul Konsep dan Implementasi Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN). Penelitian ini didasari dengan fakta bahwa konsep pengabdian kepada masyarakat di PTKIN bersumber dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengabdian kepada masyarakat, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Agama Nomor 55 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di PTKIN dan Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 4352 tentang Pengabdian kepada Masyarakat di PTKIN. Regulasi tersebut sudah mengatur tentang pengertian, asas, dan pendanaan pengabdian kepada masyarakat di PTKIN. Namun, setiap PTKIN akan memiliki bentuk dan metode yang berbeda dengan regulasi yang dibuat tersebut sehingga diperlukan kajian mengenai implementasi tentang konsep pengabdian kepada masyarakat itu.

Penelitian ini dilakukan di 6 (enam) PTKIN, yaitu UIN Syarif Hidayyatullah Jakarta, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, UIN Walisongo Semarang, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, dan IAIN Salatiga.

Pengumpulan data di 6 PTKIN tersebut dibantu dengan baik oleh Pusat Pengabdian kepada Masyarakat LP2M sehingga penelitian ini data tentang PkM nya cukup lengkap. Oleh karena itu, atas selesainya penelitian ini, penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada terhingga kepada :

1. Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang telah memberikan fasilitas pembiayaan sehingga penelitian ini dapat membuka potret pengabdian kepada masyarakat pada PTKIN;
2. Ketua dan Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang telah mengarahkan sistem penelitian tahun ini dengan sangat baik;
3. Ketua dan Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat LP2M UIN Syarif Hidayyatullah Jakarta dan staff atas data yang dikumpulkan dalam penelitian ini;
4. Pusat Pengabdian kepada Masyarakat LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan staff atas data yang dikumpulkan dalam penelitian ini;
5. Ketua, Sekretrais, Kepala Pusat Penelitian dan Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat LP2M UIN Walisongo Semarang beserta staff atas data yang dikumpulkan dalam penelitian ini;
6. Ketua dan Sekretaris LP2M UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta atas data yang dikumpulkan dalam penelitian ini;
7. Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat LP2M IAIN Syeikh Nurjati Cirebon dan staff atas data yang dikumpulkan dalam penelitian ini;

8. Ketua, Sekretaris, Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat LP2M dan IAIN Salatiga dan staff atas data yang dikumpulkan dalam penelitian ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang lebih baik kepada mereka atas bantuannya sehingga penelitian ini dapat diselesaikan.

Akhirnya, kepada pembaca penelitian ini sangat dinantikan koreksi, saran dan masukan jika dipandang ada data dan tulisan yang tidak dapat dipahami dan memerlukan perbaikan.

Bandung, 25 September 2016

Tim Peneliti,

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka Pemikiran	7
BAB II HASIL PENELITIAN	13
A. Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.....	13
1. Implementasi Pengabdian kepada Masyarakat di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	13
2. Bentuk dan Model Implementasi PkM	16
3. Metode PkM di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	28
B. Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung	40
1. Implementasi Pengabdian kepada Masyarakat di UIN Sunan Gunung Djati Bandung	40
2. Bentuk dan Model Implementasi	43
3. Metode PkM di UIN Sunan Gunung Djati Bandung.....	75

C. Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang	92
1. Implementasi Pengabdian kepada Masyarakat di UIN Walisongo Semarang	92
2. Bentuk dan Model Implementasi PkM	94
3. Metode PkM di UIN Walisongo Semarang	104
D. Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta	135
1. Implementasi Pengabdian kepada Masyarakat di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	135
2. Bentuk dan Model Implementasi PkM	136
3. Metode PkM di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta	148
E. Pengabdian kepada Masyarakat di Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon	158
1. Implementasi Pengabdian kepada Masyarakat di IAIN Syekh Nurjati Cirebon	158
2. Bentuk dan Model Implementasi PkM	159
3. Metode PkM di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syeikh Nurjati Cirebon	180
F. Pengabdian kepada Masyarakat di Institut Agama Islam Negeri Salatiga	181
1. Implementasi Pengabdian kepada Masyarakat di IAIN Salatiga	181
2. Bentuk dan Model Implementasi PkM	182
3. Metode PkM di IAIN Salatiga	194

BAB III PEMBAHASAN	197
A. Implementasi Pengabdian kepada Masyarakat di PTKIN	197
B. Bentuk dan Metode Pengabdian kepada Masyarakat di PTKIN.....	202
C. Konsep Ideal Pengabdian kepada Masyarakat di PTKIN	207
BAB IV SIMPULAN DAN SARAN	217
A. Simpulan	217
B. Saran	218
DAFTAR PUSTAKA.....	221
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tridharma perguruan tinggi adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Salah satu bentuk tridharma perguruan tinggi adalah pengabdian kepada masyarakat yang selanjutnya disingkat PkM. Secara konseptual, PkM di perguruan tinggi diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan baik dalam bentuk Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Permen dan Peraturan Dirjen.

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyebutkan bahwa Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. PkM tersebut dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan Sivitas Akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat. Hasil Pengabdian kepada Masyarakat digunakan sebagai proses pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, pengayaan sumber belajar, dan/atau untuk pembelajaran dan pematangan Sivitas Akademika.

Penjelasan PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi Pasal 22 ayat 3 menyebutkan bahwa perguruan tinggi memiliki otonomi dalam mengelola kegiatan PkM sehingga setiap PT dapat menerapkan norma, kebijakan operasional serta pelaksanaan pengabdian kepada

masyarakat. Lebih rinci lagi Permen Ristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi menjelaskan secara detail tentang standar minimal yang wajib dipenuhi oleh perguruan tinggi di dalam rangka menjalankan kegiatan PkM yang terdiri dari standar hasil, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pelaksanaan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan dan standar biaya. Seluruh standar PkM tersebut yang jumlahnya ada 8 (delapan) standar pengabdian yang dinyatakan dalam Permen Ristekdikti tersebut menjadi acuan bagi perguruan tinggi di Indonesia.

Di lingkungan Kementerian Agama, konsep PkM dirumuskan dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa PkM adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan, memberdayakan dan memfasilitasi masyarakat untuk melakukan transformasi sosial demi mencapai tingkat keadilan sosial dan penjaminan Hak Asasi Manusia yang memadai dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Rumusan dalam PMA ini sedikit berbeda dengan UU Nomor 12 Tahun 2012, PP Nomor 4 tahun 2014 dan Permen Ristekdikti Nomor 44 Tahun 2015. Perbedaan itu terletak pada sasaran PkM yang juga mencakup keadilan sosial dan penjaminan HAM. Perbedaan itu juga perlu dimaknai bahwa Peraturan Menteri karena posisinya berada di bawah undang-undang sudah semestinya memberi cakupan yang sedikit lebih luas dari undang-undang yang ada di atasnya.

Beranjak dari itu, Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 4834 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat di

Perguruan Tinggi Keagamaan Islam mengatur lebih teknis mengenai PkM yang diatur di dalam PMA Nomor 55 Tahun 2015. Menurut Keputusan Dirjen, yang dimaksud dengan pengabdian kepada masyarakat adalah “Kemitraan Universitas-Masyarakat” (KUM). Istilah ini digunakan untuk menyelaraskan dengan istilah yang digunakan oleh UU 12 Tahun 2012 dan PMA 55 Tahun 2014, yang esensinya adalah kemitraan yang setara antara universitas dan masyarakat. Sebagaimana diatur dalam UU 12 tahun 2012, khususnya pasal 47, 48 dan 49, lingkup pengabdian kepada masyarakat mencakup bidang ilmu yang dikembangkan oleh masing-masing perguruan tinggi. Oleh karena itu, dalam rangka menjalankan amanat UU, penting sekali perguruan tinggi melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan paradigma baru.¹

Kemitraan antara perguruan tinggi dengan komunitas menjadi sangat penting, agar perguruan tinggi tidak tercerabut dari akar masyarakat. Kedua komponen ini bekerjasama secara setara membangun bangsa melalui berbagai pendekatan dalam menumbuhkan budaya pemberdayaan melalui kemitraan. Baik perguruan tinggi maupun komunitas telah memiliki aset yang dapat dikembangkan untuk mensejahterakan kehidupan bangsa, sehingga model pendekatan pengembangan masyarakat berbasis aset dan pengembangan yang didorong oleh masyarakat perlu lebih diperkuat di kalangan perguruan tinggi keagamaan Islam.

Dalam paradigma kemitraan ini, perguruan tinggi dan masyarakat dituntut untuk kreatif menginisiasi kegiatan yang menumbuhkan

¹ Anonimous, *Regulasi Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam*. (Jakarta: Dirjen Pendis, 2015) hlm. 52.

potensi warga tanpa harus menggurui masyarakat. Oleh karena itu, model-model pembelajaran berbasis warga seperti *service learning* dan penelitian berbasis masyarakat (*community based research*) dapat digunakan. Apabila dilaksanakan secara sistematis, terencana dan terprogram dengan baik, pendekatan kemitraan ini akan membuahkan hasil yang bermanfaat bagi perguruan tinggi dan masyarakat. Penguatan distingsi perguruan tinggi keagamaan Islam berbasis masyarakat perlu ditunjukkan, karena akar dari perguruan tinggi keagamaan Islam adalah masyarakat. PTKI muncul dan tumbuh karena masyarakat, dikelola oleh masyarakat dan bersinergi dengan pemerintah, serta keberadaannya adalah untuk kemaslahatan masyarakat lebih luas. Terminologi “Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)” perlu dijelaskan dengan paradigma “Kemitraan Universitas-Masyarakat (KUM)”, yang diperkuat juga dengan karakter “Keislaman dan Keindonesiaan”.²

Berbagai peraturan perundang-undangan mengenai PkM pada dasarnya menunjukkan bahwa PkM adalah kegiatan pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni langsung pada masyarakat secara melembaga melalui metodologi ilmiah sebagai tanggungjawab luhur perguruan tinggi dalam usaha mengembangkan kemampuan masyarakat sehingga dapat mempercepat tujuan pembangunan nasional, khususnya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan martabat kemanusiaan. Tujuan tersebut dicapai dengan cara membantu pengembangan kemampuan masyarakat supaya secara mandiri agar dapat mengatasi masalahnya. Artinya program pengabdian kepada masyarakat harus mampu mempercepat proses peningkatan

² Ibid, hlm 52

kemampuan sumberdaya manusia supaya selalu sesuai dengan tuntutan dinamika pembangunan.³

Berdasarkan uraian di atas, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) di lingkungan Kementerian Agama baru merumuskan konsep PkM itu dalam 3 tahun terakhir (2014-2016) terutama jika dilihat dari PMA yang mengatur tentang PkM secara khusus baru muncul tahun 2014 dan Keputusan Dirjen Pendis pada tahun 2015 Nomor 4834 tentang pedoman PkM. Sungguhpun ada pula peraturan PkM yang tersebar dalam Rubrik BKD/LKD Dosen PTKIN yang dikeluarkan oleh Dirjen namun pengaturan secara khusus mengenai PkM baru muncul 3 tahun terakhir ini. Oleh karena itu, dengan mudah dapat diduga jika PTKIN masih ada yang sedang merumuskan konsep PkM dan tentu pula sudah ada PTKIN yang sudah ajeg mengatur mengenai PkM di kampusnya masing-masing bahkan sampai sudah ada pedoman PkM yang sudah di SK rektorkan.

Sejalan dengan itu, sangat dimungkinkan masing-masing PTKIN tidak seragam dalam merencanakan dan mendesaian kegiatan PkM. Namun sejak kemunculan PMA dan SK Dirjen tentang PkM mestinya setiap PTKIN menjadikan kedua peraturan tersebut menjadi acuan dalam kegiatan PkM. Oleh karena itu riset ini berikhtiar merumuskan mengenai konsep PkM yang dikehendaki oleh kedua peraturan tersebut di lingkungan PTKIN dan mengkaji serta menganalisis implementasinya di beberapa PTKIN di Indonesia.

³ Bandingkan dengan *Panduan Penulisan Proposal Program Hibah PkM Universitas Padjadjaran 2013*. (Bandung: LPPM UNPAD, 2013) hlm. 3

B. Rumusan Masalah

Secara konseptual pengabdian kepada masyarakat dirumuskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam peraturan tersebut, PkM merupakan salah satu dharma perguruan tinggi yang wajib dilaksanakan oleh setiap perguruan tinggi. PTKIN merupakan salah satu perguruan tinggi negeri yang berada di Kementerian Agama. Peraturan yang secara khusus mengenai PkM muncul sejak tiga tahun terakhir (2014-2016). Konkretisasi peraturan mengenai PkM oleh kemenag memiliki fungsi regulatif yang mesti dipedomani.

Namun dalam implementasinya, peraturan perundangan mengenai PkM di PTKIN tersebut diperluas dan juga dimodifikasi sedemikian rupa, baik dalam hal perencanaan, bentuk kegiatan, metode, pendanaan dan kemitraan yang berbeda dengan konsep PkM dalam berbagai regulasi di atas. Di satu sisi, terjadi perluasan cakupan PkM dan di sisi lain terjadi berbagai pengembangan konsep PkM. Fokus penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi konsep PkM pada PTKIN
2. Bagaimana bentuk dan model implementasi PkM pada PTKIN
3. Bagaimana metode implementasi PkM pada PTKIN

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mendeskripsikan implementasi konsep PkM pada PTKIN;
2. Untuk membandingkan berbagai implementasi bentuk PkM pada PTKIN;
3. Untuk mengidentifikasi berbagai metode implementasi PkM pada PTKIN;

D. Manfaat

Penelitian ini diharapkan membawa dua manfaat sekaligus, yaitu manfaat teoritis berupa konsep pengabdian dan pemberdayaan kepada masyarakat yang digunakan di dalam pengembangan masyarakat pada matakuliah ilmu sosial dan manfaat praktis berupa tersusunnya kebijakan tentang pengabdian kepada masyarakat di UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

E. Kerangka Pemikiran

Secara konseptual, kegiatan PkM mencakup pengertian sebagai berikut :

1. Pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni menjadi produk yang secara langsung dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Hasil-hasil penelitian yang berupa ilmu pengetahuan, teknologi dan seni harus sudah dalam bentuk yang siap dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat.
2. Penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni sebagai produk yang perlu diketahui dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Upaya penyebarluasan ini dapat melalui publikasi, penyuluhan, percontohan, peragaan dan sebagainya.
3. Penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, secara benar dan tepat oleh masyarakat sesuai dengan situasi masyarakat dan tuntutan pembangunan. Azas efisiensi dan efektivitas perlu dijadikan tolok ukur.

4. Pemberian bantuan keahlian kepada masyarakat dalam mengidentifikasi masalah yang dihadapi serta mencari alternative pemecahannya dengan menggunakan pendekatan ilmiah.
5. Pemberian jasa pelayanan professional kepada masyarakat dalam berbagai bidang permasalahan yang memerlukan penanganan secara cermat dengan menggunakan keahlian yang belum dimiliki oleh masyarakat yang bersangkutan, terutama untuk masalah yang bersifat mendesak dan darurat.⁴

Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu bentuk Tridharma Perguruan Tinggi disamping pendidikan dan penelitian. Sejak awal gagasan pendirian perguruan tinggi adalah mengembangkan ilmu pengetahuan, mempersiapkan warga negara yang cerdas, berilmu, beriman, dan beramal untuk kemajuan bangsa, serta berkhidmat kepada masyarakat yang ada. Semangat keutuhan atau integrasi Tridharma ini dimandatkan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Dalam UU ini pengabdian pada masyarakat diartikan sebagai kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sampai saat ini, berdasarkan Tipologi Pengabdian Morton ditengarai ada tiga paradigma, cara pandang dan model pengabdian kepada masyarakat.⁵ Paradigma ini merupakan kerangka umum pemikiran dan asumsi-asumsi yang mempengaruhi dan dipengaruhi

⁴ Margono, S. *Metodologi Pengabdian pada Masyarakat oleh Perguruan Tinggi*. (Jakarta: Direktorat Pembinaan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Dikti, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1986). Hlm. 5

⁵ Robert G. Bringle, Julie A. Hatcher, and Rachel E. McIntosh, "Analyzing Morton's Typology of Service Paradigms and Integrity," dalam *Michigan Journal of Community Service Learning*, MJCSL 13-1 10/11/06 (Fall 2006): 5-15

oleh nilai-nilai dan perilaku masyarakat baik lokal atau global pada masanya. Paradigma pertama dikenal dengan nama *Charity* (Bhakti Sosial atau sedekah). Asumsi dari pemikiran ini adalah bahwa kampus merupakan pihak yang punya sumber daya pengetahuan dan teknologi dan karena itu berkewajiban untuk memberikannya atau mendedekahkannya kepada masyarakat yang dianggap sebagai pihak yang tidak punya dan selalu dalam keadaan membutuhkan uluran tangan perguruan tinggi. Kegiatan-kegiatan model pengabdian ini seringkali bersifat sporadis dan berupa santunan makanan, pakaian, dan alat-alat rumah tangga. Ilustrasi anekdot untuk paradigam ini adalah memberi ikan kepada orang yang lapar.

Paradigma kedua adalah *Project* (Proyek). Asumsi-asumsi dasar dalam paradigma ini adalah bahwa pengabdian harus dilakukan dengan cara yang terorganisir. Oleh karena itu, model pengabdian ini diawali dengan kajian masalah yang dihadapi oleh masyarakat, menentukan solusi, merencanakan tindakan, dan menerapkan rencana untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Pengabdian seperti ini seringkali mengabaikan peran masyarakat sebagai unsur yang paling berkepentingan dalam proyek lantaran mereka dianggap bukan sebagai ahli atau orang yang terlatih. Oleh karena itu, masyarakat dinilai butuh pelatihan-pelatihan keterampilan beserta penguasaan teknologinya. Ungkapan anekdot untuk paradigma ini adalah “jangan kasih ikan orang yang lapar tapi beri pancing dan cara menggunakannya.” Ungkapan ini terkesan mengkambinghitamkan (*blaming the victims*) masyarakat atas ketidakberuntungannya dan sesekali malah menciptakan jenis ketergantungan baru.

Paradigma ketiga biasa disebut dengan *Social Change* (Transformasi Sosial). Ini adalah paradigma yang menyakini nilai-nilai keadilan dan kearifan lokal. Pengabdian ini menitikberatkan pada proses pengembangan hubungan intra-masyarakat sebagai satu kesatuan warga yang setara dan dengan pemangku kepentingan lainnya secara proporsional. Penciptakan lingkungan pembelajar secara kolektif dan kolaboratif adalah bentuk dari kegiatan pengabdian ini. Masyarakat dipandang sebagai satu unit komunitas yang mempunyai kuasa dan kendali atas asset, sumber daya, dan masalahnya sendiri. Dalam paradigma ini juga, masyarakat dianggap punya sesuatu, yaitu *power* (kekuatan dan kekuasaan) yang acap kali kurang atau tidak berkembang. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan pengabdian dalam paradigma ini bersifat *empowering* (pemberdayaan) yang berkelanjutan (*sustainable*) dan menyertakan nilai-nilai *democratic governance* untuk berbagi kekuasaan dengan adil dalam masyarakat. Fokus dari pengabdian ini terletak pada pemanfaatan dan pemeliharaan sumber daya masyarakat beserta penyediaan akses yang merata untuk semua lapisan masyarakat. Bukan sekedar ikan, pancing dan keterampilannya yang menjadi konsentrasi melainkan sungai (ruang), ekosistem dan ekologi yang sehat dimana ikan bisa hidup dan dimanfaatkan. Anekdote untuk paradigma ini adalah “untung masih ada sistem, struktur, dan pemerintahan yang bisa disalahkan, jadi masih ada yang dikerjakan.”

Ketiga paradigma di atas bisa dipahami sebagai satu kontinum, artinya satu sama lain tidak perlu dipertentangkan. Adakalanya satu paradigma dan model pengabdian kepada masyarakat tepat untuk dipakai dalam konteks-konteks tertentu. Hal yang paling penting dari masing-masing paradigma itu adalah integritas antara niat baik dan

tindakan pengabdian yang sesuai dengan konteks dan bermuara pada terciptanya pola hubungan yang adil dan setara dari berbagai aspek, seperti gender, lingkungan, budaya, sosial, dan politik.

Melakukan pengabdian masyarakat dengan pendekatan sedekah bukanlah hal yang keliru dalam konteks-konteks tertentu yang sifatnya lebih individual, praktis dan pragmatis. Memberi pelampung kepada orang yang tenggelam lebih baik dibandingkan dengan memikirkan, merencanakan, mengorganisasikan, dan menentukan evaluasi penyelamatannya. Bukankah sedekah memiliki nilai tinggi dalam ajaran agama. Di lain pihak, ada konteks yang menunjukkan bahwa nilai sedekah bisa ditingkatkan dalam bentuk transaksi utang-piutang. Islam mengajarkan bahwa memberi hutang yang baik lebih tinggi nilainya dibandingkan dengan memberi sedekah.

Hikmah dibalik nilai pemberian hutang menjadi lebih tinggi adalah unsur etos kerja yang ditimbulkannya. Praktik ini menjaga semangat dan motivasi orang untuk bekerja lebih aktif dan menimbulkan kemandirian serta keyakinan pada diri sendiri. Etos kerja yang tinggi seperti ini contohnya bisa dilihat dalam tradisi awal umat Muslim, yaitu ketika Abdurrahman ibn Auf lebih memilih ditunjukkan jalan ke pasar daripada menerima santunan dari sahabat Anshar, Sa'ad ibn al-Rabi'. Mendapatkan peluang akses ke pasar adalah kesempatan yang berharga untuk pengembangan kesejahteraan seseorang dan memiliki nilai yang strategis.

Oleh karena itu, sistem pasar yang ada harus dipastikan menjamin keadilan bersama dan tidak mentoleransi adanya praktek-praktek monopoli. Pengalaman Ibn Auf adalah contoh penting pengembangan masyarakat yang bisa diteladani. Sebuah ilustrasi betapa pentingnya

persoalan kesempatan dan peluang sangat berkaitan dengan persoalan tata kelola. Muhammad yang dikenal sebagai rasul berpikir lebih sistemik untuk menciptakan pasar baru yang tidak bebas nilai. Nilai-nilai yang dikembangkan adalah keadilan, kesetaraan, dan terbuka untuk publik. Bahkan berusaha menutup peluang adanya praktek monopoli dengan cara memonitoring pelaksanaan pasar agar bersih dari nilai-nilai yang merugikan kepentingan umum. Status beliau sebagai rasul tidak menghalanginya untuk terlibat dalam wilayah kehidupan praktis duniawi, seperti urusan pasar bahkan kalau tidak menguasai bidang tertentu seperti pertanian, Rasulullah akan meminta bantuan orang yang ahli. Penuturan cerita bagaimana upaya-upaya pembangunan umat Muslim pada masa awal ini bisa memudahkan memahami bagaimana tiga paradigma perguruan tinggi dalam konteks sejarah Islam. Artinya, ketiga paradigma itu mempunyai nilai spesifiknya masing-masing yang bisa digunakan dalam konteks yang berbeda yang berujung pada tujuan yang satu. Membawa perbaikan kualitas kehidupan manusia yang bermartabat penuh dengan nilai-nilai berkeadilan sosial.⁶

⁶ Anonimous, *Panduan KKN ABCD*. (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2015). Hlm 3-5

BAB II HASIL PENELITIAN

G. Pengabdian kepada Masyarakat di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

4. Implementasi Pengabdian kepada Masyarakat di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu dharma perguruan tinggi, termasuk di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kegiatan ini dapat dinilai sebagai salah satu tugas bagi lembaga, para dosen, para karyawan, dan para mahasiswa.

Institusi yang bertanggungjawab melaksanakan pengabdian kepada masyarakat adalah Pusat Pengabdian kepada Masyarakat (PPM). Pusat ini memfasilitasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa, dosen, dan unit terkait di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan pendekatan “*Community Based*” serta menjadi laboratorium sosial praksis dari berbagai tema riset yang berkembang di UIN. Pusat ini bekerja sama dengan berbagai instansi pemerintah, perusahaan swasta, universitas lain serta NGO, baik dalam maupun luar negeri, bukan hanya untuk memperkuat aktivitas pengabdian itu sendiri, namun juga mengenalkan mahasiswa kepada beragam *stakeholder* yang ada di tengah masyarakat.⁷

⁷ www.uinjkt.ac.id

Menurut Kepala Pusat (Kapus) Pengabdian pada Masyarakat, Jaka Badranaya, pada mulanya pengabdian kepada masyarakat di UIN Jakarta dipandang sangat simplifikatif oleh para dosen. Atas perihal itu dilakukan stock opname sampai kemudian akhirnya terbit beragam kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM). “Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat berupa kegiatan terstruktur, kelompok, mandiri, dan atau ekuivalensi atau alih kredit’ Ini merupakan upaya untuk mengapresiasi para penggiat dan insan pengabdian kepada masyarakat dari kalangan dosen, mahasiswa dan alumni yang dinilai konsisten memberikan kontribusi kepada masyarakat dalam bidang agama, sosial kemanusiaan, lingkungan hidup, kebudayaan dan pendidikan, ekonomi dan masyarakat demi mewujudkan terbinanya masyarakat yang harmonis serta dinamis yang siap menempuh perubahan-perubahan menuju perbaikan dan kemajuan”.⁸

Pengabdian kepada Masyarakat oleh mahasiswa dapat dijadikan sebagai salah satu komponen evaluasi penyelesaian studi. Oleh karena itu pimpinan Fakultas/Jurusan/Program Studi dapat memasukkannya ke dalam kurikulum. Nama matakuliah pengabdian pada masyarakat ini dapat berupa Kuliah Kerja Nyata (KKN), bakti sosial, kerja lapangan, atau lainnya. Matakuliah ini dapat diberi bobot 2-4 sks.

Bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat berupa kegiatan terstruktur, kelompok, mandiri, dan/atau ekuivalensi/ alih kredit. Teknis penetapan kegiatan pengabdian

⁸ Wawancara dengan Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat LP2M UN Syarif Hidayatullah Jakarta (Jaka Badranaya), 19 Juli 2016

kepada masyarakat ini dikoordinasikan oleh Pusat Pengabdian pada Masyarakat (PPM) pada LP2M UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan/atau bersama dengan pimpinan Fakultas/Jurusan/Program Studi.

Menurut Jaka Badranaya, substansi program pengabdian yang diterapkan kampus adalah media pendidikan bagi mahasiswa agar bisa berinteraksi antar individu dalam kelompok, dengan masyarakat, bahkan interaksi dengan masalah yang ada di masyarakat. “Apa yang mereka lakukan, yaitu interaksi dengan tiga subjek tersebut, diharapkan bisa mereka ambil sebagai modal ketika mereka kembali kepada masyarakat setelah menyelesaikan di bangku kuliah”.

Selain pengabdian dosen dan mahasiswa kepada masyarakat, PPM LP2M UIN Syarif Hidayatullah Jakarta juga menyelenggarakan PPM Award 2016. Kegiatan yang baru pertamakalinya dilaksanakan ini sebagai realisasi Tridharma Perguruan Tinggi UIN Jakarta. Pengabdian kepada masyarakat merupakan pelaksanaan pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni budaya secara langsung pada masyarakat, serta tersusun dalam komponen kelembagaan melalui metodologi ilmiah ini, selain penyebaran Tridharma perguruan tinggi, juga merupakan tanggung jawab yang luhur dalam usaha mengembangkan kemampuan masyarakat.

Sebagai informasi, terkait *Pengabdian Masyarakat Award 2016* ini, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi antara lain; pengabdian tersebut menyangkut bidang agama, sosial kemanusiaan, lingkungan hidup, kebudayaan, pendidikan,

ekonomi, dan masyarakat, mengisi formulir, lalu mengirim ringkasan portofolio 2–3 halaman, foto copy KTP/KTM (bagi mahasiswa), surat dukungan dari masyarakat penerima manfaat dukungan yang telah dilakukan oleh calon penerima award 2016, dengan mengirimnya ke alamat email ppm@uinjkt.ac.id dengan subjek PMA (spasi) Nama Calon Penerima, dokumentasi program. Pendaftaran program ini telah dibuka sejak 28 September dan akan ditutup pada 28 oktober 2016. Akhir penjurian 07 November bersamaan dengan malam penganugerahan yang akan dilaksanakan pada 11 November 2016.

Dengan demikian, implementasi pengabdian kepada masyarakat di UIN Jakarta fokusnya diperuntukan bagi dosen dan mahasiswa dengan menekankan hasil bagi para pengabdian yang memiliki keunggulan di dalam kegiatan pengabdian. Bagi mereka yang unggul diberikan *reward* yang pantas. Selain itu, program lainnya pun disiapkan, seperti menyiapkan SDM pengabdian, jurnal dan sebagainya.

5. Bentuk dan Model Implementasi PkM

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta melaksanakan beragam pengabdian kepada masyarakat dalam berbagai bentuk. Terlihat bahwa keragaman bentuk kegiatan PkM oleh dosen mulai dari jenis dan biaya pengabdian. Pengabdian dosen kepada masyarakat didasari oleh latar belakang bahwa pengabdian kepada Masyarakat oleh Dosen memiliki beragam bentuk, jenis, pendekatan, dan mekanisme aksi. Di Pusat Pengabdian kepada Masyarakat (PPM) Lembaga Penelitian dan

Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, pengabdian masyarakat telah menjadi salah satu instrumen penting dalam melakukan *community engagement* (CE) antara kampus dengan masyarakat.

Bentuk-bentuk CE yang ada dalam tupoksi PPM antara lain Kuliah Kerja Nyata atau lazim dikenal sebagai KKN, yang tahun 2016 mengalami ekstensifikasi dan diversifikasi pada model, sistem, cakupan wilayah, dan manajemen programnya. KKN dan segala derivasinya adalah metode partisipatori CE yang aktor utamanya adalah mahasiswa. Di mana dalam praktiknya, mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan KKN harus melakukan kerja nyata di lapangan dengan desain tertentu dan target tertentu.

Jika KKN dan variannya di atas menjadikan mahasiswa sebagai aktor utama, pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi itu juga harus dilakukan oleh para dosen. Namun, berbeda dengan KKN mahasiswa, pengabdian kepada masyarakat oleh dosen (PpMD) ini memiliki sistem, mekanisme, dan proses pengelolaan yang berbeda.

Dengan demikian, terdapat dua bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilihat dari segi pelaku atau aktornya, yaitu pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa.

a. Pengabdian pada Masyarakat oleh Dosen (PpMD)

Ada tiga model pengabdian kepada masyarakat oleh dosen (PpMD) yang ditawarkan oleh PPM pada tahun 2016 yaitu:

- 1) PpMD berbasis Kemitraan dengan Desa (Desa Mitra);
- 2) PpMD berbasis Riset; dan,
- 3) PpMD terintegrasi dengan KKN.⁹

Semua jenis Pengabdian kepada Masyarakat: PpMD Desa Mitra, PpMD Berbasis Riset dan PpMD Terintegrasi KKN, dimaksudkan agar dosen-dosen di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, memiliki pilihan menu pengabdian sesuai kompetensi dasar dan minatnya. Meski tidak akan mampu mengakomodasi seluruh ide-ide pemberdayaan dan pengabdian yang ada, namun paling tidak, variasi dari berbagai model PpMD ini akan menjadi pemantik bagi gerakan-gerakan akademik berbasis pengabdian. Selain itu juga akan memberikan warna tersendiri dalam menjadikan pengabdian kepada masyarakat sebagai “Teras Depan” CE UIN dengan masyarakat luas.

Tujuan Petunjuk Teknis Pengabdian kepada Masyarakat oleh Dosen (PpMD) adalah membantu para dosen (individu dan kelompok) yang *concern* dalam pengabdian masyarakat untuk mengelaborasi suatu kawasan khusus dengan model pemecahan masalah dan pemberdayaan khas dan menghasilkan kegiatan pelaksanaan Pengembangan Desa Mitra yang terintegrasi dengan visi dan misi lembaga Perguruan Tinggi.

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan salah satu bentuk keterlibatan *engagement* perguruan tinggi untuk tujuan transformasi sosial. Kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan berbagai bentuk yaitu:

⁹ Pada bagian tentang PKM yang dilaksanakan oleh dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta data diambil dari Petunjuk Teknis Pengabdian Masyarakat oleh Dosen Tahun 2016.

- 1) Pembelajaran Masyarakat, yakni suatu kegiatan yang ditujukan untuk belajar bersama masyarakat atau menguatkan kemampuan, potensi dan aset masyarakat, termasuk dialog, lokakarya, dan pelatihan.
- 2) Pendampingan Masyarakat, yakni kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara intensif dan partisipatif agar tercapai kemandirian dari komunitas atau kelompok mitra.
- 3) Advokasi, yakni kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa menumbuhkan kepekaan sosial, politik, dan budaya, serta kapasitas/kemampuan untuk memperjuangkan dan memperoleh hak-hak sebagai warganegara.
- 4) Pemberdayaan Ekonomi, yakni kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pendapatan.
- 5) Layanan Masyarakat, yakni penyediaan layanan masyarakat seperti layanan keagamaan, kesehatan, mediasi, resolusi konflik, konsultasi (psikologi, keluarga, hukum, pembuatan rencana bisnis, proyek), pelatihan, penelitian, dan lain-lain.
- 6) Ujicoba, Adaptasi serta Penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG) berbasis IPTEKS, yakni kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pengembangan dan penerapan hasil penelitian (*action research*) ataupun teknologi sederhana untuk mengembangkan potensi dan peluang yang terdapat pada suatu komunitas masyarakat. Misalnya pembuatan alat produksi, pembuatan sistem manajemen, dll.
- 7) Kegiatan sosial yang bersifat karitatif, seperti bantuan untuk korban bencana alam dan sosial.

Pada tahun 2016, program PpMD ini dibagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu: (1) PpMD berbasis Kemitraan dengan Desa (Desa Mitra); (2) PpMD berbasis Riset; dan, (3) PpMD terintegrasi dengan KKN. Ketiga bentuk program merupakan program pemantapan, transisi, dan penguatan terutama pada aras desain dan landasan filosofis programnya sendiri. Oleh karena bersifat pemantapan, transisional, dan penguatan, maka pada tahun 2016, sifat dari program menjadi kerangka dasar bagi realisasi PpMD pada tahun berikutnya, sesuai dengan visi ideal dari program itu sendiri.

Dalam beberapa hal, sistem dan mekanisme masih menganut atau merujuk kepada sistem sebelumnya. Perbaikan mendasar dilakukan pada: (a) Mekanisme *reviewer*; (b) Metodologi; (c) Penetapan Desa Mitra/ lokasi pengabdian; (d) Pemilihan isu pemberdayaan; (e) Pemilihan program yang disetujui; dan (f) Sistem pelaporan.

Pada mekanisme review proposal, PPM melakukan uji forensik tema, teori, dan komunitas yang dipergunakan sebagai uji realisasi program. Sehingga program ini bisa *in line* dengan visi idealitas dari program itu sendiri, serta tidak mengabaikan dari visi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menuju *Research University*.

Tiga bentuk PpMD dijelaskan sebagai berikut:

- 1) PpMD berbasis Kemitraan Desa. PpMD Berbasis Kemitraan Desa (Desa Mitra) merupakan bagian dari kerangka besar Pengabdian kepada Masyarakat oleh Dosen. Program ini diinisiasi oleh dosen atau kelompok dosen yang pelaksanaannya sesuai dengan proposal yang diseleksi dan disetujui oleh Tim

Khusus PPM. PpMD Berbasis Kemitraan Desa (Desa Mitra) memiliki dua jenis kegiatan yaitu:

- a) PpMD Desa Mitra Interdisipliner. PpMD Desa Mitra Interdisipliner adalah kegiatan PM yang para inisiatornya adalah dosen-dosen yang memiliki latar belakang keilmuan, jurusan, dan fakultas yang berbeda. Sehingga proses pelaksanaan dalam melakukan pencapaian tujuan pemberdayaan bisa komprehensif, dengan pendekatan yang multidisiplin. Diharapkan dengan pendekatan interdisiplin bisa menemukan atau membangun pendekatan baru atau menemukan metode pemecahan masalah baru, dalam rangka transformasi struktural.
 - b) PpMD Desa Mitra Berbasis Prodi. PpMD Desa Mitra Berbasis Prodi adalah kegiatan PM yang para inisiatornya adalah dosen-dosen yang tergabung dalam prodi tertentu. Tujuan dari PpMD berbasis Prodi agar program studi tertentu mampu melakukan pengembangan dan pendalaman ilmu dibidangnya. Sehingga, bisa melakukan kritik atau pengayaan atau malah menemukan teori baru untuk melakukan transformasi struktural.
- 2) PpMD berbasis Riset. PpMD berbasis Riset adalah bentuk pengabdian kepada masyarakat dengan metode riset yang model pencapaian tujuannya mengandalkan satu pendekatan dan metodologi tertentu. PpMD berbasis Riset merupakan program baru di PPM. Program ini dimaksudkan untuk mempertajam dan memperkaya model pengabdian kepada masyarakat oleh kalangan akademisi. PpMD berbasis Riset bisa diinisiasi oleh

kelompok dosen dari berbagai disiplin ilmu maupun dari satu rumpun ilmu tertentu. Untuk memperkaya atau memperkuat teori pemberdayaan tersebut, maka bentuk PpMD berbasis Riset ini berupa pendampingan, dan atau advokasi. Sedangkan metode yang disarankan untuk PpMD berbasis Riset adalah PAR dan CBR.

- 3) PpMD Terintegrasi KKN. PpMD terintegrasi KKN merupakan program yang diinisiasi oleh dosen, dan proses pelaksanaannya diintegrasikan dengan agenda dan program KKN Mahasiswa. Untuk PpMD terintegrasi KKN diarahkan kepada model pemberdayaan partisipatif dengan aktor kelompok mahasiswa KKN dan dosen pendamping secara kolaboratif. Adapun *outcome*-nya terjadinya proses transformasi ilmu pengetahuan di aras mahasiswa dan dosen dalam beragam bentuk seperti: ruang partisipasi, dialog publik, serta eksekusi suatu program pengabdian.

Tema pengabdian dosen kepada masyarakat pada tahun 2016 ditetapkan 5 (lima) isu yang dilihat sangat strategis bagi penguatan dan pemberdayaan kelembagaan masyarakat, yaitu:

- 1) Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan Desa/ Kelurahan berbasis penguatan SDM dan atau berbasis penguatan dan optimalisasi ICT;
- 2) Penyelamatan dan Manajamen Ekologi Masyarakat;
- 3) Keberdayaan Perempuan;
- 4) Pemberdayaan Rumah Tangga Miskin Perkotaan dengan fokus bidang: kesehatan, pendidikan, ekonomi, kesadaran hukum; dan,

- 5) Penguatan kapasitas lembaga sosial-keagamaan masyarakat Islam.

Sedangkan pada penetapan arena untuk melaksanakan PpMD tahun 2016 ini PPM hanya merekomendasikan desa-desa dan kelurahan di Provinsi Banten, dengan memberikan penilaian lebih untuk daerah-daerah dan komunitas yang masih terisolir, marginal, kurang terberdayakan, mengalami problem akses, serta terjadi kontestasi ruang yang mengancam tatanan sosial, budaya, dan bahkan agama masyarakat.

Syarat mengikuti program ini pengusul yang terdiri dari dosen mengajukan proposal. Proposal adalah dokumen yang harus disiapkan oleh setiap kelompok dosen agar program PpMD disetujui atau layak dipertimbangkan oleh PPM. Karena itu, proposal menjadi dokumen awal yang bisa dipergunakan oleh Tim Reviewer dalam menilai suatu proposal.

Setiap proposal PpMD diusulkan oleh Dosen Tetap dan PNS UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Bagi PpMD Dosen Terintegrasi, dosen pengusul telah ditetapkan dan mengikuti workshop Pengabdian Dosen yang diselenggarakan oleh PPM. Sedangkan kelompok dosen untuk Desa Mitra maupun Kompetitif Berbasis Riset, dosen tersebut harus mengikuti beberapa workshop yang diselenggarakan oleh PPM.

Setiap kelompok pengusul hanya diperkenankan mengajukan 1 judul proposal saja. Setiap ketua dan anggota dalam kelompok tidak diperkenankan masuk menjadi anggota/ ketua di kelompok lain. Ketua dan anggota kelompok pengusul bukan penerima hibah pengabdian dosen, dan bukan Dosen Pembimbing KKN

Mahasiswa. Ketua Tim adalah dosen yang mempunyai *background* pendidikan dan kompetensi keilmuan yang sesuai dengan kluster pengabdian. Dosen tidak tetap, hanya diperkenankan menjadi anggota dan bisa bergabung dalam tim jika pada semester tahun berjalan mendapatkan jadwal mengajar di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sedangkan Bagi dosen tidak tetap harus melampirkan SK sebagai pengajar pada semester berjalan. Setiap kelompok harus membuat proyeksi pelibatan mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatannya.

Setiap proposal yang diusulkan oleh kelompok dosen, dapat mendesain kegiatannya dengan alokasi anggaran sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) perproposal. Sedangkan untuk PpMD Terintegrasi, individu dosen harus mendesain kegiatan pengabdian dengan alokasi anggaran sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta perproposal).

b. KKN

Pengabdian mahasiswa kepada masyarakat dilakukan dalam kegiatan KKN. Mulai tahun 2016 ini, Pusat Pengabdian kepada Masyarakat (PPM) LP2M-UIN Syarif Hidayatullah Jakarta melakukan perubahan dalam pelaksanaan KKN, perubahan tersebut terlihat pada pola pelaksanaan pendaftaran KKN. Pada tahun sebelumnya pendaftaran KKN dilakukan secara berkelompok oleh mahasiswa. Mahasiswa lah yang menentukan siapa yang menjadi anggota di kelompoknya kemudian memilih desa. Berdasarkan pengalaman tahun 2015, pola seperti itu mengalami kendala saat sebaran fakultas dalam satu kelompok tidak merata. Padahal mengintegrasikan sejumlah keilmuan

fakultas dalam satu kelompok merupakan salah satu misi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Oleh karenanya, pada tahun ini pengelompokan anggota KKN dan penentuan lokasi KKN akan dilakukan oleh PPM. Atas dasar itulah, mengapa PPM merubah pola pendaftaran KKN-PpMM pada tahun 2016.

Setiap mahasiswa semester VI yang telah memenuhi persyaratan KKN wajib mengisi formulir isian ini sebagai syarat awal untuk menjadi calon peserta KKN-PpMM 2016. Semua data akan direkap dan dikelompokkan secara acak oleh PPM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan mempertimbangkan sebaran fakultas dan gender.

Bentuk KKN terdiri atas:

- 1) KKN Reguler (kelompok), yaitu bentuk pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa di masyarakat secara berkelompok.
- 2) KKN Bebas Terkendali/Mandiri, yaitu bentuk pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan mahasiswa dalam bentuk program KKN mandiri secara individual.
- 3) KKN Relawan (kelompok/Individual) merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa baik secara individu maupun berkelompok yang menjadi relawan dalam program kepedulian dan penanganan bencana alam yang terjadi di masyarakat.
- 4) KKN in Campus (individual) yaitu bentuk pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dalam mengaplikasikan pengetahuannya di lingkungan kampus dan sekitarnya secara individu;

- 5) KKN internasional merupakan bentuk pengabdian yang dilakukan oleh mahasiswa dari perguruan tinggi lain di luar negeri yang ikut tergabung dalam pelaksanaan KKN reguler.

Bentuk kegiatan yang diselenggarakan oleh Pusat PPM UIN Jakarta sesungguhnya cukup banyak, bukan hanya PpMD dan KKN melainkan juga kegiatan yang mendukung bagi terlaksananya substansi kegiatan pengabdian. Berdasarkan rincian dalam RKAKL tahun 2016, kegiatan Pusat PPM UIN Jakarta sangat variatif sebagaimana dapat dilihat dalam tabel 1.

Tabel 1

Rincian Program Pengabdian kepada Masyarakat
Pusat Pengabdian kepada Masyarakat
LP2M UIN Syahid Jakarta

No	Jenis Kegiatan
1	Perumusan Strategi PM oleh Mahasiswa
2	Pembekalan metode PM untuk Mhs
3	KKN Reguler
4	KKN Kebangsaan
5	Pengabdian oleh Dosen
6	Worshop Penulisan Artikel Jurnal Berbasis Pengabdian
7	Worshhop Multimedia untuk PkM
8	Penyusunan Profil dan laporan tahunan
9	Sosialisasi Hasil Pengabdian Masyarakat

10	Worshop desain baru pengabdian masyarakat bagi mahasiswa
11	Worshop desain baru pengabdian masyarakat bagi Dosen
12	Workshop kemitraan pengabdian masyarakat bersama lurah se tangsel
13	Workshop kemitraan pengabdian masyarakat bersama DKM se tangsel
14	Sosialisasi Program PPM tahun 2016 bagi mahasiswa baru
15	Penyusunan Juknis 2016 dan SOP terkait
16	FGD kajian teori pengembangan Masyarakat
17	Pengembangan Web Pusat Pengabdian kepada Masyarakat
18	Pelatihan Metode Pengabdian kepada Masyarakat oleh Dosen (4 angkatan)
19	Publikasi jurnal dan media pengabdian
20	Penyusunan Ringkasan Eksekutif Buku Hasil KKN 2016
21	Short Course Community Outrech

Sumber : RKAKL Pusat Pengabdian kepada Masyarakat UIN Syahid Jakarta

Beragam bentuk kegiatan Pusat PPM UIN Syahid Jakarta di atas memberi gambaran bahwa telah terjadi banyak pergeseran mengenai makna dan jenis kegiatan pengabdian yang selama ini dilakukan dengan bentuk yang konvensional berubah ke dalam bentuk yang lebih operasional dengan total anggaran Rp. 5.400.000.000 (Lima Milyar Empat Ratus Juta Rupiah)

6. Metode PkM di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Setidaknya terdapat dua kegiatan besar PkM yang diselenggarakan oleh Pusat PPM UIN Jakarta, yaitu Pengabdian kepada Masyarakat oleh Dosen (PpMD) dan oleh mahasiswa melalui kegiatan KKN. Guna melaksanakan kegiatan tersebut, dilakukan berbagai metode yang dalam hal ini metode lebih diartikan sebagai tahapan penyelenggaraan. Oleh karenanya, penjelasan mengenai tahapan pengabdian oleh dosen dan KKN mahasiswa secara garis besar dimulai dari persiapan, pelaksanaan dan evaluasi.

a. Pengabdian kepada Masyarakat oleh Dosen (PpMD)

1) Sosialisasi

Proses sosialisasi dilakukan menjelang penjaringan proposal. PPM melakukan sosialisasi melalui surat yang ditujukan kepada fakultas dan jurusan, famplet dan poster yang ditempel di mading-mading kampus, serta melalui media lain seperti web site, SMS Grup, email, dan media sosial.

Selain melalui media tersebut, sosialisasi dilakukan di forum-forum yang memungkinkan PPM atau LP2M menjelaskan kepada calon pengusul. Waktu sosialisasi sangat dibatasi, yakni 1 Bulan saja. Untuk tahun 2016, sosialisasi dilakukan pada bulan Maret.

2) Seleksi Proposal

Proses selanjutnya adalah seleksi proposal. Proses seleksi dilakukan pada bulan April 2016 minggu pertama sampai minggu kedua. Untuk melakukan proses seleksi, PPM mengangkat/ menunjuk Tim seleksi, atau disebut sebagai reviewer proposal. *Reviewer* adalah ahli yang ditunjuk dan ditetapkan oleh PPM.

Komposisi reviewer terdiri dari: Kepala PPM, 2 orang fungsional PPM, dosen/ *community workers* ahli dari luar PPM. Reviewer memiliki hak untuk menerima dan atau menolak proposal yang diajukan oleh pengusul. Penilaian merupakan proses yang dilakukan oleh tim untuk menerima atau menolak usulan proposal. Penilaian bersifat tim dan agregat. Nilai akhir menjadi rujukan utama dalam membuat keputusan. Beberapa aspek penting yang digunakan Tim Reviewer adalah:

- a) Kesesuaian dengan agenda, program, dan visi misi UIN;
- b) Berpotensi memberikan kontribusi kepada upaya-upaya akademik seperti pengembangan keilmuan dan uji teori, pemberdayaan, pemeliharaan keberlanjutan, dan sebagainya;
- c) Kesesuaian antara keilmuan pengusul dengan agenda/ program di lapangan;
- d) Melekat atau dilekatkan kepada institusi masyarakat seperti desa, karang taruna, komunitas adat, dan gerakan-gerakan *civil society* lainnya;
- e) Didasari oleh suatu asumsi teori maupun kajian terdahulu, sehingga terlihat jelas bentuk kegiatan tersebut apakah merupakan penguatan, uji eksperimen, dan pengembangan/ pembangunan teori baru;
- f) Meningkatkan reputasi dan citra akademik lembaga PPM dan UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta;
- g) Berpotensi menjadi karya akademik yang bisa diterbitkan dalam jurnal bereputasi; dan,
- h) Sangat baik jika berpotensi menghasilkan paten bagi kelompok pengusulnya.

3) Penetapan

Proses akhir dari proposal adalah penetapan. Mereka yang mendapatkan persetujuan dari reviewer adalah proposal yang memenuhi kriteria di atas. Sebelum ditetapkan, proposal dinilai terlebih dahulu menggunakan 3 kategori, yaitu:

- a) Proposal dengan review positif. Proposal ini bisa dilanjutkan ke tahap pelaksanaan saja.
- b) Proposal dengan perbaikan minor. Proposal ini layak dilanjutkan ke tahap persetujuan setelah diperbaiki, biasanya menyangkut unsur relasional antara program dengan agenda PPM;
- c) Proposal dengan perbaikan mayor. Proposal ini bisa dilanjutkan selama tim pengusul bisa melakukan perbaikan dengan cepat dan tepat waktu.
- d) Proposal yang langsung ditolak, karena tidak memiliki nilai-nilai pemberdayaan dan pengabdian yang diharapkan.

4) Pelaksanaan

Pelaksanaan PpMD ini berlangsung selama 10 bulan efektif sejak diumumkan ke publik (dosen) sampai kepada pengelolaan kegiatan dan pelaporan. Secara lebih rinci, kegiatan ini berlangsung sejak Bulan Maret – Desember 2016. Kegiatan PpMD dilaksanakan di beberapa desa.

Berbagai indikator desa yang menjadi sasaran dari program PpMD harus memiliki beberapa indikator berikut:

- a) Masyarakat memiliki kebutuhan untuk diintervensi dengan program tertentu, sehingga dengan intervensi tersebut

masyarakat akan mengalami transformasi sosial, budaya, ekonomi, dan sebagainya;

- b) Masyarakat memiliki kelemahan-kelemahan struktural seperti: akses kepada sumber-sumber kesejahteraan, lembaga-lembaga sosial ekonomi, peluruhan sosial, dan sebagainya;
- c) Masyarakat memiliki kriteria terisolir secara geografis, sosiologis, dan ekonomi, marginal secara sosial dan budaya, kurang terberdayakan secara politik dan ekonomi, mengalami problem akses kepada sumber-sumber kesejahteraan, serta terjadi kontestasi ruang yang mengancam tatanan sosial, budaya, dan bahkan agama masyarakat.

Indikator awal ini sangat dinamis. Artinya, selama memenuhi unsur akademik, sasaran dari PpMD bisa bertambah. Dalam rangka pencapaian visi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, maka dosen-dosen dan civitas akademika diharapkan memainkan perannya sebagai pensuplai solusi (bersifat ilmiah dan humanis), menginspirasi perubahan, dan menyebarkan virus positif, dari kampus ke masyarakat.

Prosesnya dilakukan dengan prosedur kerja sebagai berikut:

- a) Program pengabdian kepada masyarakat diawali dengan kunjungan ke masyarakat sasaran sesuai dengan kebutuhan program secara teoritis dan metodologis. Pada langkah ini dosen sebaiknya tidak langsung menetapkan permasalahan, kebutuhan, dan tantangan yang akan disolusi secara sepihak, akan tetapi hasil identifikasi harus dibicarakan dan didiskusikan terlebih dahulu bersama masyarakat dan mendengarkan serta menganalisis masukan-masukan yang diberikan. Dari masukan-

masukannya terkait dengan masalah yang teridentifikasi itulah ditetapkan prioritas masalah dan solusinya.

- b) Menetapkan solusi yang dapat dijelaskan secara ilmiah keterkaitannya dengan prioritas masalah yang disepakati bersama-sama masyarakat, atau melakukan identifikasi asset-aktor-agen dalam proses sosial-budaya masyarakat. Solusi tersebut dirancang dalam satu atau beberapa program dengan target menghasilkan wujud luaran program secara terencana dan terukur baik berupa jasa ataupun fisik material yang siap dimanfaatkan masyarakat. Rencana realisasi program dilengkapi dengan jadwal pelaksanaan, penanggung jawab, rincian anggaran, dan beberapa lampiran yang diperlukan.
 - c) Dengan jelasnya deskripsi program, sasaran, target, penanggung jawab, dan dana juga ditetapkan donator atau pendukung dana secara jelas.
 - d) Pelaksanaan kegiatan atau aksi-aksi intelektual dan humanis yang tercakup dalam program secara terkontrol dan terakah dengan adanya monitoring dan evaluasi oleh TIM yang ditunjuk Pusat Pengabdian Masyarakat (PPM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
 - e) Melaporkan hasil pelaksanaan program PpMD kepada PPM–UIN Syarif Hidayatullah Jakarta selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari setelah berakhirnya pelaksanaan program kegiatan.
- 5) Monev

Dalam pelaksanaannya, PPM membentuk Tim Monitoring kegiatan, yang bertugas melakukan tugas monitoring. Kualifikasi

Tim terdiri dari fungsional PPM, ahli yang memiliki pengalaman dan keahlian monitoring. Tim tersebut kemudian mendatangi lokasi PpMD pada jadwal yang ditentukan. Di lapangan kemudian Tim mengumpulkan data-data yang dibutuhkan. Monitoring bisa dilakukan jika indikatornya cukup. Indikator-indikator monitoring adalah proses kegiatan teknis administrasi; dan proses kegiatan substansi.

Sedangkan evaluasi adalah suatu upaya untuk melakukan analisis dan penilaian terhadap pelaksanaan suatu program berdasarkan pada informasi yang diperoleh dari hasil monitoring maupun dari sumber lain. Analisis didasarkan pada pertanyaan-pertanyaan berikut:

- a) Apakah program tersebut benar-benar diperlukan, atau perlu diperbaharui/ disempurnakan;
 - b) Bagaimanakah kegiatan tersebut dilaksanakan, dan apakah sudah sesuai dengan sasaran;
 - c) Apakah pelaksanaannya sesuai dengan perencanaan kegiatan, atau melenceng. Konteks sosial, budaya apakah yang bisa menjelaskan hal ini.
- 6) Pelaporan

Seluruh tahapan kegiatan PpMD dibuat dalam laporan akademik yang telah ditetapkan sistematikanya yang terdiri atas pendahuluan, metodologi, teori yang digunakan, gambaran demografi umum desa mitra, komunitas sasaran program, proses pengabdian kepada masyarakat, tahapan pengabdian, dinamika sosial, ekonomi dan budaya, partisipasi dan pelibatan para pihak, hasil PPM, kesimpulan, rekomendasi dan daftar pustaka.

b. KKN

Tahapan kegiatan KKN pada dasarnya dilakukan 3 tahap, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan dan evaluasi. Berikut beberapa tahapan KKN di UIN Jakarta.

1) Survei

Diskusi dengan anggota kelompok secara internal serta ketua kelompok dalam satu desa kapan melakukan survei. Kelompok yang berada dalam satu desa bisa melakukan survei pertama secara bersamaan. Kemudian pelacakan literatur tentang desa yang akan disurvei. Bila desa tersebut pernah menjadi desa lokasi KKN-PpMM tahun sebelumnya, maka bacalah buku laporan kelompok KKN-PpMM di desa tersebut atau hubungi salah satu anggotanya agar mendapatkan gambaran awal tentang desa dimaksud. Gunakan perambah elektronik internet/ mesin pencari untuk menelusuri peta desa, video, gambar jalan (street view), berita tentang desa, laporan penelitian, serta buku-buku terkait. Sejumlah data angka bisa diunduh dari web kantor BPS di setiap kabupaten/kota.

Kemudian membuat catatan ringkas hasil penelusuran di atas sebagai data awal untuk berdiskusi dengan anggota kelompok dan dosen pembimbing. Mendatangi PPM untuk meminta surat pengantar ke Desa dengan Lampiran Surat Rekomendasi Pelaksanaan KKN-PpMM 2016 dari Kesbangpol Kabupaten dan Lampiran Rekap Daftar Nama anggota kelompok. Bila Dosen Pembimbing sudah ditetapkan, meminta waktu untuk ketemu dan berdiskusi tentang apa saja yang harus dilakukan saat survei dan pembuatan program. Tawaran waktu agar selama survei

berlangsung Dosen Pembimbing bisa ikut serta dalam 1 (satu) kali survei. Dosen pembimbing mengurus persoalan administrasi survei ke PPM.

Semua kelengkapan dokumen sebelum survei perlu disiapkan. Mengunduh Form isian 1-3 untuk diisi pada saat survei. Setiap form yang ada bisa diisi selama proses persiapan KKN berlangsung. Semua isian form diisi dalam dokumen word dan akan menjadi data lampiran dalam Buku Laporan Hasil KKN-PpMM 2016.

Survei pertama dilakukan pada saat hari kerja, sehingga bisa bertemu dengan pihak aparatatur kecamatan dan desa serta bisa didapatkan informasi pembagian wilayah pengabdian setiap kelompok KKN di dalam satu desa. Tim pensurvei membawa alat tulis, perekam suara dan kamera untuk keperluan pencatatan dan dokumentasi selama survei dilakukan. Menemui aparat kecamatan atau desa adalah hal yang pertama kali harus dilakukan selama survei. Surat disampaikan kepada para pihak terkait dan didiskusikan apakah bisa bertemu langsung dengan Kepala Kecamatan (camat) atau Kepala Desa pada saat itu atau pada hari lain dengan kepastian janji waktu. Kemudian tanda terima penyampaian surat pengantar dari PPM agar menjadi bukti bahwa kelompok saudara sudah melakukan kunjungan dan menginformasikan rekomendasi Kesbangpol Kabupaten/ kota pada kecamatan dan desa.

Normatifnya yang menyebarkan surat rekomendasi dari Kesbangpol Kabupaten/ Kota ke kecamatan adalah Kesbangpol Kab/ Kota. Hanya saja menghindari terjadinya keterlambatan

penyampaian dan mis-komunikasi, maka penyampaian surat rekomendari pelaksanaan KKN-PpMM 2016 dilakukan oleh PPM melalui mahasiswa yang berada di lokasi tersebut. Bagi kelompok yang menjadi koordinator kecamatan, dapat menginisiasi audiensi dengan Pak Camat agar bisa melakukan kegiatan se-kecamatan. Serta bisa membantu program kecamatan apa saja yang bisa disinkronkan dengan kegiatan KKN di desa-desa di wilayah kecamatan tersebut.

Mewawancarai sejumlah warga untuk mendapatkan gambaran umum desa, dusun, kampung yang akan menjadi lokasi pengabdian. Wawancara bisa dilakukan secara bertahap mulai survei pertama kali hingga survei dan observasi lokasi berikutnya. Di antara mereka yang harus dimintai pandangannya adalah: tokoh masyarakat, aparat desa, ustadz/guru sekolah, pengelola majelis taklim, pemuda, petani, dll. Membuat peta lokasi desa/ kampung bila tempat yang akan menjadi lokasi pengabdian sudah ditunjuk oleh fakultas dan disepakati bersama kelompok KKN-PpMM. Peta lokasi yang dibuat seperti denah yang pernah disampaikan dalam Pembekalan KKN pada materi “Berubah untuk Aksi, Beraksi untuk Berubah”

Membuat Sejarah Desa dengan Mengacu pada Form yang telah disediakan. Data ini akan berguna untuk kepentingan desa atau kampung tersebut dan menjadi salah satu bahan dalam Buku Laporan Hasil KKN-PpMM 2016. Semua dokumen yang dihasilkan dari survei didiskusikan di kelompok KKN bersama dosen pembimbing untuk menentukan program dan kegiatan apa saja yang memungkinkan bisa dilakukan oleh kelompok KKN-

PpMM dan Program Pengabdian pada Masyarakat oleh Dosen (PpMD). Atas dasar dokumen ini pula dosen membuat proposal singkat untuk pencairan dana PpMD terintegrasi di Lokasi KKN.¹⁰

2) Pelaksanaan

Program kerja yang telah disusun, disiskusikan dengan aparat pemerintah dan tokoh masyarakat serta telah menjadi matriks program kerja KKN, selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan jadwal waktu yang telah direncanakan.

Pada tahap ini hal yang amat penting yang perlu diperhatikan adalah keterlibatan masyarakat agar bersama-sama mahasiswa melaksanakan program kerja KKN. Dalam rangka pelaksanaan program KKN maka pendekatan sosial kepada warga masyarakat harus dilakukan secara hati-hati dengan rasa kerendahan hati dan rasa kepercayaan pada sikap positif dan kemampuan warga masyarakat serta menghormati tradisi setempat.

Seluruh kegiatan pelaksanaan program yang telah direncanakan harus dicatat setiap hari pada buku tugas harian (BTH) mahasiswa sesuai dengan format yang ada. Kerajinan dan ketelitian mengisi agenda harian dan matriks pelaksanaan program kerja akan memudahkan dalam pembuatan laporan KKN, sebab keduanya merupakan sumber utamanya. Mengingat pentingnya kedua perangkat tersebut, maka setiap kali DPL mengadakan bimbingan di lokasi harus selalu memeriksanya. Disamping itu, berdasarkan kedua perangkat tersebut, DPL dapat memantau

¹⁰ Eva Nugraha, *Panduan Untuk Survei Lokasi Kkn-Ppmm 2016* (Jakarta : Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat Lp2m Uin Syarif Hidayatullah Jakarta) hlm. 1-2

hambatan dan kemajuan pelaksanaan program yang telah direncanakan.

3) Laporan

Terdapat dua laporan yang dibuat mahasiswa KKN, yaitu laporan individu dan laporan kelompok. Laporan individu terdiri dari laporan mingguan (1-2-3-4) dan laporan tugas harian. Mahasiswa KKN, bentuk dan formatnya telah ditentukan oleh panitia pelaksana KKN. Untuk laporan mingguan wajib diisi oleh masing-masing peserta sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh yang bersangkutan. Laporan mingguan dikumpulkan secara kolektif menurut kelompok yang bersangkutan. Laporan individual dibuat sebanyak 3 eksemplar dengan peruntukan DPL, ketua kelompok dan bagi yang bersangkutan.

Untuk laporan buku tugas harian mahasiswa KKN diisi oleh masing-masing mahasiswa sesuai dengan kegiatan yang dilakukan oleh peserta KKN yang bersangkutan. Laporan catatan harian diserahkan kepada DPL sebagai salah satu bahan penilaian untuk masing-masing peserta.

Sedangkan laporan kelompok merupakan laporan akhir kegiatan yang disusun secara kolektif yang mencakup berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan oleh peserta KKN di lokasi masing-masing. Laporan kelompok dibuat 3 eksemplar, yaitu untuk Pusat PPM, DPL dan lurah tempat KKN dilaksanakan.¹¹

H. Pengabdian kepada Masyarakat di UIN SGD Bandung

¹¹ Anonymous, *Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat*. (Jakarta: LP2M UIN Syahid, 2011) hlm. 49-51

1. Implementasi Pengabdian kepada Masyarakat di UIN SGD Bandung

Jika titik tolak implementasi PkM di UIN SGD dilihat sejak 5 (lima) tahun terakhir, maka pelaksanaan pengabdian diimplementasikan pada kegiatan KKM (Kuliah Kerjanya mahasiswa), Gema Ramadan di TVRI dan workshop. Sementara itu, jika dilihat dari alokasi anggaran PkM, maka anggaran PkM yang terbesar dialokasikan untuk kegiatan KKM. Hal ini ditunjukkan dengan sejumlah Rencana Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) yang disusun oleh Pusat Pengabdian selama lima tahun terakhir dimana komponen terbesar anggaran ada pada pelaksanaan KKM.

Tiga kegiatan yang diimplementasikan oleh Pusat Pengabdian kepada Masyarakat sejauh ini memang masih sangat minim. Minimnya variasi kegiatan pengabdian selama lima tahun tersebut bisa dimungkinkan oleh beberapa hal, pertama terbatasnya ketersediaan dana yang dialokasikan untuk pengabdian selain KKM. Kedua, variasi kegiatan pengabdian tidak terkonsentrasi dalam satu lembaga tempat pengabdian tersebut semestinya dikelola, dalam hal ini pusat pengabdian kepada masyarakat. Tetapi tersebar di fakultas dan prodi sehingga pelacakan variasi kegiatan pengabdian tidak bisa dilihat hanya pada pusat pengabdian melainkan juga harus dibaca pada data dan dokumen yang ada di fakultas dan prodi.

Ketiga, keterbatasan SDM. Sejak diberlakukan ortaker baru sesuai dengan PMA Nomor 78 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tatakerja UIN SGD Bandung, personil Pengabdian Masyarakat

yang jumlahnya sekitar 15 orang harus melebur dengan lembaga baru yang bernama LP2M dengan jumlah 3 orang. Dengan beban kerja yang cukup luas dan personil pengabdian yang jumlahnya 3 orang (LP2M terdiri dari ketua, sekretaris, Kapus Penelitian dan Penerbitan, Kapus PkM dan PSGA, 1 kasubag, dua staf pumk), semakin menambah berat merancang dan menginovasi program.

Namun demikian, sejak tahun 2016 telah disusun berbagai ragam dan variasi program yang sudah dicantumkan di dalam pedoman pengabdian kepada masyarakat di LP2M. Sedangkan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di luar LP2M dapat dilihat dari beragam kegiatan yang dilaporkan oleh dosen yang dicantumkan di dalam BKD-LKD yang dikompilasi oleh operator BKD-LKD di setiap fakultas yang dilaksanakan secara mandiri.

Secara institusional, Pusat Pengabdian kepada Masyarakat (Pusat PkM) melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 7 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja pada pasal 68 ayat (3) menyatakan bahwa “Pusat Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Jika dharma perguruan tinggi tentang pengabdian ini dilaksanakan, maka implementasi pengabdian itu secara sistemik mesti dilaksanakan sebagaimana dharma lainnya, yaitu pendidikan/pengajaran di Fakultas. Pelaksanaan pengabdian oleh para dosen mula-mula ditugasi oleh Pusat PkM. Kemudian dosen sebagai pengabdian menyusun rencana pengabdian, lokasi dan peserta/audien, bentuk dan model pengabdian serta evaluasi pengabdian. Semua itu

dilakukan setiap semester dengan jumlah bebas 1 SKS atau setara dengan 50 jam per semester. Laporan pengabdian dosen diserahkan ke Pusat PkM untuk kemudian diberikan surat keterangan bahwa dosen yang dimaksud telah melaksanakan kegiatan PkM.

Namun hal ini masih sulit dilakukan mengingat banyak dosen yang melaksanakan pengabdian secara mandiri dan baru memerlukan dokumen surat tugas dan keterangan telah melaksanakan pengabdian pada saat akhir semester untuk memenuhi tugas BKD dan LKD. Oleh karena itu, langkah-langkah koordinasi dan sosialisasi melalui wakil rektor dan wakil dekan bidang akademik merupakan agenda yang mendesak guna mewujudkan pelaksanaan kegiatan pengabdian secara sistemik yang setara proses dan mekanismenya dengan dharma pendidikan/pengajaran.

Kedepan, bisa dirumuskan pola dan ruanglingkup implementasi PkM secara hirarkis. Misalnya prodi memiliki kewajiban untuk melaksanakan pengabdian dengan para dosennya. Namun basis PkM yang dilaksanakan prodi mesti kegiatan yang benar-benar mengamalkan ilmu pengetahuan sesuai dengan keahlian masing-masing dosen. Sementara Pusat PkM melaksanakan pengabdian dengan isu-isu strategis yang melibatkan interdisiplin ilmu. Atau juga seperti di atas, pelaksanaan PkM tetap dikelola oleh Pusat PkM secara keseluruhan, tetapi dalam berbagai program pengabdian, dipilah berbagai kluster, misalnya ada program pengabdian yang berbasis keahlian dosen prodi dan ada juga yang lintas prodi.

Sedangkan program yang menangani pengabdian dosen kepada masyarakat yang prosesnya setiap pengusul mengajukan proposal pengabdian baru dilaksanakan tahun 2016.

2. Bentuk dan Model Implementasi PkM

Sebagaimana dikemukakan di atas, sejak 5 tahun terakhir ini pelaksanaan PkM di UIN SGD Bandung dilakukan dalam bentuk Kuliah Kerjanya Mahasiswa (KKM), Gema Ramadhan di TVRI dan Workshop. Berikut penjelasan bentuk dan model PkM. Sedangkan untuk tahun-tahun mendatang telah mengalami beberapa variasi program pengabdian kepada masyarakat.

a. KKM

Program pengabdian mahasiswa kepada masyarakat dilaksanakan dalam bentuk kuliah kerjanya mahasiswa (KKM). KKM merupakan bentuk tanggungjawab perguruan tinggi di dalam memberdayakan, mencerdaskan dan mensejahterakan masyarakat yang aktor atau pelakunya adalah mahasiswa dengan supervisi dosen selaku pembimbing.

Kuliah Kerjanya Mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung merupakan kegiatan akademik mahasiswa yang berlangsung melalui tahapan pembelajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat. Lebih jauh, KKM merupakan bagian dari pembelajaran dengan masyarakat (*learning with community*) sebagai bentuk pengamalan IPTEKS yang telah dipelajari oleh para mahasiswa selama perkuliahan di kampus. Karena itu, KKM harus berorientasi pada VISI UIN Bandung, yaitu “Menjadi Universitas Islam Negeri yang Unggul dan Kompetitif berbasis

Wahyu Memandu Ilmu dalam bingkai akhlak karimah di ASEAN Tahun 2025” dengan MISI:

- 1) Menyelenggarakan dan mengelola pendidikan tinggi yang profesional, akuntabel, dan berdaya saing di tingkat nasional dan ASEAN dalam rangka memperkuat pembangunan Nasional;
- 2) Menyelenggarakan proses pembelajaran, penelitian dan kajian ilmiah dengan bingkai akhlak karimah berbasis wahyu memandu ilmu untuk mengembangkan pengetahuan dan teknologi;
- 3) Menyelenggarakan pengabdian untuk mengembangkan dan memberdayakan masyarakat menuju tatanan masyarakat madani, demokratis dan berkeadilan.
- 4) Terselenggaranya Tri Darma Perguruan Tinggi yang berorientasi pada pembentukan jiwa *entrepreneurship* di kalangan sivitas akademika.

Sejalan dengan VISI dan MISI di atas, pelaksanaan KKM dimaksudkan agar mahasiswa belajar membantu dan mendampingi masyarakat secara profesional sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat, termasuk mengamalkan keilmuan yang telah dipelajari selama proses pembelajaran di kampus sesuai dengan program studi (Prodi) masing-masing. Diharapkan, dengan kehadiran mahasiswa di tengah-tengah masyarakat, problem dan kebutuhan nyata masyarakat secara perlahan dan berkelanjutan dapat diselesaikan.

- 1) Tujuan, Sasaran dan Manfaat
 - a) Tujuan

- (a) Meningkatkan pemahaman, pengamalan, pengembangan Islam, lembaga, pranata sosial Islam dan sarana keagamaan Islam, memperhatikan kearifan lokal, belajar memanfaatkan potensi dan sumberdaya daerah, yang memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat.
 - (b) Meningkatkan pengembangan IPTEKS, *Participation Action Research*, keterampilan memecahkan masalah berbasis kompetensi, terpadu, lintas sektoral, pragmatis dan interdisipliner atau mono disipliner, yang memenuhi kebutuhan dan memberdayakan masyarakat.
 - (c) Mendorong pengembangan dan pemberdayaan diri mahasiswa peserta KKM untuk berperan menjadi Motivator, Fasilitator, *Problem Solvers* dan Konsultan, yang profesional, akuntabel, berlandaskan kesadaran Pengabdian Kepada Masyarakat.
 - (d) Membantu penyelenggaraan program pemerintah dalam bidang keagamaan, kemasyarakatan, dan pembangunan, memberikan dukungan moral terhadap peningkatan IPM, menjalin kemitraan peningkatan akses, mutu, dan akuntabilitas penyelenggaraan KKM.
- b) Sasaran dan Manfaat
- (1) Meningkatnya nilai edukasi pengembangan pemahaman, pengamalan kelembagaan, pranata sosial dan sarana keagamaan Islam, kearifan lokal, pemanfaatan potensi dan sumberdaya daerah, yang signifikansinya diharapkan dan dibutuhkan masyarakat.

- (2) Meningkatnya pengembangan IPTEKS, *Participation Action Research*, keterampilan kemampuan pemecahan masalah berbasis kompetensi, terpadu, lintas sektoral, pragmatis dan interdisipliner, yang signifikan memberdayakan masyarakat.
- (3) Terdorongnya pengembangan dan pemberdayaan diri mahasiswa peserta KKM dalam perannya sebagai Motivator, Fasilitator, *Problem Solvers* dan Konsultan pembangunan daerah, yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dan kearifan lokal, profesional, akuntabel, dan berdaya saing, yang signifikan membuka kesadaran Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (4) Terjalinnnya kemitraan antara UIN Sunan Gunung Djati Bandung dengan pemerintah sesuai tingkatannya, masyarakat dan *stake holder* lainnya untuk peningkatan akses, mutu, dan akuntabilitas dalam pengembangan keagamaan, kemasyarakatan, dan peningkatan ketercapaian IPM melalui penyelenggaraan KKM.

Semua di atas itu, merupakan sebuah ikhtiyar dalam rangka mewujudkan tujuan UIN Sunan Gunung Djati Bandung, yaitu:

- 1) Terselenggaranya Pendidikan Tinggi yang profesional, akuntabel, dan berdaya saing di tingkat Nasional dan Internasional, yang dibutuhkan oleh masyarakat dan para pengguna jasa Pendidikan Tinggi;

- 2) Terwujudnya sivitas akademika yang berakhlak karimah dan menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan; dan
 - 3) Terbentuknya manusia terdidik (alumni) yang berakhlak karimah dan profesional dalam bidang ilmu keislaman dan umum, sesuai dengan kebutuhan pasar; dan mampu memanfaatkan keilmuan dan profesionalismenya untuk pengembangan masyarakat madani, demokratis, dan berkeadilan.
- c) Status dan Beban Kredit
- (a) Status. KKM merupakan bagian dari sistem akademik, berupa matakuliah yang dicantumkan dalam KRS dan wajib diikuti oleh mahasiswa program Strata Satu (S1) Semester VI dan atau VII yang telah memenuhi syarat yang ditetapkan.
 - (b) Beban Kredit. Beban kredit KKM adalah jumlah 2 SKS (Satuan Kredit Semester) sesuai dengan kurikulum yang wajib ditempuh mahasiswa angkatan bersangkutan.
- d) Bentuk KKM
- Bentuk kuliah kerja nyata yang dilaksanakan oleh mahasiswa adalah sebagai berikut:
- (1) KKM Reguler, yaitu kegiatan intrakulikuler terpadu Tri Dharma Perguruan Tinggi, wajib diikuti oleh mahasiswa yang dilaksanakan secara terjadwal dalam kalender akademik oleh Universitas, dilaksanakan oleh mahasiswa yang telah menempuh SKS 75% setara dengan semester VI dan atau VII;

- (2) KKM Mandiri, yaitu kegiatan intrakulikuler terpadu Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang lokasi dan bentuk kegiatannya diusulkan oleh mahasiswa dan atau sejumlah mahasiswa (12-15 orang) dilaksanakan oleh mahasiswa yang telah menempuh SKS 75% setara dengan semester VI dan atau VII;
 - (3) KKM Tematik, yaitu kegiatan intrakulikuler terpadu Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang dilaksanakan oleh Universitas bekerjasama dengan lembaga lain diluar Universitas dengan fokus Pengabdian sesuai dengan tema yang diberikan untuk menyelesaikan masalah sesuai dengan tema tersebut.
 - (4) KKM Kebangsaan, yaitu kegiatan intrakulikuler terpadu Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang dilaksanakan oleh Universitas bekerjasama dengan lembaga pertahanan Bangsa (TNI) dan lembaga lainnya yang sesuai.
 - (5) KKM Internasional, yaitu kegiatan intrakulikuler terpadu Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang dilaksanakan oleh Universitas bekerjasama dengan lembaga lain diluar Universitas yang berada di Luar Negeri;
- e) Ciri-Ciri KKM Reguler
- a) KKM Multi Disiplin Keilmuan Prodi
 - (a) Peserta terdiri dari berbagai latar belakang keilmuan prodi yang ada di UIN SGD dalam satuan kelompok.
 - (b) Program kegiatan KKM didasarkan secara tematis, melembaga, terpadu dan berbasis kompetensi oleh ma-

hasiswa, masyarakat, dan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL).

- (c) Program kegiatan mencerminkan kompleksitas permasalahan masyarakat dalam berbagai aspeknya secara lintas sektoral.
 - (d) Diselenggarakan selama 30 hari dilokasi yang telah ditentukan oleh LP2M;
 - (e) Berorientasi pada pengembangan Islam, IPTEKS, pemberdayaan masyarakat, mengedepankan kemitraan dengan pihak-pihak terkait yang dibenarkan menurut aturan.
 - (f) Laporan KKM disusun secara kelompok dan individu. Laporan kelompok dibuat dalam bentuk buku sebanyak 5 eksemplar dengan judul yang spesifik dan mencerminkan pemecahan masalah. Sedangkan laporan individu berisi mengenai program KKM dengan basis keilmuan prodi masing-masing. Secara lebih rinci akan diatur dalam buku Juknis KKM;
- (2) KKM Monodisiplin Keilmuan Prodi
- (a) Peserta berasal dari satu prodi tertentu (tidak bergabung dengan prodi lain) yang ada di UIN SGD dalam satuan kelompok.
 - (b) Program kegiatan di lapangan dirancang tematis, melembaga, terpadu dan berbasis kompetensi oleh mahasiswa, masyarakat, dan dosen pembimbing lapangan (DPL);

- (c) Program kegiatan mencerminkan kompleksitas permasalahan masyarakat dalam aspek yang menjadi kompetensi utama prodi.
 - (d) Diselenggarakan selama 30 hari dilokasi yang telah ditentukan oleh LP2M;
 - (e) Berorientasi pada pengembangan Islam, IPTEKS, pemberdayaan masyarakat, mengedepankan kemitraan dengan pihak-pihak terkait yang dibenarkan menurut aturan.
 - (f) Laporan KKM disusun secara kelompok yang berisi mengenai kegiatan KKM dengan basis keilmuan prodi. Laporan kelompok dibuat dalam bentuk buku sebanyak 5 eksemplar dengan judul yang spesifik dan mencerminkan pemecahan masalah. Secara lebih rinci akan diatur dalam buku Juknis KKM;
- (3) KKM Mandiri
- (a) Peserta adalah mahasiswa yang telah menempuh beban studi setara dengan 75 % SKS;
 - (b) Duduk pada semester VI dan atau VII
 - (c) Peserta baik individual maupun kelompok (12-15 orang) mengusulkan proposal KKM mengenai bentuk kegiatan KKM dan lokasinya kepada LP2M;
 - (d) LP2M memverifikasi usulan peserta;
 - (e) Proposal yang dinyatakan lulus dapat segera melaksanakan tahapan KKM berikutnya, yaitu ijin lokasi dan pelaksanaan kegiatan;
 - (f) LP2M melakukan monitoring;

- (g) Pelaksanaan KKM selama 30 hari;
 - (h) Waktu pelaksanaam KKM Mandiri setiap semester genap dan atau ganjil;
 - (i) Laporan kkm dibuat secara kelompok dan individual.
- (4) KKM Tematik
- (a) Peserta adalah mahasiswa yang telah menempuh beban studi setara dengan 75 % SKS;
 - (b) Duduk pada semester VI dan atau VII
 - (c) Peserta dikelompokkan sebanyak 12-15 orang dari berbagai prodi.
 - (d) Program kegiatan KKM melaksanakan peningkatan Indek Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Barat dalam bidang pendidikan, kesehatan dan daya beli;
 - (e) Pelaksanaan KKM selama 30 hari;
 - (f) Waktu pelaksanaan KKM diserahkan kepada penyelenggara, yang dalam hal ini Pemprov Jawa Barat;
 - (g) Laporan kkm dibuat secara kelompok.
- (5) KKM Kebangsaan
- (a) Peserta adalah mahasiswa yang telah menempuh beban studi setara dengan 75 % SKS;
 - (b) Duduk pada semester VI dan atau VII;
 - (c) Peserta mendaftar secara individual kepada penyelenggara KKM, dalam hal ini melalui kopassus TNI;
 - (d) Lulus mengikuti setiap tahap seleksi yang diselenggarakan oleh pihak penyelenggara;
 - (e) Pelaksanaan KKM mulai bulan Januari s.d. Mei.

(f) Laporan KKM dibuat secara individual.

(6) KKM Internasional

- (a) Peserta adalah mahasiswa yang telah menempuh beban studi setara dengan 75 % SKS;
- (b) Duduk pada semester VI dan atau VII;
- (c) Peserta mendaftar secara individual kepada LP2M;
- (d) Lulus mengikuti seleksi;
- (e) Kompeten dalam berbahasa asing (Arab-Inggris);
- (f) Lokasi KKM berada di wilayah Pattani-Thailand Selatan;
- (g) Waktu pelaksanaan setahun 2 kali yaitu bulan Mei-September dan Desember-April;
- (h) Laporan KKM dibuat secara individual.

f) Program Garapan

- (1) Program garapan umum berupa bidang keagamaan, kemasyarakatan, pengembangan IPTEKS dan pembangunan dengan indikator IPM. Program garapan umum dapat meliputi:
 - (a) Pemahaman, pengamalan dan pengembangan ke-Islaman;
 - (b) Peningkatan lembaga dan sarana keagamaan Islam;
 - (c) Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna;
 - (d) Pengembangan dan pemeliharaan lingkungan ekologis;

- (e) Bimbingan kemasyarakatan (konseling);
 - (f) Pemerintahan;
 - (g) Pemberdayaan ekonomi kerakyatan;
 - (h) Pendidikan karakter bangsa; dan
 - (i) Peningkatan pendidikan, kesehatan dan daya beli.
- (2) Program khusus (bagi kkm reguler, mandiri dan internasional) berbasis kompetensi berpulang pada latar belakang jurusan atau prodi masing-masing mahasiswa peserta KKM. Program berbasis kompetensi menjadi rujukan utama KKM, baik dengan model multidisiplin ilmu maupun dengan monodisiplin keilmuan. Kecuali jenis KKM yang basisnya tematik dan kebangsaan.
- g) Bentuk Kegiatan
- (1) KKM Reguler. Bentuk kegiatan KKM dengan jenis KKM Reguler adalah dengan menggunakan model monodisiplin dan multidisiplin dengan program garapan disesuaikan dengan mengacu pada program garapan umum.
 - (2) KKM Mandiri. Bentuk kegiatan KKM dengan jenis KKM mandiri adalah dengan menggunakan model monodisiplin dan multidisiplin dengan program garapan disesuaikan dengan mengacu pada program garapan umum.
 - (3) KKM Tematik. Bentuk kegiatan KKM dengan jenis KKM Tematik adalah dengan menggunakan model

monodisplin sesuai dengan tema yang diberikan pihak penyelenggara.

- (4) KKM Kebangsaan. Bentuk kegiatan KKM dengan jenis KKM Kebangsaan adalah dengan menggunakan model monodisiplin dan/ atau multidisiplin yang disesuaikan dengan tema yang diinginkan pihak penyelenggara.
- (5) KKM Internasional. Bentuk kegiatan KKM dengan jenis KKM Internasional adalah dengan menggunakan model monodisiplin dan/ atau multidisiplin yang disesuaikan dengan tema dan kebutuhan masyarakat sasaran.

h) Waktu Pelaksanaan

Kegiatan KKM reguler dilaksanakan pada bulan Februari atau bulan lain sesuai dengan kalender akademik selama 1 bulan. Sedangkan jenis kkm mandiri dilaksanakan satu bulan setiap semester genap dan ganjil, KKM kebangsaan pada bulan Januari s.d. Mei, KKM tematik pada bulan Mei selama satu bulan dan KKM internasional pada bulan Mei s.d. September dan Desember s.d. April.

i) Penyelenggara

- a) Penyelenggara KKM adalah sebagai berikut:
 - (a) Penyelenggara KKM Reguler adalah kepanitiaan yang dikoordinasi oleh Pusat Pengaduan kepada Masyarakat LP2M yang selanjutnya disebut Panitia Penyelenggara KKM (PP-KKM);
 - (b) Penyelenggara KKM mandiri adalah kepanitiaan yang dikoordinasi oleh Pusat Pengaduan kepada Masyarakat LP2M yang selanjutnya disebut Panitia

- Penyelenggara KKM (PP-KKM);
- (c) Penyelenggara KKM Tematik adalah Stakeholder baik Pemerintah (Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota) atau swasta dengan koordinasi Pusat Pengabdian kepada Masyarakat LP2M UIN SGD.
 - (d) Penyelenggara KKM Kebangsaan adalah Kementerian Pertahanan/ Tentara Republik Indonesia (TNI) dengan kordinasi Pusat Pengabdian kepada Masyarakat LP2M UIN SGD.
 - (e) Penyelenggara KKM Internasional adalah Konsulat Jenderal Republik Indonesia (konjen RI) di Thailandn bekerja sama dengan Badan Alumni Thailand dengan kordinasi Pusat Pengabdian kepada Masyarakat LP2M UIN SGD.
- b) Panitia Penyelenggara KKM Reguler terdiri atas:
- (a) Penanggung jawab umum yaitu Rektor UIN Bandung;
 - (b) Pengarah terdiri atas seorang Ketua, dua orang Sekretaris dan beberapa anggota; dan
 - (c) Pelaksana terdiri atas Penanggung jawab Harian, Ketua dan Wakil Ketua Pelaksana, Sekretaris, dan Anggota serta Pembimbing.
- c) Panitia Penyelenggara KKM Tematik, Kebangsaan dan Internasional diatur dalam Panduan dan Petunjuk Teknis

j) Ketentuan Peserta

(a) Syarat Peserta KKM Reguler adalah mahasiswa :

- (a) Telah menyelesaikan sekurang-kurangnya 75% dari seluruh SKS dalam kurikulum yang dibuktikan dengan transkrip nilai dengan seluruh SKS;
- (b) Tercatat sebagai mahasiswa pada semester berjalan yang dibuktikan dengan surat keterangan mahasiswa dan foto kopi bukti pembayaran kuliah;
- (c) telah menyelesaikan praktek Ibadah, Tilawah dan Tahfidz yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Fakultas; dan
- (d) Memenuhi ketentuan administrasi akademik yang dibuktikan dengan keterangan resmi dari Fakultas.

(b) Syarat Peserta KKM Mandiri adalah Mahasiswa:

- (a) Telah menyelesaikan sekurang-kurangnya 75% dari seluruh SKS dalam kurikulum yang dibuktikan dengan transkrip nilai dengan seluruh SKS;
- (b) Tercatat sebagai Mahasiswa pada semester berjalan yang dibuktikan dengan surat keterangan mahasiswa dan foto kopi bukti pembayaran kuliah;
- (c) Membuat proposal kegiatan KKM;
- (d) Telah menyelesaikan praktek ibadah, tilawah dan tahfidz yang dibuktikan dengan surat keterangan dari fakultas;
- (e) Memiliki pengalaman organisasi yang dibuktikan dengan sertifikat dan surat keterangan dari organisasi yang bersangkutan;

- (f) Memenuhi ketentuan administrasi akademik yang dibuktikan dengan keterangan resmi dari Fakultas;
 - (g) Lulus Seleksi proposal KKM yang diadakan oleh LP2M.
- (c) Syarat Peserta KKM Tematik adalah Mahasiswa :
- (a) Telah menyelesaikan sekurang-kurangnya 75% dari seluruh SKS dalam kurikulum yang dibuktikan dengan transkrip nilai dengan seluruh SKS;
 - (b) Tercatat sebagai mahasiswa pada semester berjalan yang dibuktikan dengan surat keterangan mahasiswa dan foto kopi bukti pembayaran kuliah;
 - (c) Telah menyelesaikan Praktek Ibadah, Tilawah dan Tahfidz yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Fakultas;
 - (d) Tercatat memiliki IPK tertinggi dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Prodi/ Jurusan;
 - (e) Memiliki Pengalaman Organisasi yang dibuktikan dengan sertifikat dan Surat Keterangan dari Organisasi yang bersangkutan;
 - (f) Memenuhi ketentuan administrasi akademik yang dibuktikan dengan keterangan resmi dari Fakultas;
dan
 - (g) Lulus seleksi yang diadakan oleh LP2M.
- (d) Syarat Peserta KKM Kebangsaan adalah Mahasiswa:
- (a) Telah menyelesaikan sekurang-kurangnya 75% dari seluruh SKS dalam kurikulum yang dibuktikan dengan transkrip nilai dengan seluruh SKS;

- (b) Tercatat sebagai Mahasiswa pada semester berjalan yang dibuktikan dengan surat keterangan mahasiswa dan foto kopi bukti pembayaran kuliah;
 - (c) Memiliki keterampilan berbahasa Asing yang dibuktikan dengan sertifikat;
 - (d) Telah menyelesaikan Praktek Ibadah, Tilawah dan Tahfidz yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Fakultas;
 - (e) Memiliki pengalaman organisasi yang dibuktikan dengan sertifikat dan Surat Keterangan dari organisasi yang bersangkutan;
 - (f) Memenuhi ketentuan administrasi akademik yang dibuktikan dengan keterangan resmi dari Fakultas;
 - (g) Memiliki IPK tertinggi yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Prodi/ Jurusan;
 - (h) Tidak memiliki riwayat penyakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang diketahui orang tua/ wali; dan
 - (i) Lulus seleksi yang diadakan oleh LP2M.
- (e) Syarat Peserta KKM Internasional adalah Mahasiswa:
- (a) Telah menyelesaikan sekurang-kurangnya 75% dari seluruh SKS dalam kurikulum yang dibuktikan dengan transkrip nilai dengan seluruh SKS;
 - (b) Tercatat sebagai Mahasiswa pada semester berjalan yang dibuktikan dengan surat keterangan mahasiswa dan foto kopi bukti pembayaran kuliah;

- (c) Memiliki keterampilan berbahasa asing yang dibuktikan dengan sertifikat;
- (d) Telah menyelesaikan praktek ibadah, tilawah dan tahfidz yang dibuktikan dengan surat keterangan dari fakultas;
- (e) Memiliki pengalaman organisasi yang dibuktikan dengan sertifikat dan surat keterangan dari organisasi yang bersangkutan;
- (f) Memenuhi ketentuan administrasi akademik yang dibuktikan dengan keterangan resmi dari Fakultas;
- (g) Memiliki IPK tertinggi yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Prodi/ Jurusan;
- (h) Tidak memiliki riwayat penyakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang diketahui orang tua/wali;
- (i) Memiliki Pasport; dan
- (j) Lulus Seleksi yang diadakan oleh LP2M.

Ketentuan seleksi (tes tulis dan wawancara) untuk KKM internasional diatur tersendiri dalam juknis yang dibuat oleh LP2M.

(f) Kewajiban Peserta:

- (a) Wajib mengikuti seluruh tahapan kegiatan KKM sesuai dengan materi dan jadwal kegiatan yang telah ditetapkan panitia. Jika berhalangan mengikuti satuan kegiatan KKM, peserta harus mengirimkan pemberitahuan tertulis yang disertai alasan kepada Ketua Kelompok Peserta (KKP) masing-masing;

- (b) Merencanakan, melaksanakan, dan menyusun laporan kegiatan lapangan KKM
- (c) Menyerahkan laporan kelompok dalam bentuk buku sebanyak 5 eksemplar kepada LP2M;
- (d) Menjaga ketertiban dan ketentraman serta menghargai norma, peraturan dan keyakinan yang hidup di masyarakat, serta menjaga nama baik Almamater;
- (e) Wajib mengisi angket evaluasi pada website www.lp2m.uinsgd.ac.id sebagai bahan evaluasi pencapaian keberhasilan pelaksanaan KKM; dan
- (f) Wajib memakai Jaket Almamater pada setiap acara kegiatan resmi.

k) Pembimbing

Pembimbing adalah dosen tetap UIN Bandung yang mengikuti open rekrutmen yang dilakukan oleh LP2M dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor sebagai pembimbing.

- (1) Kewajiban Pembimbing KKM Reguler, KKM Mandiri dan KKM Tematik adalah:
 - (a) Mengikuti pertemuan pembimbing untuk informasi panduan bimbingan yang diselenggarakan PP-KKM;
 - (b) Melaksanakan kegiatan orientasi lokasi yaitu pengumpulan data mengenai kondisi objektif masyarakat dan konsultasi kepada aparat Desa/Kelurahan setempat mengenai penempatan peserta sebelum pelaksanaan KKM;

- (c) Menjadi narasumber pada kegiatan Diklat/Pembekalan peserta bimbingan;
 - (d) Menghadiri upacara pelepasan dan pemberangkatan;
 - (e) Mendampingi perjalanan peserta menuju lokasi dan melaksanakan acara penyerahan peserta di tingkat kecamatan;
 - (f) Melaksanakan pendampingan secara akademik selama pelaksanaan Penyusunan Program (Lokakarya I), Evaluasi Program (Lokakarya II), dan Bimbingan Kegiatan Langsung (BKL) di lokasi;
 - (g) Menjemput dan melaksanakan acara pamitan pemulangan peserta di tingkat Kecamatan;
 - (h) Wajib mengisi angket pada website <http://lp2m.uinsgd.ac.id> sebagai bahan evaluasi pencapaian program kuliah kerjanya mahasiswa;
 - (i) Menetapkan nilai prestasi peserta KKM.
- (2) Kewajiban Pembimbing KKM Kebangsaan dan Internasional:
- (a) Mengikuti pertemuan pembimbing untuk informasi panduan bimbingan yang diselenggarakan PP-KKM;
 - (b) Menghadiri upacara pelepasan dan pemberangkatan;
 - (c) Mendampingi perjalanan peserta menuju lokasi dan melaksanakan penyerahan peserta;
 - (d) Melaksanakan monitoring saat pelaksanaan KKM;
 - (e) Menjemput dan melaksanakan acara penarikan peserta di lokasi;
 - (f) Mengisi angket pada website <http://lp2m.uinsgd.ac.id>

sebagai bahan evaluasi pencapaian program kuliah kerjanya mahasiswa;

(g) Menetapkan nilai prestasi peserta KKM.

b. Gema Ramadhan TVRI

Kegiatan ini berupa pemberian ceramah menjelang magrib di TVRI Jabar selama 45 menit dimulai pukul 17.00 WIB dan berakhir pukul 17.45 WIB (3 menit sebelum adan magrib). Narasumber kegiatan ini adalah para dosen dengan kepakaran tertentu. Kegiatan Gema Ramadhan ditayangkan secara live dan mendapat respon baik dari masyarakat yang menyaksikan tayangan ini.

Kegiatan Gema Ramadhan TVRI sudah berlangsung sejak tahun 2006 s.d sekarang dan akan dilakukan perbaikan penyiaran dengan TV nasional melalui format kultum (kuliah tujuh menit) pada tahun-tahun mendatang.

c. Workshop

Berbagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat sejak tahun 2012-2016 dapat dilihat dalam tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2
Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat

No	Tahun	Jenis Kegiatan	Keterangan
1	2013	1. KKM 2. Gema Ramadhan (di TVRI)	

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Workshop <ol style="list-style-type: none"> a. Peran ulama dan umara dalam membangun kesejahteraan umat b. Pemberdayaan pedagang kaki lima (PKL) kampus lingkungan UIN SGD c. Peran Negara dalam Membendung Arus Ideologi Radikal d. Manajemen Majelis Taklim Kampus Lingkungan e. Pembuatan materi keagamaan berbasis ekonomi sosial budaya f. Wanita dan politik 	
2	2014	<ol style="list-style-type: none"> 1. KKM 2. Gema Ramadhan (di TVRI) 3. Workshop <ol style="list-style-type: none"> a. Perumusan Silabus Materi Ceramah Majelis Ta'lim b. Silaturahmi Tokoh dan Masyarakat c. Etika Mahasiswa di Masyarakat Bagi pemilik Kontrakan di Lingkungan Kampus d. Manajemen Masjid e. Manajemen Majelis Taklim Kampus Lingkungan f. Materi Khutbah Kearifan Lokal g. Model PBM Melek Aksara Al-Quran h. Tahyiz Jenazah i. Kesetaraan Gender dalam Membangun Ketahanan Keluarga 	
3	2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. KKM 2. Gema Ramadhan (di TVRI) 3. Workshop 	

		<ul style="list-style-type: none"> a. Ekonomi Syariah PKL Kampus Lingkungan b. Kesehatan Lingkungan Kampus c. Desa Binaan Berbasis Pengabdian Masyarakat d. Produk Unggulan Desa Binaan e. Penguatan ketahanan Keluarga f. Penguatan IPM 	
--	--	--	--

Sumber : Diolah dari data kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Selain kegiatan di atas, pada tahun 2016 telah dilakukan bentuk pengabdian dosen kepada masyarakat dengan mengusung tema “Pemberdayaan Lembaga Keagamaan dan Sosial”. Kegiatan ini diusulkan oleh para dosen dengan menyertakan mahasiswa untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat dalam beragam bentuk, yaitu pembelajaran masyarakat, pendampingan masyarakat, advokasi, pemberdayaan ekonomi, layanan masyarakat dan ujicoba, adaptasi serta penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG).

Tujuan pengabdian ini adalah mengamalkan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang diperoleh dari pembelajaran dan penelitian di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dalam rangka mewujudkan pemberdayaan dan kesejahteraan serta pengembangan masyarakat, kehidupan demokratis dan keadilan sosial bagi kehidupan bangsa, memperkuat dan meningkatkan kompetensi dosen serta produktivitas pengabdian berbasis riset, meningkatkan kesempatan dosen dan mahasiswa untuk bekerjasama dengan lembaga-lembaga

mitra baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional yang mempunyai *concern* di bidang pemberdayaan masyarakat dan melahirkan ilmuwan di kalangan dosen dan mahasiswa yang memiliki keahlian otoritatif dan implementatif pada bidang tertentu.¹²

Teknis pelaksanaan kegiatan PkM dosen ini dilakukan dengan mengusulkan proposal pengabdian. Kegiatan PkM diusulkan oleh dosen UIN SGD secara berkelompok dengan jumlah tim pelaksana maksimal 2 orang dan dapat melibatkan mahasiswa. Setiap dosen diperbolehkan mengajukan lebih dari satu proposal pengabdian, baik sebagai ketua atau anggota dan ketua dan/atau anggota pengabdian minimal berpendidikan S2, Lektor, dan tidak sedang melanjutkan studi (tugas belajar).

Sedangkan untuk tahun 2017, perencanaan pengabdian dosen kepada masyarakat dibuat dengan beberapa variasi. Variasi ini pada dasarnya untuk memudahkan para dosen dan juga mahasiswa memilih topik yang sesuai dengan bidang keilmuannya. Setidaknya terdapat empat variasi bentuk pengabdian dosen kepada masyarakat, yaitu:

1. Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) berbasis Hasil Riset

Kegiatan ini didasari dengan pemikiran bahwa tridarma Perguruan Tinggi (PT) yang mencakup pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (PkM) harus diupayakan secara sinergis dan sistemik melalui berbagai kegiatan yang direncanakan serta berkelanjutan. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan

¹² Anonimous, Petunjuk Teknis Pengabdian Dosen kepada Masyarakat. (Bandung: LP2M, 2016). Hlm 2-3

kualitas pendidikan di PT, yang pada akhirnya dapat memberi kemanfaatan bagi kemajuan dan kualitas hidup masyarakat. Penelitian bertujuan untuk pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan dan pembelajaran. Selanjutnya, hasil penelitian tersebut perlu disosialisasikan melalui kegiatan PkM.

Guna mewujudkan cita-cita di atas, salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah melaksanakan PkM berbasis hasil riset. Kegiatan PkM ini merupakan kegiatan penerapan hasil-hasil penelitian, penciptaan teknologi tepat guna (TTG), dan penerapan suatu model baik media pembelajaran yang inovatif atau model lainnya sesuai dengan bidang ilmu setiap prodi. Dengan cara demikian kegiatan PkM tidak hanya bersifat coba-coba, akan tetapi merupakan kegiatan yang sudah teruji dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan kemanfaatannya dapat dinikmati oleh masyarakat sebagai mitra.¹³

Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan kebijakan PkM yang sistematis guna meningkatkan mutu pelaksanaan PkM. Hal tersebut diharapkan secara simultan dapat memacu peningkatan produktivitas dosen di dalam menghasilkan karya penelitian yang layak di-PkM-kan dan hasil PkM yang bermanfaat bagi kemajuan keilmuan.

Tujuan dari pengabdian kepada masyarakat berbasis riset ialah:

¹³ Sesuai dengan butir mutu dalam standar nasional pengabdian kepada masyarakat (Permenristekdikti No 44 Tahun 2015) bagian standar hasil pada point a bahwa hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna.

- a. Meningkatkan semangat dosen UIN SGD untuk melaksanakan kegiatan PkM berdasarkan bidang keahliannya;
- b. Mendorong dosen UIN SGD untuk melakukan penelitian yang layak di-PkM-kan;
- c. Meningkatkan kemampuan dosen untuk menciptakan model, teknologi tepat guna yang dibutuhkan oleh masyarakat;
- d. Mensinergikan kegiatan penelitian dan PkM para dosen UIN SGD.

2. Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Berbasis Pengembangan Desa Mitra Kampus

Program Pengabdian kepada Masyarakat berbasis Pengembangan Desa Mitra Kampus merupakan salah satu program pengabdian kepada masyarakat yang dikembangkan Pusat Pengabdian kepada Masyarakat. Program ini memfasilitasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen di UIN SGD dalam bentuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung sebagai perguruan tinggi mempunyai potensi besar dalam bentuk sumber daya manusia untuk ikut berperan dalam pembangunan desa. Salah satu peran yang dilakukan oleh UIN SGD adalah memfasilitasi program-program pengabdian kepada masyarakat yang dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat yang diharapkan mampu mendorong kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Program ini dimaksudkan untuk membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat yang bersifat komprehensif, multi sektoral, yang mampu menuntun masyarakat

desa kearah kehidupan yang lebih sejahtera, mewujudkan masyarakat yang dinamis, membantu dan meningkatkan kondisi sosial ekonomi warga dan mempermudah akses warga terhadap informasi dan ilmu pengetahuan.

Kegiatan Pengembangan Desa Mitra Kampus dilaksanakan dalam bentuk jaringan kerjasama yang sinergis antara berbagai pemangku kepentingan dan berorientasi pada kemandirian masyarakat. Adapun sasaran dari program ini adalah masyarakat luas dapat berupa kelompok masyarakat, komunitas maupun lembaga yang berada di pedesaan.

Tujuan program pengabdian kepada masyarakat berbasis desa mitra kampus ialah memberdayakan masyarakat dalam mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat berbasis pada optimalisasi potensi masyarakat agar mampu mendayagunakan dan mengoptimalkan potensi sumber daya yang ada.

Kriteria Desa Mitra Kampus adalah desa-desa yang diprioriaskan berada di Jawa Barat dan diutamakan desa-desa yang kabupaten/kotanya telah melakukan MoU dengan UIN SGD. Desa mitra tersebut terutama yang masih terisolir, marginal, kurang terberdayakan, mengalami problem akses, budaya, dan agama. Selain hal tersebut, PkM berbasis Pengembangan Desa Mitra dijalin setelah adanya kerjasama/ MoU antara UIN dengan pemerintah baik provinsi atau kabupaten/ kota.

3. Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Lokasi KKM

Program PkM berbasis lokasi KKM dilaksanakan oleh dosen terintegrasi dengan kegiatan Kuliah Kerja nyata Mahasiswa

(KKM). KKM merupakan kegiatan lapangan bagi mahasiswa yang menempuh bagian akhir dari program pendidikan S-1. Program ini bagi mahasiswa setara dengan 2 sks dan bersifat wajib bagi semua mahasiswa. Karena program ini mampu mendorong empati mahasiswa, dan dapat memberikan sumbangsih bagi penyelesaian persoalan yang ada di masyarakat. Kegiatan KKM menjadi bentuk nyata kontribusi universitas bagi masyarakat, industri, pemerintah daerah dan kelompok masyarakat yang ingin mandiri. Program KKM mensyaratkan dosen pembimbing lapangan (DPL) dan mahasiswa berperan aktif dalam mengetahui permasalahan yang ada, bahkan sebelum mereka terjun selama 1 hingga 2 bulan ditengah-tengah masyarakat. Konsep “*working with community*” telah menggantikan konsep “*working for the community*”.

Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) berbasis lokasi KKM merupakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terintegrasi dengan pendidikan dan penelitian. Orientasi kegiatan ini untuk mengubah pelaksanaan program KKM dari paradigma pembangunan (*development*) menjadi paradigma pemberdayaan (*empowerment*), sehingga KKM di Perguruan Tinggi dalam pelaksanaannya dapat menjadi *tools* solusi penanganan masalah pembangunan di Indonesia yang tema-tema solusinya dapat bermitra dengan pemerintah dan dunia usaha.

Dosen dan Mahasiswa dapat merencanakan dan melaksanakan bentuk PkM di lokasi KKM serta dibolehkan mencari pendanaan bagi kegiatan PkM tersebut. Dosen sebagai pembimbing dapat memperoleh bobot SKS sebagai pengabdian

apabila dosen selaku DPL bersama-sama mahasiswa melaksanakan salah satu bentuk PkM sebagaimana di ataur dalam Bab II.

Tujuan program ini adalah memberdayakan masyarakat di lokasi KKM dalam mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat berbasis pada optimalisasi potensi masyarakat agar mampu mendayagunakan dan mengoptimalkan potensi sumber daya yang ada.

4. Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Lingkungan Kampus

UIN SGD Bandung secara geografis berada di kawasan Bandung Timur. Kurang lebih ada sekitar 5 kecamatan yang tergabung dalam kawasan tersebut, yaitu Cibiru, Panyileukan, Ujung Berung, Gede Bage dan Cinambo.

Sebagai sebuah perguruan tinggi, UIN SGD memiliki tanggungjawab untuk membangun masyarakat disekitar kampus dengan potensi SDM yang dimilikinya dalam program pengabdian kepada masyarakat. Adagium bahwa perguruan tinggi sebagai menara gading di tengah komunitas masyarakat yang mengitarinya harus dijawab oleh UIN SGD.

Atas dasar itu, UIN SGD berkomitmen untuk berperan aktif dalam pembangunan SDM bagi masyarakat yang berada di sekitar kampus agar mereka berubah menjadi masyarakat yang mandiri, sejahtera dan cerdas.

Tujuan program ini ialah memberdayakan masyarakat dalam mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat berbasis pada optimalisasi potensi masyarakat agar mampu

mendayagunakan dan mengoptimalkan potensi sumber daya yang ada.

Beragam bentuk kegiatan pengabdian di UIN SGD Bandung pada tahun 2016 belum banyak berubah dengan tahun-tahun sebelumnya. Sebagaimana terlihat dalam RKAKL Tahun 2016 kegiatan pengabdian di UIN SGD Bandung belum variatif yang dicantumkan dalam tabel 3.

Tabel 3

Rincian Program Pengabdian Kepada Masyarakat
Pusat Pengabdian kepada Masyarakat LP2M UIN SGD Bandung

No	Jenis Kegiatan
1	Workshop desain pengabdian dosen kepada masyarakat
2	workshop kampus asri dan religius
3	worshop da'i kerukunan
4	worshop kader pencegah terorisme
5	worshop kader pencegah terorisme
6	KKN
7	Lokakarya Evaluasi KKN
8	Studi Banding
9	Pengabdian berbasis hasil riset
10	Seminar Hasil Pengabdian berbasis hasil riset

Sumber: RKAKL Pusat Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2016

Berbeda dengan tahun 2016, pada tahun 2017 program Pengabdian kepada Masyarakat yang diusulkan kepada bagian Perencanaan UIN SGD Bandung sangat berbeda dengan tahun 2016. Kegiatan pengabdian lebih variatif sebagaimana terlihat dalam tabel 4.

Tabel 4

Rincian Program Pengabdian Kepada Masyarakat UIN SGD Bandung

No	Jenis Kegiatan
1	Pengabdian berbasis hasil riset
2	Pengabdian berbasis desa mitra kampus
3	Pengabdian berbasis Lingkungan Kampus
4	Pengabdian berbasis Lokasi KKN
5	Workshop Pengabdian kepada Masyarakat
6	Pelatihan Metode PkM bagi Dosen
7	Penyusunan Ringkasan Eksekutif PkM Dosen
8	Seminar ekspose hasil PkM Dosen
9	Penyusunan Jurnal PkM
10	Workshop Penulisan Artikel Jurnal PkM
11	Penyiaran Dakwah Islam melalui TV
12	KKN Reguler I (Januari-Februari)
13	KKN Reguler II (Juli-Agustus)
14	Lokakarya Evaluasi KKN

15	Penyusunan eksekutif summary hasil KKN
16	Publikasi Hasil Eksekutif Summary

Sumber: RKAKL Pusat Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2017

Variasi program pengabdian yang dirancang untuk tahun 2017 di UIN SGD Bandung dirasakan masih belum memiliki distingsi yang jelas. Namun demikian, dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya arah dan pergeseran program pengabdian ke depan sangat beda dengan program pengabdian sebelumnya yang terlihat belum variatif. Penyiaran dakwah Islam dalam bentuk kultum menjelang buka puasa bersama yang ditayangkan di TVRI dan akan beranjak ke stasiun TV nasional merupakan bentuk pengabdian yang belum dimiliki oleh PTKIN lain. Sebanyak 16 program untuk tahun 2017, Pusat PKM LP2M UIN Bandung mengalokasikan dana sekitar Rp. 4.570.000.000 (empat milyar lima ratus tujuh puluh juta).

3. Metode PkM di UIN SGD Bandung

Secara umum, di UIN SGD Bandung setidaknya terdapat dua kegiatan besar PkM yang diselenggarakan oleh Pusat PkM jika dilihat dari pelaku atau pelaksana pengabdian, yaitu pengabdian mahasiswa kepada masyarakat dalam kegiatan KKN dan pengabdian dosen kepada masyarakat dalam bentuk pendampingan, pembelajaran, advokasi, pelayanan, penerapan teknologi tepat guna dan sebagainya. Guna melaksanakan kegiatan tersebut, dilakukan berbagai metode yang dalam hal ini metode

lebih diartikan sebagai tahapan penyelenggaraan. Oleh karenanya, penjelasan mengenai tahapan pengabdian oleh dosen dan KKN mahasiswa secara garis besar dimulai dari persiapan, pelaksanaan dan evaluasi.

a. KKN¹⁴

1) KKM Reguler

a) Tahap persiapan

(1) Inventarisasi dan Survei

(a) Inventarisasi basis data (*data base*) calon peserta KKM sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan, penetapan dan proyeksi kelompok peserta, dan lokasi; dan

(b) Inventarisasi data sosial masyarakat lokasi KKM.

(2) Konsultasi dan Perizinan

(a) Konsultasi dan pengurusan surat permohonan perizinan penyelenggaraan KKM kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat c.q Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Jawa Barat;

(b) Konsultasi dan pengurusan perizinan kepada Pemerintah Kota/Kabupaten c.q Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota/Kabupaten oleh PP-KKM;

(c) Konsultasi dan pengiriman tembusan perizinan penyelenggaraan KKM kepada Kecamatan; dan

¹⁴ Anonimous, *Panduan KKN UIN SGD Bandung*. (Bandung: Pusat pengabdian LP2M,2016). Hlm 5-9

- (d) Konsultasi dan konfirmasi lokasi kepada Kepala Desa/Kelurahan.
- (e) Pembekalan Peserta oleh LP2M.
- b) Tahap Pelaksanaan
 - (1) Pelaksanaan KKM di lapangan dimulai sejak serah terima di kecamatan/desa;
 - (2) Waktu pelaksanaan selama 1 (satu) bulan;
 - (3) Selama kegiatan KKM berlangsung, diadakan lokakarya tahap I berupa perencanaan program yang waktunya dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah berada di lokasi KKM dan lokakarya tahap II yang berisi evaluasi program yang dilaksanakan 3 hari sebelum ke pulangan;
 - (4) Selama pelaksanaan KKM, LP2M melakukan monitoring;
- c) Tahap Pelaporan/Evaluasi
 - (1) Peserta kelompok melaporkan hasil kegiatan KKM dalam bentuk buku sebanyak 5 (lima) eksemplar dengan judul yang spesifik dan mencerminkan pemecahan masalah. Buku tersebut ditulis oleh peserta KKM secara berkelompok dan dosen pembimbing sebagai editor. Buku tersebut merupakan hasil karya pengabdian mahasiswa dan dosen;
 - (2) Setiap peserta KKM melakukan *feed back* sebagai evaluasi KKM dalam bentuk pengisian *questioner* yang telah disiapkan dalam web LP2M yang dapat

diunduh dalam handphone android;

(3) LP2M menyelenggarakan lokakarya evaluasi KKM;

2) KKM Mandiri

a) Tahap Persiapan

(1) Inventarisasi dan survey

(1) Mahasiswa sebagai calon Peserta KKM melakukan inventarisasi masalah di bakal lokasi KKM;

(2) Menyusun proposal berdasarkan hasil inventarisasi dan survey;

(2) Seminar proposal

(a) Proposal kkm diseminarkan oleh pembahas di LP2M;

(b) Proposal yang dinyatakan lolos dapat melanjutkan ke tahap berikutnya berupa kegiatan ijin lokasi kkm;

(c) Proposal yang dinyatakan tidak lolos melakukan perbaikan terlebih dahulu dan jika memungkinkan dilakukan perubahan lokasi dan bentuk kegiatan KKM;

b) Tahap Pelaksanaan

(a) Pelaksanaan KKM di lapangan dimulai sejak serah terima di kecamatan/desa;

(b) Waktu pelaksanaan selama 1 (satu) bulan;

(c) Selama kegiatan KKM berlangsung, diadakan lokakarya tahap I berupa perencanaan program yang waktunya dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah berada di

lokasi KKM dan lokakarya tahap II yang berisi evaluasi program yang dilaksanakan 3 hari sebelum ke pulangan;

(d) Selama pelaksanaan KKM, LP2M melakukan monitoring.

c) Tahap Pelaporan/Evaluasi

(1) Peserta KKM mandiri baik kelompok maupun individual melaporkan hasil kegiatan KKM dalam bentuk buku sebanyak 5 (lima) eksemplar dengan judul yang spesifik dan mencerminkan pemecahan masalah. Buku tersebut ditulis oleh peserta KKM secara berkelompok dan dosen pembimbing sebagai editor. Buku tersebut merupakan hasil karya pengabdian mahasiswa dan dosen;

(2) Setiap peserta KKM melakukan *feed back* sebagai evaluasi KKM dalam bentuk pengisian *questioner* yang telah disiapkan dalam web LP2M yang dapat diunduh dalam handphone android;

(3) LP2M menyelenggarakan lokakarya evaluasi KKM;

3) KKM Tematik

a) Tahap persiapan

(1) Inventarisasi dan Survei

(a) Inventarisasi basis data (*data base*) calon peserta KKM sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan, penetapan dan proyeksi kelompok peserta dan lokasi;

(b) Permasalahan yang diinventarisasi dan survei

adalah permasalahan yang sesuai dengan tema KKM yang diberikan;

- (c) *Data base* peserta KKM tematik berupa berkas-berkas persyaratan peserta KKM tematik;
- (d) Seleksi oleh LP2M; dan
- (e) Konsultasi dan pengurusan surat permohonan perizinan penyelenggaraan KKM kepada Pihak terkait (Pemerintahan dan aparat keamanan) oleh LP2M dan Pihak penyelenggara KKM Tematik;
- (f) Pembekalan Peserta oleh penyelenggara dan LP2M.

b) Tahap Pelaksanaan

- (1) Pelaksanaan KKM tematik di lapangan dimulai sejak serah terima di kecamatan/desa;
- (2) Waktu pelaksanaan KKM tematik selama 1 (satu) bulan;
- (3) Selama pelaksanaan KKM, LP2M melakukan monitoring.

c) Tahap Pelaporan/Evaluasi

- (1) Peserta KKM tematik baik kelompok maupun individual melaporkan hasil kegiatan KKM dalam bentuk buku sebanyak 5 (lima) eksemplar dengan judul yang spesifik dan mencerminkan pemecahan masalah. Buku tersebut ditulis oleh peserta KKM secara berkelompok dan dosen pembimbing sebagai editor. Buku tersebut merupakan hasil karya pengabdian mahasiswa dan dosen;

- (2) Setiap peserta KKM melakukan *feed back* sebagai evaluasi KKM dalam bentuk pengisian *questioner* yang telah disiapkan dalam web LP2M yang dapat diunduh dalam handphone android;
 - (3) LP2M menyelenggarakan lokakarya evaluasi KKM;
- 4) KKM Kebangsaan
- a) Tahap persiapan
 - (1) Peserta mendaftarkan diri ke pihak penyelenggara dalam hal ini Kopassus TNI ;
 - (2) Peserta melapor ke LP2M dan membawa surat rekomendasi;
 - (3) Mengikuti seleksi administrasi sesuai dengan ketentuan penyelenggara;
 - (4) Lulus seleksi administrasi dari pihak penyelenggara.
 - b) Tahap Pelaksanaan
 - (1) Pelaksanaan KKM kebangsaan di lapangan dimulai sejak peserta berada di lokasi;
 - (2) Waktu pelaksanaan KKM kebangsaan selama 4-5 bulan;
 - (3) Selama pelaksanaan KKM, LP2M melakukan monitoring.
 - c) Tahap Pelaporan/Evaluasi
 - (1) Peserta KKM kebangsaan melaporkan hasil kegiatan KKM dalam bentuk buku sebanyak 5 (lima) eksemplar dengan judul yang spesifik dan mencerminkan pemecahan masalah.
 - (2) Setiap peserta KKM melakukan *feed back* sebagai

evaluasi KKM dalam bentuk pengisian *questioner* yang telah disiapkan dalam web LP2M yang dapat diunduh dalam handphone android;

(3) LP2M menyelenggarakan lokakarya evaluasi KKM;

5) KKM Internasional

a) Tahap persiapan

(1) Peserta mendaftarkan diri melalui LP2M;

(2) LP2M melakukan seleksi kompetensi calon peserta, diutamakan peserta yang mahir berbahasa asing (bahasa Arab dan Inggris)

(3) Peserta yang dinyatakan lolos mengikuti pembekalan KKM internasional.

b) Tahap Pelaksanaan

(1) Pelaksanaan KKM internasional di lapangan dimulai sejak peserta berada di lokasi;

(2) Waktu pelaksanaan KKM internasional selama 4-5 bulan;

(3) Selama pelaksanaan KKM, LP2M melakukan monitoring.

c) Tahap Pelaporan/Evaluasi

(1) Peserta KKM internasional melaporkan hasil kegiatan KKM dalam bentuk buku sebanyak 5 (lima) eksemplar dengan judul yang spesifik dan mencerminkan pemecahan masalah.

(2) Setiap peserta KKM melakukan *feed back* sebagai evaluasi KKM dalam bentuk pengisian *questioner* yang telah disiapkan dalam web LP2M yang dapat diunduh

dalam handphone android;

(3) LP2M menyelenggarakan lokakarya evaluasi KKM;

Berdasarkan uraian di atas, ada beberapa hal yang nampaknya perlu ada perubahan di dalam perencanaan dan pelaksanaan KKM, yaitu:

1. Waktu. Kegiatan KKM seyogiannya dilakukan pada semester VI menuju ke VII atau bulan Juli s.d. Agustus. Hal ini dimaksudkan agar masa studi mahasiswa dapat tercapai lebih cepat. Pada fakultas tertentu, matakuliah yang disajikan pada semester VII tinggal sedikit sehingga memungkinkan para mahasiswa pada bulan februari sudah ada yang bisa melaksanakan sidang munaqasah atau pada bulan April. Berbagai kendala ditemukan bahwa waktu KKM pada bulan Januari s.d. Februari ketersediaan anggaran negara belum bisa direalisasikan. Oleh karena itu perlu ada dana talangan kegiatan tersebut. Selain itu, mahasiswa yang akan sidang terkendala dengan kegiatan KKM karena mereka harus menyelesaikan penelitian skripsinya, padahal mereka sedang KKM sehingga mengganggu proses penelitian mereka;
2. Mahasiswa. Kegiatan KKM yang dipersyaratkan bagi mahasiswa semester VII dan telah selesai menempuh 75% SKS tidak efektif dari segi ketepatan dan kecepatan lulusan sebagaimana diuraikan pada poin 1 di atas;
3. Lokasi KKM. Sejauh ini, lokasi KKM selalu berpindah-pindah dari satu kabupaten ke kabupaten yang lain. Target dan capaian setiap KKM pun belum begitu jelas. Oleh karena itu diperlukan desa dan lokasi KKM yang permanen setidaknya 5

tahun untuk diisi oleh mahasiswa dan dosen melaksanakan pengabdian. Selain itu, perlu dirumuskan secara tematis kurikulum KKM dilokasi-lokasi KKM tersebut dengan segala bentuk program dan ketercapaian program;

4. Evaluasi KKM. Evaluasi kepuasan dan ketercapaian program pengabdian yang dilakukan mahasiswa dan dosen belum terdata dengan baik. Oleh karena itu diperlukan survey kepuasan dengan cara mengisi questioner yang dibawa oleh masing-masing DPL dan mahasiswa terhadap masyarakat tentang pelaksanaan kegiatan KKM.

b. Pengabdian dosen kepada masyarakat

Di UIN SGD Bandung kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh para dosen terdiri dari beberapa jenis, yaitu PkM berbasis hasil riset, PkM berbasis Pengembangan Desa Mitra Kampus, PkM berbasis Lokasi KKN, PKM berbasis lingkungan kampus. Dengan demikian tahapan dari masing-masing kegiatan tersebut pada dasarnya sama, yaitu dimulai dengan menyusun proposal kegiatan pengabdian sampai dengan laporan akhir kegiatan. Berikut tahapan dari masing-masing jenis pengabdian dosen.

1) Tahapan Pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil riset

Dosen dan mahasiswa dapat mengikuti kegiatan pengabdian berbasis riset dengan beberapa ketentuan, yaitu kegiatan PkM berbasis hasil riset diusulkan oleh dosen aktif UIN SGD secara berkelompok dengan jumlah tim pelaksana 2 atau 3 orang dosen dan 5 mahasiswa, PkM berbasis hasil riset yang berupa pelatihan/ diklat/*workshop* yang diikuti pendampingan, waktu

pelaksanaannya minimal 16 jam (2 hari) dan jumlah peserta minimal 25 orang (tidak termasuk tim pelaksana dan mahasiswa), ketua dan/atau anggota pengabdian minimal berpendidikan S2, Lektor, dan tidak sedang melanjutkan studi (tugas belajar). Sedangkan ketentuan khusus untuk program pengabdian dosen berbasis hasil riset yaitu pada dasarnya, PkM berbasis hasil riset merupakan tindak lanjut dari kegiatan penelitian yang telah menghasilkan produk penelitian yang layak didiseminasikan ke masyarakat mitra. Oleh karena itu, ketentuan khusus yang perlu dipenuhi oleh pengusul dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Hasil penelitian yang layak diajukan untuk di-PkM-kan adalah hasil penelitian yang berupa model atau prototipe, dan material lainnya yang merupakan hasil penelitian dosen UIN SGD, baik kelompok maupun individu;
- b) Hasil penelitian yang di-PkM-kan paling lama tiga tahun terakhir yang pernah dilakukan oleh pengusul pengabdian;
- c) Hasil dan temuan penelitian dapat diaplikasikan dan dimanfaatkan oleh masyarakat mitra.

Usulan pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil riset diajukan dalam bentuk proposal pengabdian, dimana pengusul melakukan pendaftaran secara online melalui www.lp2m.uinsgd.ac.id, mencetak halaman pengesahan dan meminta pengesahan dari Dekan dan atau prodi dan mengunggah proposal ke laman www.lp2m.uinsgd.ac.id.¹⁵

¹⁵ Anonimous, *Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat*. (Bandung: LP2M UIN SGD Bandung, 2016). Hlm. 24

Proposal akan diseleksi oleh *Reviewer* Internal yang ditunjuk oleh Ketua LP2M untuk menentukan kelayakannya. Kegiatan seleksi meliputi:

- a) Pencermatan dan penilaian kelengkapan administrasi proposal.
- b) Penilaian borang proposal (*desk evaluation*).

Out put dari program pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil riset ialah laporan akademik lengkap disertai lampiran dalam format A4 dengan jumlah halaman sekitar 70-100 halaman dan laporan akademik berbentuk dummy buku dengan judul yang berbeda dengan laporan akademik dalam format B5 dimana judulnya lebih menarik untuk diterbitkan oleh penerbit nasional dengan jumlah halaman dan sistematikanya disesuaikan dengan kebutuhan. Beban kredit yang bisa dilaporkan menjadi LKD untuk laporan akademik lengkap yang disertai dengan seluruh lampiran dalam bentuk A4 adalah 1 SKS untuk masa berlaku 1 tahun. Sedangkan laporan akademik dalam bentuk buku dummy setara dengan 3 SKS dan berlaku 1 tahun.

- 2) Tahapan Pengabdian kepada masyarakat berbasis Pengembangan desa mitra kampus

Pengusul program ini dilakukan oleh dosen UIN SGD secara berkelompok dengan jumlah tim pelaksana 2 atau 3 orang dosen dan 5 mahasiswa. PkM Berbasis Pengembangan Desa Mitra Kampus dapat memilih diantara 7 bentuk PkM sesuai dengan kebutuhan dan PkM Berbasis Pengembangan Desa Mitra Kampus berupa pelatihan/diklat/*workshop* yang diikuti pendampingan, waktu pelaksanaannya minimal 16 jam (2 hari) dan jumlah peserta minimal 25 orang (tidak termasuk tim pelaksana dan mahasiswa).

Pada dasarnya, PkM Berbasis Pengembangan Desa Mitra Kampus merupakan tanggung jawab UIN SGD terhadap desa-desa yang belum mandiri, masih terisolir, marginal, kurang terberdayakan, mengalami problem akses, budaya, dan bahkan agama yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, ketentuan khusus yang perlu dipenuhi oleh pengusul adalah pengusul mengajukan proposal dengan memilih salah satu bentuk pengabdian yang dijelaskan pada Bab II sesuai dengan kompetensi pengusul dan menyertakan surat keterangan dari kalayak dampingan dan atau aparaturn setempat tentang perlunya kegiatan pendampingan di desa tersebut.

Usulan pengabdian kepada masyarakat berbasis desa mitra kampus diajukan dalam bentuk proposal pengabdian, dimana pengusul melakukan pendaftaran secara online melalui www.lp2m.uinsgd.ac.id, mencetak halaman pengesahan dan meminta pengesahan dari Dekan dan atau prodi dan mengunggah proposal ke laman www.lp2m.uinsgd.ac.id.¹⁶

Proposal akan diseleksi oleh *Reviewer* Internal yang ditunjuk oleh Ketua LP2M untuk menentukan kelayakannya. Kegiatan seleksi meliputi pencermatan dan penilaian kelengkapan administrasi proposal dan penilaian borang proposal (*desk evaluation*).

Out put dari program pengabdian kepada masyarakat berbasis desa mitra kampus ialah laporan akademik lengkap disertai lampiran dalam format A4 dengan jumlah halaman sekitar 70-100 halaman dan laporan akademik berbentuk dummy buku

¹⁶ Anonimous, *Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat*. (Bandung: LP2M UIN SGD Bandung, 2016). Hlm. 24

dengan judul yang berbeda dengan laporan akademik dalam format B5 dimana judulnya lebih menarik untuk diterbitkan oleh penerbit nasional dengan jumlah halaman dan sistematikanya disesuaikan dengan kebutuhan. Beban kredit yang bisa dilaporkan menjadi LKD untuk laporan akademik lengkap yang disertasi dengan seluruh lampiran dalam bentuk A4 adalah 1 SKS untuk masa berlaku 1 tahun. Sedangkan laporan akademik dalam bentuk buku dummy setara dengan 3 SKS dan berlaku 1 tahun.

3) Tahapan Pengabdian kepada masyarakat berbasis berbasis lokasi KKN

Pengusul program ini dilakukan oleh dosen secara berkelompok dengan jumlah tim pelaksana 1 orang dosen selaku dosen pembimbing lapangan (DPL) dan 12-15 mahasiswa sebagai peserta KKM, PkM berbasis lokasi KKM dapat memilih diantara 7 bentuk PkM sebagaimana dijelaskan pada Bab II, PkM berbasis lokasi KKM yang berupa pelatihan/diklat/*workshop* yang diikuti pendampingan, waktu pelaksanaannya minimal 16 jam (2 hari) dan jumlah peserta minimal 25 orang (tidak termasuk tim pelaksana dan mahasiswa).

Persyaratan khusus program ini adalah pengusul merupakan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) pada lokasi KKM, Program PkM berbasis lokasi KKM dilaksanakan pada saat dan atau setelah kegiatan KKM selesai, Mengajukan proposal dengan memilih salah satu bentuk pengabdian yang dijelaskan pada Bab II sesuai dengan kompetensi pengusul dan menyertakan surat keterangan dari

kalayak dampingan dan atau aparatur setempat tentang perlunya kegiatan pendampingan di desa setempat.

Usulan pengabdian kepada masyarakat berbasis lokasi KKM diajukan dalam bentuk proposal pengabdian, dimana pengusul melakukan pendaftaran secara online melalui www.lp2m.uinsgd.ac.id, mencetak halaman pengesahan dan meminta pengesahan dari Dekan dan atau prodi dan mengunggah proposal ke laman www.lp2m.uinsgd.ac.id.¹⁷

Proposal akan diseleksi oleh *Reviewer* Internal yang ditunjuk oleh Ketua LP2M untuk menentukan kelayakannya. Kegiatan seleksi meliputi pencermatan dan penilaian kelengkapan administrasi proposal dan penilaian borang proposal (*desk evaluation*).

Out put dari program pengabdian kepada masyarakat berbasis lokasi KKM ialah laporan akademik lengkap disertai lampiran dalam format A4 dengan jumlah halaman sekitar 70-100 halaman dan laporan akademik berbentuk dummy buku dengan judul yang berbeda dengan laporan akademik dalam format B5 dimana judulnya lebih menarik untuk diterbitkan oleh penerbit nasional dengan jumlah halaman dan sistematikanya disesuaikan dengan kebutuhan. Beban kredit yang bisa dilaporkan menjadi LKD untuk laporan akademik lengkap yang disertai dengan seluruh lampiran dalam bentuk A4 adalah 1 SKS untuk masa berlaku 1 tahun. Sedangkan laporan akademik dalam bentuk buku dummy setara dengan 3 SKS dan berlaku 1 tahun.

¹⁷ Anonimous, *Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat*. (Bandung: LP2M UIN SGD Bandung, 2016). Hlm. 24

4) Tahapan Pengabdian kepada masyarakat berbasis lingkungan kampus

Pengusul program ini adalah dosen UIN SGD secara individual dengan jumlah tim pelaksana 1 orang dosen dan 2 orang mahasiswa, PkM berbasis lingkungan kampus dapat memilih diantara 7 bentuk PkM sebagaimana dijelaskan pada Bab II dan PkM berbasis lingkungan kampus yang berupa pelatihan/diklat/*workshop* yang diikuti pendampingan, waktu pelaksanaannya minimal 16 jam (2 hari) dan jumlah peserta minimal 25 orang (tidak termasuk tim pelaksana dan mahasiswa). Sedangkan syarat khususnya adalah dosen UIN SGD dengan pangkat golongan III, Program PkM berbasis lokasi KKM dilaksanakan di desa/kelurahan sekitar kampus UIN SGD, mengajukan proposal dengan memilih salah satu bentuk pengabdian yang dijelaskan pada Bab II sesuai dengan kompetensi pengusul dan menyertakan surat keterangan dari masyarakat mitra dan atau aparaturnya setempat tentang perlunya kegiatan pendampingan di desa setempat.

Usulan pengabdian kepada masyarakat berbasis lingkungan kampus diajukan dalam bentuk proposal pengabdian, dimana pengusul melakukan pendaftaran secara online melalui www.lp2m.uinsgd.ac.id, mencetak halaman pengesahan dan meminta pengesahan dari Dekan dan atau prodi dan mengunggah proposal ke laman www.lp2m.uinsgd.ac.id.¹⁸

¹⁸ Anonimous, *Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat*. (Bandung: LP2M UIN SGD Bandung, 2016). Hlm. 24

Proposal akan diseleksi oleh *Reviewer* Internal yang ditunjuk oleh Ketua LP2M untuk menentukan kelayakannya. Kegiatan seleksi meliputi pencermatan dan penilaian kelengkapan administrasi proposal dan penilaian borang proposal (*desk evaluation*).

Output dari program pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil riset ialah laporan akademik lengkap disertai lampiran dalam format A4 dengan jumlah halaman sekitar 70-100 halaman dan laporan akademik berbentuk dummy buku dengan judul yang berbeda dengan laporan akademik dalam format B5 dimana judulnya lebih menarik untuk diterbitkan oleh penerbit nasional dengan jumlah halaman dan sistematikanya disesuaikan dengan kebutuhan. Beban kredit yang bisa dilaporkan menjadi LKD untuk laporan akademik lengkap yang disertai dengan seluruh lampiran dalam bentuk A4 adalah 1 SKS untuk masa berlaku 1 tahun. Sedangkan laporan akademik dalam bentuk buku dummy setara dengan 3 SKS dan berlaku 1 tahun.

C. Pengabdian kepada Masyarakat di UIN Walisongo Semarang

1. Implementasi Pengabdian kepada Masyarakat di UIN Walisongo Semarang

Seperti halnya PTKIN lain, UIN Walisongo¹⁹ terus berupaya meningkatkan program pengabdian kepada masyarakat baik dari kualitas, kuantitas bahkan juga pendanaan. Namun satu hal yang nampak berbeda dari PkM di UIN Walisongo adalah intensitas kegiatan KKN yang cukup variatif dan setiap semester

¹⁹ UIN Walisongo merupakan alih status dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 130 tanggal 17 Oktober 2014.

dilaksanakan. Bahkan menurut Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat, Ali Imran bahwa “pengabdian di UIN Walisongo melalui pengurus KKN”²⁰

Setiap PTKIN nampaknya memiliki strategi sendiri di dalam mengelola program pengabdian kepada masyarakat. Di Pusat PkM UIN Walisongo Semarang beragam kegiatan pengabdian cukup terlihat. Guna mempersiapkan SDM pengabdian misalnya, disiapkan program workshop metodologi pengabdian agar hasil dari pengabdian benar-benar bermanfaat bagi masyarakat yang didampingi. Demikian pula bagaimana ikut memperkuat lembaga-lembaga keislaman, telah dicanangkan madrasah binaan dan pesantren binaan UIN Walisongo sebagai program pengabdian kepada masyarakat. Keberpihakan terhadap lembaga keislaman merupakan bagian dari strategi implementasi pengabdian, misalnya terdapat program workshop pengelolaan pesantren dan pemberdayaan pesantren merupakan bukti dari komitmen terhadap masyarakat.

Menurut Kapus Pengabdian, selain program di atas, kegiatan KKN yang multi variatif merupakan bentuk tanggungjawab PT terhadap masyarakat. Dalam kegiatan KKN, setiap kecamatan desa-desanya terisi seluruhnya. Kelompok KKN memperoleh bantuan Rp. 500.000 untuk pergi ke desa. Demikian pula dalam kegiatan KKN tersebut dikompertisikan program unggulan kelompok yang nantinya dinilai dan diberi *reward*.

²⁰ Wawancara dengan Ali Imran, Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat LP2M UIN Walisongo, 27 Juli 2016

Dengan demikian, implementasi pengabdian kepada masyarakat di UIN Walisongo dimulai dari perencanaan tentang bagaimana program penyiapan SDM pengabdian, penguatan lembaga keislaman, KKN dengan jenisnya yang variatif dan tentu saja pengabdian dosen kepada masyarakat dalam suatu program yang disebut Karya Pengabdian Dosen (KPD).

2. Bentuk dan Model Implementasi PkM

Seperti halnya PTKIN lain, UIN Walisongo membagi kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam dua bentuk, yaitu PkM oleh dosen dan PkM oleh mahasiswa. PkM oleh dosen bernama Karya Pengabdian dosen (KPD) Seperti dijelaskan sebelumnya, bahwa kegiatan KKN di UIN Walisongo sebagai salah satu bentuk pengabdian mahasiswa kepada masyarakat memiliki berbagai bentuk, yaitu

a. KKN Mandiri

KKN Mandiri adalah kegiatan belajar dan kerja lapangan yang merupakan pengintegrasian dari unsur pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui pendekatan interdisipliner dan lintas sektoral serta dilaksanakan atas inisiatif mahasiswa, dan atau institusi internal UIN Walisongo.²¹ KKN Mandiri terdiri dari tiga bentuk, yaitu:

1) KKN Mandiri Inisiatif Terprogram (KKN-MIT)

KKN Mandiri Inisiatif Terprogram atau disingkat dengan

²¹ Anonymous, *Buku Pedoman Kuliah Kerja Nyata KKN Mandiri Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang*. (Semarang: LP2M UIN Walisongo, 2016) hlm. 2.

Selanjutnya, penjelasan teknis tentang KKN mandiri ini sebagian besar data diperoleh dari buku panduan tersebut selain juga diperoleh dari hasil wawancara.

KKN-MIT merupakan KKN mandiri yang program kegiatan, waktu, dan volume pelaksanaannya didasarkan pada proposal yang disusun oleh calon mahasiswa peserta KKN. Perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan dilakukan oleh mahasiswa peserta KKN dengan bimbingan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dan atas persetujuan LP2M.

Dalam KKN-MIT, mahasiswa mengajukan perencanaan kegiatan secara lengkap dengan membuat proposal kepada LP2M UIN Walisongo. Lokasi dipilih berdasarkan pada fenomena dan kebutuhan masyarakat mitra dampingan yang akan diberikan oleh mahasiswa. Mahasiswa menyusun proposal lengkap yang berisi program kerja KKN berikut kebutuhan biaya. LP2M akan melihat tingkat kesiapan program dan biaya yang dibutuhkan. Selain itu, dalam proses ini akan disesuaikan dengan kompetensi mahasiswa.

Program kerja KKN-MIT yang diajukan oleh mahasiswa harus memiliki kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dalam berbagai bidang, seperti: agama, kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan infrastruktur sekaligus menjawab problematika yang ada dalam masyarakat sebagai calon mitra dampingan secara mandiri.

Pelaksanaan KKN-MIT dilakukan oleh mahasiswa dengan sumber biaya sepenuhnya menjadi beban mahasiswa. Mahasiswa diberi keluasaan untuk menggali biaya dari sponsorship, donatur, dan pihak-pihak lain dengan sepengetahuan LP2M.

Mahasiswa membayar lunas biaya KKN sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN Walisongo.

2) KKN Mandiri Misi Khusus (KKN-MMK)

KKN Mandiri Misi Khusus atau disingkat dengan KKN-MMK merupakan KKN mandiri yang program kegiatan, waktu, dan volume pelaksanaannya didasarkan pada proposal yang disusun atau diusulkan oleh institusi internal UIN Walisongo (fakultas, lembaga, pusat, unit atau lembaga internal kampus lainnya) sebagai implementasi dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan melibatkan mahasiswa sesuai dengan visi misi UIN Walisongo.

KKN-MMK ini dilaksanakan atas dasar tindak lanjut kerjasama (MoU) antara UIN Walisongo dengan instansi, lembaga, organisasi, kelompok masyarakat, badan usaha, dan sejenisnya. Institusi internal UIN Walisongo sebagai pengusul menyusun proposal kegiatan KKN yang akan dilaksanakan dan berkoordinasi dengan LP2M UIN Walisongo. LP2M menyelenggarakan seminar proposal KKN-MMK untuk mendapatkan masukan demi penyempurnaan proposal. Setelah proposal disetujui oleh LP2M kemudian pengusul mensosialisasikan ke civitas akademika UIN Walisongo.

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan KKN-MMK dibebankan kepada pihak ketiga dan mahasiswa secara proporsional, sedangkan pengelolaan administrasi dan keuangan oleh lembaga pengusul KKN-MMK. Pengusul dan mahasiswa diberi kebebasan untuk menggali biaya dari sponsorship, donatur, dan pihak-pihak yang siap mendukung program KKN ini, dengan sepengetahuan LP2M.

Mahasiswa membayar lunas biaya KKN sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN Walisongo.

3) KKN Mandiri Pengakuan (KKN-MP)

KKN Mandiri Pengakuan atau disingkat dengan KKN-MP merupakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan oleh mahasiswa yang berdasarkan pertimbangan dan kebijakan Ketua LP2M UIN Walisongo dapat diakui dan disamakan dengan kegiatan KKN. Kegiatan pengabdian yang telah dilakukan mahasiswa memberikan manfaat riil bagi masyarakat atau bagi bangsa Indonesia dalam situasi dan kondisi tertentu yang bersifat monumental dan insidental baik di tingkat regional, nasional, dan internasional. Kegiatan tersebut seperti keterlibatan mahasiswa dalam penanganan bencana alam, misi kemanusiaan internasional, kegiatan bela Negara, dan sebagainya. Kriteria kegiatan pengabdian yang dapat diakui sebagai KKN ini sepenuhnya menjadi wewenang LP2M UIN Walisongo berdasarkan rekomendasi dari Tim penilai *ad hoc* yang ditunjuk oleh LP2M.

Untuk mendapatkan pengakuan kegiatan yang telah dilaksanakannya sebagai KKN Mandiri, mahasiswa mengajukan permohonan kepada Ketua LP2M dengan melampirkan laporan lengkap kegiatan yang telah dilaksanakannya, berikut manfaat dari kegiatan yang telah dilaksanakan dengan disertai bukti pendukung kegiatan. LP2M UIN Walisongo membentuk tim penilai *ad hoc* yang bertugas untuk memberikan pertimbangan kepada Ketua LP2M dalam memberikan pengakuan terhadap kegiatan tersebut sebagai pengganti KKN.

Mahasiswa membayar lunas biaya KKN sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN Walisongo.

4) KKN Reguler

KKN adalah kegiatan belajar dan kerja lapangan yang merupakan pengintegrasian dari unsur pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui pendekatan interdisipliner dan lintas sektoral. Waktu pelaksanaan KKN reguler dilaksanakan dua kali dalam satu tahun, yaitu Februari Maret dan Juli Agustus.²²

(2) Karya Pengabdian Dosen²³

Program bantuan Karya Pengabdian Dosen atau disingkat dengan KPD merupakan satu dari beberapa program pengabdian yang diprogramkan oleh Pusat Pengabdian kepada Masyarakat (PPM) pada LP2M UIN Walisongo. KPD ini juga dapat diprogramkan oleh fakultas di lingkungan UIN Walisongo dengan sumber biaya dari DIPA fakultas. Gugus kendali penjaminan mutu program kegiatan KPD (baik yang dibiayai fakultas atau dibiayai LP2M) berada di LP2M UIN Walisongo. Bantuan KPD ini diberikan kepada dosen (individual dan kolektif) dan kolaboratif dosen dengan mahasiswa secara selektif dan kompetitif. Program ini didesain sebagai upaya peningkatan mutu pengabdian pada masyarakat (*social services*) oleh civitas akademika UIN Walisongo.

Fokus mitra dampingan dalam program KPD ini adalah komunitas muslim. Dalam proses pengabdian pada masyarakat

²² Wawancara dengan Ali Imran, Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat LP2M UIN Walisongo, 27 Juli 2016

²³ Anonimous, *Buku Pedoman Karya Pengabdian Dosen (KPD) Tahun 2016 Program Peningkatan Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat*. (Semarang: LP2M UIN walisongo Semarang, 2016) hlm. 1-5

diperlukan berbagai konsep yang terkait dengan komunitas muslim dampingan, metode dan teori analisa kebutuhan yang memiliki relevansi dengan kebutuhan masyarakat. Program ini juga ditujukan untuk memperkecil kemubaziran proses pembangunan (*building waste*), penyimpangan, kekurangan, atau kekacauan (*chaos*) menuju perubahan (*changing*), mengejar ketertinggalan melalui percepatan (*acceleration*), dan pemberdayaan (*empowering*) masyarakat. Program ini merupakan salah satu wujud perpaduan unsur pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat dalam bingkai Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pola pengabdian masyarakat perguruan tinggi ke depan adalah pengembangan laboratorium sosial, mengingat *pertama*: interaksi antar stakeholder dan mindset dalam pembangunan daerah mitra yang masih belum optimal. *Kedua*, merancang pemahaman realitas objektif ”fakta sosial” melalui studi tentang setting institusional dan untuk memahami struktur fundamental interaksi melalui studi analisis percakapan antar ”aktor sosial”. Dan *ketiga*, dengan diketahuinya fakta sosial dan struktur interaksi, melalui Laboratorium Sosial diharapkan dapat dikembangkan strategi/model intervensi dan membangun kapasitas stakeholder.

Jenis Karya Pengabdian Dosen (KPD) tahun anggaran 2016 UIN Walisongo terdiri dari:

- 1) “KPD Individual Kompetitif” oleh LP2M.
- 2) “KPD Kolektif Kompetitif” oleh LP2M.
- 3) “KPD Kolektif Berbasis Gender dan Anak” oleh LP2M.

- 4) “KPD Kolaboratif Dosen dan Mahasiswa” oleh LP2M.
- 5) “KPD Fakultas” oleh Fakultas di lingkungan UIN Walisongo yang menyediakan pagu anggaran KPD.

Setiap proposal KPD yang diajukan untuk didanai dari DIPA LP2M UIN Walisongo, pengusul dapat mendesain alokasi anggaran sebagai berikut:

- 1) “KPD Individual Kompetitif LP2M” sebesar Rp 10.000.000,-
- 2) “KPD Kolektif Kompetitif LP2M” sebesar Rp 30.000.000,-
- 3) “KPD Kolektif berbasis gender dan anak” sebesar Rp 30.000.000,-
- 4) “KPD Kolaboratif Dosen dan Mahasiswa” sebesar Rp 20.000.000,-

Program bantuan Karya Pengabdian Dosen (KPD) merupakan program bantuan dana yang diberikan secara kompetitif dan selektif oleh LP2M dan atau oleh fakultas di lingkungan UIN Walisongo kepada dosen tetap (PNS / non PNS) UIN Walisongo untuk keperluan pelaksanaan pengabdian yang diharapkan memperoleh hasil yang bermutu dan berhasil guna.

Program ini merupakan bentuk dukungan institusional dan finansial UIN Walisongo terhadap peningkatan mutu proses dan hasil karya pengabdian dosen UIN Walisongo. UIN Walisongo berkepentingan dan sekaligus memberikan apresiasi yang tinggi terhadap sejumlah hasil karya pengabdian yang bermutu dan mampu menawarkan jalan keluar terbaik atas kompleksitas persoalan masyarakat dewasa ini dan memberikan dampingan

kepada masyarakat dalam mengatasi permasalahannya. Selain itu juga merupakan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan disiplin ilmu yang berkembang di UIN Walisongo untuk memberikan jalan keluar permasalahan masyarakat.

Karya Pengabdian Dosen yang demikian ini penting direalisasikan selain sebagai bagian dari kontribusi UIN Walisongo terhadap masyarakat, juga merupakan cara yang elegan bagi intelektual muslim untuk tetap eksis dan bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam arti yang sebenarnya di tengah-tengah permasalahan masyarakat dewasa ini.

Beragam bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat di atas sesungguhnya masih banyak yang dapat diulas dengan menyebutkan kegiatan pengabdian lainnya. Namun dengan membahas KKN dan variasiya serta Karya Pengabdian Dosen sesungguhnya sudah mencerminkan keseluruhan pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan data RKAKL tahun 2016 di Pusat Pengabdian kepada Masyarakat LP2M UIN Walisongo terdapat beragam kegiatan pengabdian sebagaimana tercermin dalam tabel 5.

Tabel 5
Rincian Program Pengabdian kepada Masyarakat
Pusat Pengabdian kepada Masyarakat
UIN Walisongo Semarang

No	Jenis Kegiatan
----	----------------

1	Desa Binaan
2	Madrasah Binaan
3	Lokakarya Imsakiyah
4	Rukyatul Hilal
5	Kegiatan BAI
6	Worshop Evaluasi KKN
7	Bantuan Stimulan KKN
8	Pelaksanaan KKN (BLU)
9	Pelaksanaan KKN BOPTN
10	Karya Pengabdian Dosen
11	Seminar Seleksi KPD
12	Seminar Proposal KPD
13	Seminar Progres Report KPD
14	Seminar hasil KPD
15	Workshop pengembangan masy partisipatori
16	Lokakarya Jaringan PkM
17	Workshop Penyusunan Pedoman PkM
18	FGD Penjaminan mutu Pengabdian
19	Workshop Penyusunan Draft Sistem Penjaminan Mutu Pengabdian
20	Workshop PAR pemberdayaan Masyarakat

21	Diskusi Pusat PkM
22	Workshop Strategis Planing Desa Santri
23	Workshop Pengelolaan Organisasi dan Institusi Pesantren
24	Workshop Pemberdayaan Pesantren
25	Workshop Kewirausahaan
26	Workshop Pengelolaan BMT
27	Bantuan Usaha Milik Rakyat
28	Launching Desa Santri

Sumber: RKAKL Pusat Pengabdian kepada Masyarakat LP2M UIN Walisongo 2016

Program kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dikelola oleh Pusat Pengabdian kepada Masyarakat UIN Walisongo Semarang sudah sangat beragam. Mulai dari program mempersiapkan SDM sebagai pelaksana pengabdian, anggaran dan out putnya dalam bentuk jurnal pengabdian. Pada tahun 2016 anggaran yang disiapkann untuk beragam program pengabdian sebanyak Rp. 3.398.879.000 (Tiga milyar tigaratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

3. Metode PkM di UIN Walisongo Semarang

Metode atau tahapan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dapat dibagi menjadi dua, yaitu pkm dengan dosen dan pkm dengan mahasiswa. PkM dengan dosen programnya bernama

Karya Pengabdian Dosen (KPD) sedangkan PkM dengan mahasiswa dalam kegiatan KKN yang variasinya sangat banyak.

a. Tahapan Karya Pengabdian Dosen²⁴

Program Bantuan Karya Pengabdian Dosen (KPD) Tahun Anggaran 2016 diperuntukkan bagi civitas akademika UIN Walisongo yang telah memenuhi persyaratan. Persyaratan pengusul program ini adalah Dosen Tetap (PNS/Non PNS) UIN Walisongo, memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN), pengusul KPD kolektif sebanyak 3 orang dosen, terdiri dari 1 orang ketua dan 2 orang anggota, pengusul KPD kolektif berbasis gender dan anak sebanyak 3 orang dosen, terdiri dari 1 orang ketua dan 2 orang anggota, pengusul sudah pernah mengikuti “Pelatihan Dialog Warga berbasis gender dan anak” dan atau “Pelatihan Feminis Partisipatory Action Research /Fem-PAR)”, dibuktikan dengan sertifikat / piagam.

Sedangkan pengusul KPD kolaboratif sebanyak 4 orang terdiri dari 1 dosen dan 3 mahasiswa, anggota Tim pengusul KPD kolaboratif merupakan mahasiswa aktif yang tidak sedang cuti, pengusul KPD Fakultas adalah dosen dari fakultas yang menyediakan dana tersebut dan setiap satu nama pengusul hanya berhak untuk mendapatkan dana bantuan untuk satu judul KPD.

Selain syarat pengusul di atas, pengusul juga mesti memenuhi syarat administrasi diantaranya pengusul melakukan registrasi secara *on line* dengan mengunjungi website lppm.walisongo.ac.id, pengusul mengajukan “Surat Permohonan

²⁴ Anonymous, *Buku Pedoman Karya Pengabdian Dosen (KPD) Tahun 2016 Program Peningkatan Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat*. (Semarang: LP2M UIN walisono Semarang, 2016) hlm. 6-9

Bantuan Karya Pengabdian Dosen” ditujukan kepada Ketua LP2M UIN Walisongo, diketahui oleh Ketua Jurusan / Ketua Program Studi / Kepala Pusat Studi Gender dan Anak, pengusul mengajukan “proposal KPD Tahun 2016” sesuai dengan sistematika yang ditetapkan oleh LP2M UIN Walisongo, melampirkan “Surat Pernyataan” bahwa judul/tema yang sedang diajukan adalah belum / tidak sedang diajukan ke institusi lain diluar LP2M UIN Walisongo, dan atau belum / tidak sedang didanai oleh institusi lain di luar LP2M UIN Walisongo.

Pengusul mengajukan proposal pengabdian kepada LP2M dengan beberapa tahap, yaitu:

- 1) Pengusul registrasi di www.lppm.walisongo.ac.id
- 2) Pengusul mengirimkan hard copy dokumen permohonan KPD tahun anggaran 2016, sebanyak 3 (tiga) bendel yaitu (a) 1 bendel berisi gabungan substansi proposal dan supporting documents, dan (b) 2 bendel masing-masing berisi substansi Proposal (tanpa identitas pengusul).
- 3) Proposal KPD yang didanai dari LP2M UIN Walisongo dijilid dengan cover sampul warna BIRU. Sedangkan KPD yang didanai dari DIPA Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) dijilid dengan cover sampul warna PUTIH.
- 4) Satu bendel berisi gabungan substansi proposal dan supporting documents, disusun dengan urutan : a)cover sampul (contoh terlampir); b) *Check List* kelengkapan (contoh terlampir); c)surat permohonan, mengetahui ketua jurusan/ ketua program studi / Kepala Pusat Studi Gender dan Anak (sesuai kluster, contoh terlampir); d)proposal KPD (sistematika sesuai

dengan ketentuan KPD LP2M tahun 2016); e) surat keterangan dosen tetap (contoh terlampir); f) surat pernyataan (contoh terlampir); dan g) curriculum vitae pengusul.

- 5) Dua bendel masing-masing berisi substansi proposal, disusun dengan urutan : cover sampul (tanpa identitas, contoh terlampir) dan proposal KPD (sistematika sesuai dengan ketentuan KPD LP2M tahun 2016). Dua bendel proposal KPD ini hanya memuat substansi proposal dan tidak ada identitas pengusul.

Berdasarkan dokumen Standart Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UIN Walisongo dan untuk memperoleh hasil KPD yang sesuai dengan asas kompetisi, legalitas, kualitas, dan akuntabilitas maka LP2M UIN Walisongo menerapkan system proses Program KPD tahun anggaran 2016, baik yang didanai oleh LP2M maupun yang didanai oleh Fakultas di lingkungan UIN Walisongo, melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

- 1) Tahapan sosialisasi
- 2) Tahapan pendaftaran
- 3) Tahapan seleksi administrative
- 4) Tahapan seleksi substantive (review proposal)
- 5) Tahapan seminar proposal
- 6) Tahapan penetapan penerima bantuan dan proses administrative pencairan bantuan KPD tahun anggaran 2016
- 7) Tahapan pelaksanaan Karya Pengabdian Dosen
- 8) Tahapan monitoring dan seminar progress report
- 9) Tahapan laporan dan evaluasi

Adapun proposal Program Bantuan Karya Pengabdian Dosen UIN Walisongo tahun anggaran 2016 mengikuti tata aturan kaidah penulisan proposal dengan sistematika judul pengabdian, isu dan fokus pengabdian, alasan memilih dampingan, kondisi dampingan saat ini, kondisi dampingan yang diharapkan, strategi yang dilakukan untuk mencapai kondisi harapan (metodologi), pihak-pihak yang terlibat (*stakeholders*) dan bentuk keterlibatannya, resources yang sudah dimiliki, besaran anggaran dan alokasi waktu dan penutup.

b. KKN Mandiri MIT (Mandiri Inisiatif Terprogram)

KKN Mandiri merupakan kegiatan yang dalam pelaksanaannya melibatkan banyak pihak, baik internal maupun eksternal kampus. Internal kampus seperti Rektorat, LP2M, fakultas, DPL dan mahasiswa KKN. Eksternal kampus seperti pemerintah daerah (Kabupaten/Kecamatan/Desa) lokasi KKN, instansi terkait dan para *stakeholders* lainnya.

KKN Mandiri dikelola dan atau difasilitasi oleh LP2M. Kepala Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai Ketua Badan Pelaksana KKN (BP-KKN) dibantu beberapa staf berdasarkan SK Rektor UIN Walisongo. Dalam operasional di lokasi KKN, Kepala Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat dibantu oleh Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) yang ditunjuk melalui SK Rektor. DPL merupakan kepanjangan tangan LP2M dalam membimbing dan melakukan monitoring peserta KKN di lokasi masing-masing, yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah mahasiswa KKN.

1) Persiapan

a) Pendaftaran Peserta KKN-MIT

- (1) Mahasiswa yang berhak untuk mendaftar KKN Mandiri adalah mereka yang telah lulus sekurang-kurangnya 120 SKS dibuktikan dengan transkrip nilai sementara yang sah.
- (2) Mahasiswa membayar komponen biaya KKN se-suai dengan ketentuan yang berlaku di UIN Wali-songo.
- (3) Pendaftaran peserta KKN-MIT dilayani sesuai jad-wal yang ditentukan oleh LP2M.
- (4) Peserta KKN-MIT boleh mengambil mata kuliah pada semester berjalan, dengan syarat pelaksanaan KKN Mandiri tidak mengganggu kegiatan perkuliahan.
- (5) Calon peserta KKN-MIT adalah kelompok maha-siswa yang terdiri dari 10 sampai dengan 15 orang, yang berasal paling sedikit dari dua program studi yang berbeda, baik dalam satu fakultas atau lintas fakultas di UIN Walisongo.
- (6) Dalam proses mendaftar sebagai calon peserta KKN-MIT, mahasiswa diwajibkan mengajukan proposal rencana kegiatan KKN-MIT kepada LP2M UIN Walisongo yang mencakup minimal hal-hal sebagai berikut: (1) Latar belakang, (2) Laporan hasil observasi (kondisi mitra pengabdian saat ini dan permasalahan yang dihadapi mitra pengabdian), (3) Manfaat KKN-MIT, (4) Program kerja yang akan dilaksanakan dan kondisi mitra pengabdian yang diharapkan, (5) Metode Pelaksanaan, (6) Rencana Anggaran Biaya, dan (7) Lampiran-lampiran pendukung (format proposal sebagaimana terlampir).
- (7) LP2M UIN Walisongo akan menjadwalkan seminar proposal KKN-MIT yang telah diusulkan oleh mahasiswa

setelah proposal diterima oleh LP2M, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Seluruh mahasiswa pengusul proposal wajib hadir dan menyampaikan paparannya di depan tim penilai (*ad hoc*) yang ditunjuk oleh LP2M UIN Walisongo.
 - b) Evaluasi proposal meliputi beberapa aspek kesesuaian proposal dengan kebijakan umum KKN UIN Walisongo, kesesuaian program kerja dengan disiplin ilmu pengusul, biaya KKN Mandiri, alokasi waktu, dan kapasitas dukungan dari pihak lain.
 - c) Hasil evaluasi proposal akan menggambarkan tiga hal, *pertama*, PROPOSAL DITERIMA, *kedua* PROPOSAL DITERIMA BERSYARAT, dan *ketiga* PROPOSAL DITOLAK.
 - d) Keputusan diterima atau ditolak menjadi kewenangan LP2M UIN Walisongo, berdasarkan rekomendasi dari Tim penilai.
 - e) Apabila proposal DITERIMA BERSYARAT, maka mahasiswa pengusul akan diberikan waktu untuk memperbaiki proposal maksimal 7x24 jam sejak keputusan diberikan.
- b) Penentuan Lokasi KKN-MIT
- (1) Lokasi KKN-MIT diusulkan oleh mahasiswa kepada LP2M UIN Walisongo.
 - (2) Penentuan lokasi KKN-MIT didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan dan kemampuan mahasiswa.
 - (3) Lokasi KKN-MIT juga dapat ditentukan atas usulan

jajaran pimpinan Fakultas di lingkungan UIN Walisongo yang telah memiliki jaringan kerjasama dengan pihak lain.

- (4) Jangkauan wilayah KKN-MIT meliputi Lembaga kemasyarakatan tingkat dusun atau RW, komunitas masyarakat tertentu, desa atau kelurahan, dan kecamatan.

c) Persetujuan KKN-MIT

Apabila proposal KKN Mandiri yang diajukan oleh mahasiswa dinyatakan DITERIMA, maka LP2M UIN Walisongo akan memberikan surat persetujuan KKN Mandiri untuk kemudian melaksanakan tahapan KKN berikutnya.

2) Pembekalan

a) Peserta Pembekalan

- (1) Calon peserta pembekalan KKN-MIT adalah mahasiswa yang dinyatakan telah memenuhi syarat administratif dan akademik sebagai peserta KKN-MIT oleh LP2M UIN Walisongo.
- (2) Kegiatan Pembekalan KKN-MIT merupakan bagian yang tak terpisahkan dari rangkaian pelaksanaan KKN secara keseluruhan, oleh karenanya semua calon peserta KKN-MIT wajib hadir mengikuti pembekalan.

b) Tujuan Pembekalan

- (1) Memberikan bekal pengetahuan sosial kemasyarakatan, baik mengenai problematika, pendekatan maupun pemecahannya, serta ketrampilan praktis kepada calon peserta KKN yang dapat dimanifestasikan di lokasi.
- (2) Menciptakan kondisi siap mental, fisik dan konseptual

bagi calon peserta KKN sebelum diterjunkan di lokasi KKN.

- (3) Menyiapkan rancangan pelaksanaan program kerja KKN.
- c) Materi dan Waktu Pembekalan
- (1) Materi pembekalan KKN merupakan paket pendidikan dan latihan yang disesuaikan dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan program KKN-MIT yang akan dilaksanakan oleh mahasiswa.
 - (2) Materi pembekalan KKN Mandiri terdiri dari tiga komponen yang menjadi satu kesatuan tak terpisahkan, yaitu materi yang bertujuan untuk meman-tapkan kepribadian, memperluas dan memperkaya cakrawala pengetahuan tentang berbagai masalah, serta kemampuan dalam memecahkan masalah secara sistematis yang muncul pada waktu KKN-MIT berlangsung.
 - (3) Jadwal acara pembekalan sepenuhnya diatur oleh LP2M UIN Walisongo.
- (4) Nara sumber dan Metode Pembekalan
- (a) Nara sumber pembekalan terdiri dari pimpinan UIN Walisongo, LP2M, para pakar, dan lembaga lain yang relevan dengan tujuan pembekalan maupun tema KKN-MIT.
 - (b) Metode yang digunakan dalam pembekalan KKN-MIT adalah ceramah, tanya jawab, diskusi, penu-gasan, dan *role playing*.
- (5) Tata tertib Pembekalan
- (a) Mahasiswa peserta KKN-MIT WAJIB mengikuti

kegiatan pembekalan dari awal sampai akhir acara.

- (b) Bagi peserta yang berhalangan hadir wajib memberitahu LP2M dengan menyertakan surat izin yang diketahui DPL, dan bagi yang berhalangan hadir karena sakit diwajibkan melampirkan surat keterangan dokter.
- (c) Mahasiswa KKN-MIT wajib mengenakan pakaian yang rapi, sopan dan bersepatu.
- (d) DPL KKN Mandiri wajib mendampingi proses pembekalan KKN Mandiri.
- (e) Jadwal, acara, materi, dan narasumber pembelajaran KKN sepenuhnya merupakan kewenangan LP2M UIN Walisongo untuk mengaturnya.

3) Pelaksanaan

- a) Ketua LP2M UIN Walisongo memberikan surat tugas kepada mahasiswa peserta KKN untuk melaksanakan kegiatan KKN-MIT.
- b) Pelaksanaan KKN-MIT diawali dengan penglepasan oleh Ketua LP2M atas nama Rektor UIN Walisongo.
- c) Waktu penglepasan disesuaikan dengan jadwal yang telah diatur oleh LP2M UIN Walisongo.
- d) Kegiatan KKN-MIT dilaksanakan dengan mengacu pada proposal KKN-MIT yang telah disetujui dalam seminar proposal KKN-MIT.
- e) Program kerja yang tertuang dalam proposal yang telah disetujui dapat ditambah atau dikurangi sesuai dengan perkembangan kenyataan di lokasi KKN-MIT dengan persetujuan DPL dan LP2M.

- f) Dalam pelaksanaan KKN-MIT, mahasiswa diizinkan untuk melaksanakan tambahan kegiatan yang berasal dari lembaga pemerintah dan lainnya (masyarakat), selama tidak bertentangan dengan kepentingan pembelajaran dan tidak mengurangi keberhasilan program kerja KKN-MIT yang telah dicanangkan.
 - g) Dalam pelaksanaan kegiatan KKN-MIT, mahasiswa didampingi oleh seorang DPL yang akan memberikan pengarahan, dan bimbingan.
 - h) Pelaksanaan KKN-MIT di lokasi minimal 45 (empat puluh lima) hari.
 - i) Mahasiswa peserta KKN-MIT WAJIB mengisi buku kegiatan yang telah disediakan oleh LP2M UIN Walisongo, dan DPL berkewajiban untuk menganalisa tingkat keaktifan mahasiswa selama masa KKN.
 - j) Mahasiswa KKN Mandiri WAJIB mentaati peraturan yang ditetapkan oleh LP2M UIN Walisongo, berikut norma etika yang berlaku di masyarakat.
 - k) LP2M melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan KKN-MIT.
 - l) Setelah Mahasiswa melaksanakan kegiatan KKN-MIT selama waktu yang telah ditentukan, mahasiswa akan ditarik kembali oleh DPL atas nama LP2M UIN Walisongo.
 - m) Waktu penarikan disesuaikan dengan jadwal yang telah ditentukan oleh LP2M UIN Walisongo.
- 4) Pelaporan dan Evaluasi

- a) Mahasiswa WAJIB menyusun laporan kinerja pelaksanaan KKN-MIT dan dimintakan persetujuan DPL dan pimpinan lembaga atau institusi tempat diselenggarakannya KKN-MIT.
- b) Laporan kinerja pelaksanaan KKN-MIT diserahkan ke LP2M paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak KKN berakhir.
- c) LP2M menyelenggarakan seminar hasil kinerja pelaksanaan KKN-MIT sebagai forum evaluasi dan kemungkinan rencana tindak lanjut.
- d) DPL dan pimpinan lembaga atau institusi tempat diselenggarakannya KKN-MIT memberikan penilaian terhadap setiap mahasiswa peserta KKN-MIT.
- e) Setelah KKN-MIT selesai dilaksanakan, DPL dan LP2M akan melaksanakan rapat evaluasi yang mencakup dua agenda, yaitu; *pertama*, tingkat keberhasilan KKN-MIT yang telah selesai dilaksanakan, *kedua*, tingkat kepentingan penerjuman KKN-MIT Lanjutan pada lokasi yang sama.
- f) Apabila mahasiswa peserta dinyatakan lulus maka LP2M menerbitkan sertifikat KKN.

(3) KKN Mandiri Misi Khusus (KKN-MMK)

1) Persiapan

- a) Mahasiswa yang berhak untuk mendaftar KKN-MMK adalah mereka yang telah lulus sekurang-kurangnya 120 SKS dibuktikan dengan transkrip nilai sementara yang sah.
- b) Mahasiswa membayar lunas komponen biaya KKN sesuai

dengan ketentuan yang berlaku di UIN Walisongo.

- c) Waktu pendaftaran peserta KKN-MMK diatur oleh institusi internal UIN Walisongo selaku yang mengusulkan program KKN-MMK dan LP2M UIN Walisongo.
- d) Peserta KKN-MMK boleh mengambil mata kuliah pada semester berjalan, dengan syarat pelaksanaan KKN-MMK tidak mengganggu kegiatan perkuliahan.
- e) Calon peserta KKN-MMK adalah kelompok mahasiswa yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan pada kesepakatan antara UIN dengan pihak ketiga calon lokasi KKN-MMK.
- f) Calon peserta KKN-MMK paling sedikit berasal dari dua program studi yang berbeda, baik dalam satu fakultas atau lintas fakultas di UIN Walisongo.
- g) Institusi internal UIN Walisongo (yang mengusulkan program KKN-MMK) mengajukan proposal rencana kegiatan KKN-MMK kepada LP2M UIN Walisongo.
- h) LP2M UIN Walisongo akan menjadwalkan seminar proposal KKN-MMK.
- i) Seluruh mahasiswa calon peserta KKN wajib hadir dalam seminar proposal.
- j) Institusi internal UIN Walisongo (pengusul KKN) menyampaikan paparannya di depan tim penilai (ad hoc) yang ditunjuk oleh LP2M UIN Walisongo.
- k) Evaluasi proposal meliputi beberapa aspek kesesuaian proposal dengan kebijakan umum KKN UIN Walisongo, kesesuaian program kerja dengan disiplin ilmu pengusul,

biaya KKN Mandiri, alokasi waktu, dan kapasitas dukungan dari pihak lain.

- l) Hasil seminar proposal akan menggambarkan tiga hal, *pertama*, PROPOSAL DITERIMA, *kedua* PROPOSAL DITERIMA BERSYARAT dan *ketiga* PROPOSAL DITOLAK.
 - m) Keputusan diterima atau ditolak menjadi kewenangan LP2M UIN Walisongo.
 - n) Apabila proposal DITERIMA BERSYARAT, maka institusi pengusul akan diberikan waktu untuk memperbaiki proposal paling lama 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak keputusan diberikan.
- 2) Pembekalan
- a) Peserta pembekalan KKN-MMK adalah mahasiswa yang dinyatakan telah memenuhi syarat administratif dan akademik sebagai peserta KKN-MMK oleh LP2M UIN Walisongo.
 - b) Kegiatan pembekalan KKN-MMK merupakan bagian yang tak terpisahkan dari rangkaian pelaksanaan KKN-MMK secara keseluruhan, oleh karenanya semua peserta KKN-MMK wajib hadir mengikuti pembekalan.
 - c) Tujuan pembekalan yaitu menciptakan kondisi siap mental, fisik dan konseptual bagi calon peserta KKN sebelum diterjunkan di lokasi KKN.
 - d) Materi pembekalan KKN-MMK terdiri dari beberapa hal, antara lain kebijakan KKN MMK, problematika dan analisa sosial, etika pengabdian masyarakat, teknis

keadministrasian dan keuangan serta teknis pelaporan, yang bertujuan untuk memantapkan kepribadian, memperluas dan memperkaya cakrawala pengetahuan tentang berbagai masalah, serta kemampuan dalam memecahkan masalah secara sistematis yang muncul pada waktu KKN-MMK berlangsung.

- e) DPL KKN-MMK wajib mendampingi proses pembekalan KKN Mandiri.
- f) Jadwal, acara, materi, dan narasumber pembelakan KKN sepenuhnya merupakan kewenangan LP2M UIN Walisongo untuk mengaturnya.

3) Pelaksanaan

- a) Pelaksanaan KKN-MMK diawali dengan penglepasan oleh Ketua LP2M atas nama Rektor UIN Walisongo.
- b) Waktu penglepasan disesuaikan dengan jadwal yang telah di atur oleh LP2M UIN Walisongo.
- c) Kegiatan KKN-MMK dilaksanakan dengan mengacu pada proposal KKN-MMK yang telah disetujui dalam seminar proposal KKN-MMK.
- d) Program kerja yang tertuang dalam proposal yang telah disetujui dapat dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi di lokasi KKN, dengan persetujuan DPL dan LP2M.
- e) Mahasiswa diizinkan untuk melaksanakan kegiatan tambahan yang berasal dari lembaga pemerintah dan lainnya (masyarakat), selama tidak bertentangan dengan kepentingan pembelajaran dan mengurangi keberhasilan

program kerja yang telah dicanangkan

- f) Dalam pelaksanaan kegiatan KKN-MMK, mahasiswa didampingi oleh seorang DPL (Dosen Pembimbing Lapangan) yang akan memberikan pengarahannya dan bimbingan, serta sebagai sumber konfirmasi.
 - g) Mahasiswa KKN-MMK WAJIB mengisi buku kegiatan yang telah disediakan oleh LP2M UIN Wali-songo, dan DPL berkewajiban untuk menganalisa tingkat keaktifan mahasiswa selama masa KKN-MMK.
 - h) Mahasiswa KKN-MMK WAJIB mentaati peraturan yang ditetapkan oleh LP2M UIN Walisongo, berikut norma etika yang berlaku di masyarakat.
 - i) Pelaksanaan KKN-MMK di lokasi minimal 45 (empat puluh lima) hari.
 - j) Setelah Mahasiswa melaksanakan kegiatan KKN-MMK selama waktu yang telah ditentukan, mahasiswa akan ditarik kembali oleh institusi pengusul internal UIN Walisongo atas nama LP2M.
- 4) Pelaporan dan Evaluasi
- a) Mahasiswa WAJIB menyusun laporan kinerja pelaksanaan KKN-MMK dan dimintakan persetujuan DPL dan pimpinan lembaga atau institusi tempat diselenggarakannya KKN-MMK.
 - b) Laporan kinerja pelaksanaan KKN-MMK diserahkan ke LP2M paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak mahasiswa ditarik oleh DPL dari lokasi KKN.
 - c) LP2M menyelenggarakan seminar hasil kinerja pelaksanaan

KKN-MMK sebagai forum evaluasi dan ke-mungkinan rencana tindak lanjut.

- d) DPL, pimpinan lembaga atau institusi tempat diselenggarakannya KKN-MMK, dan LP2M memberikan penilaian terhadap setiap mahasiswa peserta KKN-MMK secara proporsional.
- e) Setelah KKN-MMK selesai dilaksanakan, DPL dan LP2M akan melaksanakan rapat evaluasi yang mencakup dua agenda, yaitu; *pertama*, tingkat keberhasilan KKN-MMK yang telah selesai dilaksanakan, *kedua*, tingkat kepentingan penerjunan KKN-MMK Lanjutan pada lokasi yang sama.
- f) Apabila mahasiswa peserta KKN-MMK dinyatakan lulus maka LP2M menerbitkan sertifikat KKN.
- g) Institusi pengusul KKN-MMK menyerahkan laporan pelaksanaan KKN-MMK kepada Rektor melalui Ketua LP2M UIN Walisongo.

(4) KKN Mandiri Pengakuan (Kkn-Mp)

KKN Mandiri Pengakuan atau disingkat dengan KKN-MP merupakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan oleh mahasiswa yang berdasarkan pertimbangan dan kebijakan Ketua LP2M UIN Walisongo dapat diakui dan disamakan dengan kegiatan KKN reguler. Pelaksanaan KKN-MP dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Mahasiswa mengajukan permohonan KKN-MP ke LP2M dilampiri profil rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dan dokumen pendukung.
- 2) LP2M melakukan analisis kelayakan terhadap permohonan

KKN-MP. Hasil analisis dapat berupa LAYAK dan TIDAK LAYAK/DITOLAK.

- 3) Mahasiswa melaksanakan kegiatan pengabdian dan memberikan manfaat riil bagi masyarakat atau bagi bangsa Indonesia dalam situasi dan kondisi tertentu yang bersifat monumental dan insidental baik di tingkat regional, nasional maupun internasional. Kegiatan tersebut seperti keterlibatan mahasiswa dalam penanganan bencana alam, misi kemanusiaan internasional, kegiatan bela Negara, dan sebagainya.
- 4) Kriteria kegiatan pengabdian yang dapat diakui sebagai KKN-MP ini sepenuhnya berdasarkan pertimbangan dan kebijakan Ketua LP2M UIN Walisongo, setelah mendapatkan pertimbangan dari Tim ad-hoc yang dibentuk oleh LP2M.
- 5) Mahasiswa wajib menyusun laporan kinerja KKN-MP dan mempresentasikannya di kegiatan seminar hasil KKN-MP yang diselenggarakan oleh LP2M.
- 6) Mahasiswa membayar lunas biaya KKN sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN Walisongo.
- 7) LP2M UIN Walisongo membentuk tim penilai yang bertugas untuk memberikan pertimbangan kepada Ketua LP2M dalam memberikan pengakuan terhadap kegiatan tersebut sebagai KKN.
- 8) Tim penilai melakukan sidang dengan agenda mengkaji dan memberikan penilaian terhadap usulan yang diajukan oleh mahasiswa.
- 9) Tim penilai memberikan rekomendasi kepada Ketua LP2M tentang kelayakan usulan mahasiswa untuk diakui sebagai

KKN-MP. Rekomendasi yang diberikan tim berupa penilaian layak atau tidak layak.

10) Berdasarkan rekomendasi Tim penilai, LP2M memberikan jawaban terhadap usulan pengakuan KKN-MP. Jawaban LP2M berupa DIAKUI atau TIDAK DIAKUI. Apabila diakui, maka LP2M menerbitkan sertifikat KKN.

11) Penilaian KKN Mandiri

- a) Penilaian KKN Mandiri merupakan evaluasi yang ditujukan kepada mahasiswa dalam melaksanakan tugas KKNnya.
- b) Tujuan penilaian adalah untuk mengukur keberhasilan mahasiswa dalam pelaksanaan KKN Mandiri.
- c) Penilaian diberikan berdasar tahapan pelaksanaan KKN Mandiri, mulai persiapan, pembekalan, pelaksanaan KKN, dan laporan akhir.
- d) Aspek penilaian KKN Mandiri mencakup beberapa standar antara lain kegiatan persiapan dan pembekalan (bobot 10%).
- e) Pelaksanaan KKN (Bobot 80 %), meliputi: kehadiran di lokasi KKN Mandiri, kerjasama dalam pelaksanaan KKN Mandiri, kontribusi dalam mensukseskan program kerja KKN Mandiri, perilaku (akhlak) selama pelaksanaan KKN, integritas dan kekompakan tim KKN Mandiri, kreatifitas dan inovasi dalam pelaksanaan program kerja KKN, keberhasilan program kerja, dan kesesuaian dengan tema KKN Mandiri.
- f) Laporan Akhir (bobot 10%), meliputi: kesesuaian dengan

sistematika yang telah ditentukan, kelengkapan isi laporan, dan ketepatan waktu menyerahkan laporan akhir.

- g) Penilai kegiatan KKN Mandiri adalah DPL dan LP2M melalui pengamatan atau monitoring secara langsung maupun tidak langsung.
- h) Penilaian dilakukan dengan menjumlahkan semua aspek kegiatan yang dinilai terlebih dahulu, kemudian disesuaikan dengan bobot masing-masing.

12) Evaluasi KKN Mandiri

Evaluasi kegiatan KKN mandiri dilakukan oleh DPL dan LP2M UIN Walisongo dengan menggunakan indikator evaluasi sebagai berikut:

- a) Keberhasilan pelaksanaan program kerja.
- b) Keberhasilan pendekatan yang digunakan mahasiswa terhadap masyarakat.
- c) Kualitas dan kuantitas hasil program kerja yang diprakarsai oleh peserta KKN Mandiri.
- d) Pandangan dan respon masyarakat terhadap kegiatan KKN Mandiri.
- e) Perbandingan perubahan sikap dan masyarakat sebelum dan setelah kegiatan KKN mandiri dilaksanakan.
- f) Tingkat capaian dan target dalam KKN Mandiri.
- g) Administrasi pelaporan kegiatan KKN Mandiri.

(5) KKN Reguler²⁵

KKN merupakan kegiatan yang bersifat kolosal dan melibatkan banyak pihak, baik dari dalam maupun dari luar. Untuk itu perlu dibentuk Badan Pelaksana KKN (BP-KKN) UIN Walisongo yang diketuai oleh Ketua LP2M UIN Walisongo dengan dibantu oleh para Kepala Pusat, staf dan beberapa orang yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor UIN Walisongo. Untuk kegiatan operasional di lapangan BP-KKN dibantu oleh para Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) yang jumlah personilnya ditetapkan dengan SK Rektor.

Adapun tugas, wewenang dan tanggung jawab BP-KKN ialah:

- 1) Menetapkan program umum KKN
- 2) Mengadakan seleksi dan menetapkan peserta KKN serta penempatannya di lokasi.
- 3) Mengadakan konsultasi dan koordinasi dengan Pimpinan UIN Walisongo, Pemerintah Kabupaten beserta seluruh jajaran terkait.
- 4) Mengadakan studi kelayakan dan menetapkan lokasi KKN.
- 5) Menetapkan hak, kewajiban dan wewenang serta tanggung jawab DPL.
- 6) Menyelenggarakan orientasi bagi DPL.
- 7) Mengelola paket KKN UIN Walisongo.
- 8) Melaksanakan seluruh kegiatan KKN sejak persiapan, pelaksanaan, penarikan sampai dengan evaluasi akhir.

²⁵ Anonymous, *Buku Pedoman Kuliah Kerja Nyata (Kkn) Tematik Posdaya Berbasis Masjid Universitas Islam Negeri (UIN) Walisong Angkatan Ke-66 Tahun 2016*. (Semaarang: LP2M UIN Walisongo, 2016) hlm. 12-23

- 9) Menyelenggarakan komunikasi dan koordinasi dengan DPL dan peserta KKN.
- 10) Membuat dan menetapkan Buku Pedoman Pelaksanaan KKN.
- 11) Mendapatkan bantuan dari staf sekretariat sebagai pembantu operasional di bidang administrasi dan perlengkapan sesuai dengan kebutuhan.
- 12) Bertanggung jawab kepada Rektor tentang pelaksanaan KKN UIN Walisongo.
- 13) Membuat laporan akhir secara tertulis tentang pelaksanaan KKN

Tahap berikutnya mengadakan pembekalan peserta sebagai berikut:

- 1) Peserta pembekalan KKN adalah mahasiswa yang dinyatakan telah memenuhi syarat administratif dan akademik sebagai calon peserta KKN oleh BP-KKN.
- 2) Kegiatan pembekalan KKN merupakan bagian tak terpisahkan dari pelaksanaan KKN secara keseluruhan, oleh karena itu keikutsertaan calon peserta KKN pada kegiatan pembekalan akan menjadi bahan pertimbangan dalam penilaian akhir.
- 3) Setiap calon peserta KKN yang telah mengikuti pembekalan dengan mematuhi tata tertib serta memenuhi persyaratan lain akan ditetapkan sebagai peserta KKN UIN Walisongo Angkatan ke-66 Tahun 2016.
- 4) Materi pembekalan merupakan paket pendidikan dan latihan yang disesuaikan dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan pembangunan di desa secara umum dan tema KKN secara khusus.

Materi pembekalan terdiri dari tiga komponen yang menjadi

satu-kesatuan tak terpisahkan yaitu materi yang bertujuan untuk memantapkan kepribadian, memperluas dan memperkaya cakrawala pengetahuan tentang berbagai masalah, serta kemampuan dalam memecahkan masalah secara sistematis yang muncul pada waktu KKN berlangsung.

Narasumber pembekalan terdiri dari Pimpinan UIN Walisongo, Instansi Pemerintah Daerah, BP-KKN, dan lembaga lain yang relevan dengan tujuan pembekalan maupun tema KKN.

Metode yang digunakan dalam penyajian materi selama pembekalan adalah ceramah, tanya jawab, diskusi, penugasan dan role playing.

Pelaksanaan kegiatan KKN di lapangan berlangsung selama 45 hari. Pelaksanaan KKN di lokasi ditandai dengan pelepasan Tim KKN oleh Rektor dari kampus dan penerimaan Tim KKN oleh pejabat Pemerintah Daerah lokasi KKN. Akhir kegiatan KKN ditandai dengan penarikan Tim KKN dari lokasi oleh Rektor secara resmi.

Selama KKN berlangsung setiap mahasiswa tidak diperkenankan meninggalkan lokasi KKN kecuali dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Ditarik kembali oleh BP-KKN karena tidak mampu melaksanakan tugasnya; atau
- 2) Ditarik kembali oleh BP-KKN karena melanggar norma susila dan akhlaqul karimah; atau
- 3) Ditarik kembali karena tidak mentaati aturan yang telah ditetapkan BP-KKN; atau
- 4) Dialihkan ke lokasi lain oleh BP-KKN; atau

- 5) Mendapat tugas khusus di luar lokasi oleh BP-KKN; atau
- 6) Koordinator Desa (Kordes) perlu mengadakan konsultasi kepada DPL atau BP-KKN dalam rangka kegiatan KKN; atau
- 7) Sakit yang harus dirawat di luar lokasi KKN; dan

Secara teknis izin meninggalkan lokasi KKN sebagaimana di atas harus diketahui oleh Kordes, Kepala Desa dan DPL.

Setelah mahasiswa diserahkan oleh Rektor kepada Bupati setempat dan telah sampai di desa lokasi KKN masing-masing, maka pada minggu pertama setiap mahasiswa harus segera melakukan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Mengadakan pendekatan sosial dan orientasi wilayah melalui kunjungan perkenalan kepada keluarga tuan rumah, kepala desa beserta pamongnya, para tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat untuk membangun hubungan sosial secara baik dengan pihak masyarakat.
- 2) Mengadakan observasi mendalam guna memperoleh masukan yang lebih lengkap dan faktual dari berbagai pihak sebagai bahan penyempurnaan rancangan program kerja KKN yang telah disiapkan.
- 3) Untuk membangun komunikasi dan kerjasama yang sinergis – terutama dengan tokoh-tokoh masyarakat– maka peserta KKN perlu mengadakan ta'aruf dan musyawarah secara formal dalam forum *rembug desa* bersama Kepala Desa beserta pamongnya, BPD, LKMD, Pengurus PKK, Pengurus Karang Taruna, para tokoh agama, Pengurus Remaja Masjid, Pengurus Organisasi sosial keagamaan setempat, dan para tokoh masyarakat lainnya yang dipandang perlu Membuat papan

nama posko KKN dan penunjuk arah menuju posko tersebut yang berfungsi :

- a) Untuk mengenalkan kepada masyarakat bahwa di desa tersebut sedang ada kegiatan KKN.
- b) Untuk memudahkan petugas, baik dari Pemda maupun UIN Walisongo dalam menghubungi Tim KKN.
- c) Untuk memudahkan komunikasi apabila sewaktu-waktu dibutuhkan.

Penelitian dilakukan oleh peserta KKN di bawah bimbingan DPL sebagai bahan bagi mereka untuk menyusun program kerja. Penelitian oleh peserta KKN dilakukan melalui kegiatan observasi sebelum pembekalan KKN. Penelitian ini dimaksudkan agar peserta KKN mengenal dan menemukan kebutuhan dan masalah maupun fakta yang dihadapi oleh masyarakat di lokasi secara terperinci dan lengkap, meliputi segala persoalan dan kehidupan masyarakat desa yang sesungguhnya. Melalui penelitian akan diperoleh data tentang situasi, kondisi, potensi serta berbagai aspek kekuatan desa, maupun permasalahan kemasyarakatan.

Adapun yang menjadi sasaran dalam penelitian antara lain kondisi geografi dan monografi desa, kondisi sosial-keagamaan, kondisi budaya, ekonomi, pendidikan, adat istiadat, kesehatan, kehidupan kepemudaan, dan lain-lain yang erat kaitannya dengan masalah pembangunan desa.

1) Penyusunan program kerja :

Dalam menyusun program kerja, peserta KKN hendaklah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a) Tujuan dan kegunaan program, baik dalam program sektoral maupun lintas sektoral.
 - b) Latar belakang atau alasan pemilihan program.
 - c) Target yang hendak dicapai dengan mempertimbangkan alokasi waktu yang tersedia. Oleh karena itu buatlah *time schedule* yang benar-benar terencana dan terukur.
 - d) Sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
 - e) Sesuaikan dengan dana yang tersedia dan kemampuan swadaya masyarakat setempat.
 - f) Sesuaikan dengan kemampuan pelaksana (SDM) mahasiswa KKN.
 - g) Sesuaikan dengan sarana dan prasarana pendukung yang tersedia.
 - h) Memperhatikan masukan dan saran dari masyarakat.
- 2) Pelaksanaan program kerja :
- Agar rencana program kerja yang telah disusun dapat dilaksanakan secara optimal, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut :
- a) Distribusi tugas, fungsi dan tanggung jawab yang jelas antar peserta.
 - b) Selalu melibatkan peran serta masyarakat
 - c) Selalu melibatkan peran serta tokoh agama, tokoh masyarakat, dinas dan instansi yang terkait dengan program.
 - d) Memberdayakan lembaga-lembaga yang sudah ada seperti BPD, PKK, Karang Taruna, Takmir Masjid, Remaja Masjid, Lembaga Pendidikan, dll.

- e) Mengedepankan sikap saling membantu dan bekerjasama antar peserta KKN sesuai dengan tugas, fungsi dan tanggung jawab masing-masing.
- f) Mengadakan rapat koordinasi setiap pagi sebelum mulai melaksanakan program kerja pada hari tersebut untuk menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan.
- g) Mengadakan rapat evaluasi tiap malam untuk menilai hasil pelaksanaan program yang telah dilakukan.
- h) Mendokumentasikan setiap kegiatan KKN terutama yang memiliki nilai monumental untuk keperluan visualisasi pada saat kunjungan Rektor dan Bupati di lokasi KKN, serta untuk lampiran laporan akhir KKN.
- i) Mencatat semua proses pelaksanaan program dan aktivitas KKN setiap hari ke dalam buku harian sebagai bahan pembuatan laporan akhir kegiatan KKN.
- j) Meminta tanda tangan DPL pada buku catatan harian ketika dilakukan monitoring di lokasi KKN.

Menyusun laporan akhir kegiatan KKN dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan pada Buku Pedoman KKN. Laporan diharapkan sudah selesai meskipun belum sempurna dan sudah ditandatangani oleh Kades sebelum meninggalkan lokasi KKN.

Dalam pelaksanaan KKN, ditetapkan beragam program umum oleh Pusat PPM UIN Walisongo. Program umum tersebut sebagai berikut:

- 1) Selaras dengan visi dan misi UIN Walisongo sebagai lembaga pendidikan tinggi keagamaan Islam, maka pada dasarnya kegiatan KKN dititikberatkan pada sektor pembangunan dalam

bidang keagamaan. Namun hal ini tidak berarti mengabaikan bidang-bidang yang lain.

- 2) Mengingat dan memperhatikan tujuan KKN serta segi kemampuan dan keterbatasan peserta KKN, maka program KKN sebaiknya diarahkan dalam bidang non fisik, baik sektoral maupun lintas sektoral.
- 3) Secara umum garis-garis besar kegiatan KKN UIN Walisongo diklasifikasikan sebagai berikut :
 - a) Sektoral fisik, yakni program kegiatan yang berbasis pada kompetensi keilmuan mahasiswa yang diwujudkan dalam bentuk fisik, antara lain meliputi :
 - (1) Peningkatan/optimalisasi fungsi fisik sarana peribadatan (masjid dan musholla)
 - (2) Peningkatan/optimalisasi fungsi fisik sarana pendidikan Islam (Madin, TPQ, dll)
 - (3) Peningkatan/optimalisasi fungsi fisik sarana sosial keagamaan Islam lainnya
 - b) Lintas sektoral fisik, yakni program kegiatan yang tidak berbasis pada kompetensi keilmuan mahasiswa yang diwujudkan dalam bentuk fisik, antara lain meliputi :
 - (1) Peningkatan/optimalisasi fungsi fisik sarana /fasilitas umum.
 - (2) Pemberian stimulan dalam bentuk fisik bagi kegiatan tertentu yang memiliki nilai strategis bagi masyarakat; seperti sarana olah raga, seni, budaya, ketrampilan, dll.

- c) Sektoral Non fisik, yakni program kegiatan yang berbasis pada kompetensi keilmuan mahasiswa yang diwujudkan dalam bentuk non fisik, antara lain meliputi :
- (1) Pemberdayaan dan pembinaan kelembagaan masjid dan musholla, seperti ketakmiran, remaja masjid, perpustakaan masjid, lembaga kajian/dakwah, dll.
 - (2) Pemberdayaan dan pembinaan kelembagaan Islam, seperti madrasah diniyah, pesantren, TPQ, dll
 - (3) Pemberdayaan dan pembinaan kehidupan keberagaman masyarakat.
 - (4) Pemberdayaan dan pembinaan potensi-potensi dan kreativitas keagamaan masyarakat.
 - (5) Pembinaan mental spiritual dan moral generasi muda.
 - (6) Partisipasi dalam kegiatan sosial keagamaan.
- d) Lintas sektoral non fisik, yakni program kegiatan yang tidak berbasis pada kompetensi keilmuan mahasiswa yang diwujudkan dalam bentuk non fisik, antara lain meliputi :
- (1) Bimbingan peningkatan kesadaran bernegara dan berbangsa.
 - (2) Pemberdayaan potensi SDA dan SDM masyarakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan ekonomi dan menunjang pelaksanaan pembangunan.
 - (3) Bimbingan dan penyuluhan program peningkatan keluarga sehat sejahtera.
 - (4) Penyuluhan dan pembinaan kesehatan masyarakat.
 - (5) Pemberdayaan remaja, pemuda dan peningkatan peranan wanita.

- (6) Pembinaan olah raga dan seni budaya.
- e) Untuk penjabaran dari program umum tersebut maka dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi desa setempat.
- f) Dalam rangka penyusunan program agar benar-benar aplikatif hendaknya dikoordinasikan, dikonsultasikan dan dimusyawarahkan dengan pihak-pihak terkait, seperti aparat desa setempat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.

Diakhir kegiatan KKN dilakukan penyusunan laporan KKN. Laporan program KKN adalah blangko (form) isian program kerja umum KKN yang harus diisi dengan rencana program kerja Tim KKN selama berada di lapangan. (Model A 1). Isi laporan model ini juga harus ditulis di media yang lebih besar, misalnya pada kertas karton manila sebagai *time schedule* dan ditempel pada tempat yang mudah dilihat di posko KKN setelah lebih dahulu ditandatangani oleh Kordes, DPL dan Kepala Desa setempat.

Program kerja ini hendaknya cukup jelas, mencakup jenis kegiatan, waktu dan tempat pelaksanaan, anggaran biaya, sehingga orang yang membaca akan memahami dengan mudah.

C. Pengabdian kepada Masyarakat di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

1. Implementasi Pengabdian kepada Masyarakat di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Program pengabdian di UIN Sunan kalijaga Yogyakarta sama dengan program pengabdian di beberapa tempat PTKIN yang

diteliti, yaitu diimplementasikan bagi dosen dan bagi mahasiswa. Pelaksana kegiatan pengabdian adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M). Visi dari LP2M UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta adalah Menjadi lembaga penelitian bertaraf internasional dan pengabdian yang dekat dan kontributif bagi kemajuan dan kemandirian masyarakat. Sedangkan misi adalah

1. Meningkatkan kualitas penelitian agar menghasilkan riset-riset berkualitas internasional serta riset yang berbasis masyarakat.
2. Mengubah paradigma lama “pengabdian masyarakat” menjadi “kemitraan universitas dan masyarakat” melalui melalui penguatan kepemimpinan di masyarakat dan universitas.
3. Menciptakan lingkungan akademis yang inklusif, yang menghapus hambatan fisik, akademis dan sosial serta menguatkan kesadaran di kalangan universitas dan masyarakat luas tentang perlunya kesamaan kesempatan di segala bidang.
4. Memperkuat fungsi tridharma perguruan tinggi sehingga terjadi sinergi antara pendidikan, riset dan kemitraan universitas dengan masyarakat.

Sejalan dengan visi dan misi pengabdian kepada masyarakat, program pengabdian dosen di UIN Suka Yogyakarta lebih menitikberatkan kepada program pemberdayaan masyarakat dengan pola KUM, yakni kemitraan universitas dan masyarakat dengan program Karya Pengabdian Dosen.²⁶

2. Bentuk dan Model Implementasi PkM

a. KKN

²⁶ Wawancara dengan Fatiman, ketua LP2M UIN Yogyakarta, 12 Juli 2016. Tentang apa dan bagaimana kegiatan pengabdian dosen ini ketua LP2M waktu itu tidak banyak memberikan gambaran.

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan kegiatan akademik di lapangan dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat yang wajib diikuti oleh setiap mahasiswa S1 untuk mengembangkan kemampuan berkehidupan masyarakat sesuai dengan kompetensi program studi masing-masing. Menurut Buku Panduan Akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Nama KKN UIN Yogyakarta adalah KKN Integrasi-Interkoneksi yang diimplementasikan dalam bentuk KKN Tematik.

Kegiatan KKN bersifat mengintegrasikan dan menginterkoneksi berbagai aspek kemampuan untuk diaplikasikan dalam pengembangan masyarakat dengan bimbingan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL). Secara teknis, pelaksanaan KKN dilakukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) bekerjasama dengan Fakultas di lingkungan UIN Sunan

Kalijaga Yogyakarta. Syarat mengikuti KKN adalah terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada semester yang sedang berjalan, mahasiswa telah lulus sekurang-kurangnya 110 sks atau 80% dari sks yang wajib ditempuh, mncantumkan KKN dalam Kartu Rencana Studi (KRS), tidak boleh mengambil mata kuliah lain, kecuali Skripsi/Tugas Akhir.

Pada tahun ajaran 2011/2012, KKN UIN Sunan Kalijaga angkatan ke-77 menggunakan sistem KKN Integrasi-Interkoneksi tematik Posdaya. Tematik Posdaya ini diamanatkan kepada mahasiswa untuk mensukseskan pencapaian pembangunan milenium (MDG's) tahun 2015. Adanya kerjasama antara Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan Yayasan Damandiri bertujuan mengembangkan jaringan pelaksanaan pembangunan di tingkat

pedesaan dan pedukuhan dalam bentuk Pos Pemberdayaan keluarga, yang disingkat POSDAYA.

Menurut Wildan, untuk tahun ini (2016) konsep pos daya ditiadakan, karena berkaca pada tahun lalu yang tidak sukses. Tidak semua desa cocok dengan konsep ini, yang mana berpaku pada keluarga-keluarga.²⁷ Konsep KKN sekarang yakni integrasi-interkoneksi. “Pemberdayaan masyarakat menyesuaikan potensi-potensi yang ada di masyarakat dan tentunya mengutamakan kegiatan keagamaan. Pelaksanaan KKN dilakukan selama 30 hari, yang mana telah dilakukan survei selama seminggu sebelum hari penerjunan ke lapangan. Dari survei tersebut selanjutnya bisa membuat Rancangan Program Kerja (RKP).

Waktu yang hanya 30 hari menurut ketua LP2M, Fatiimah bahwa secara hitungan akademik itu sudah memenuhi 4 SKS. “Sudah dikonsultasikan kepada pihak untuk porsi proker sendiri tentu menjadi berkurang, totalnya enam, yakni empat proker untuk kelompok, dua proker individu.

Selain itu, di UIN Yogyakarta dilakukan KKN semester pendek angkatan 89, sejumlah 1222 mahasiswa telah diterjunkan ke masyarakat sejak tanggal 20 Juni 2016 yang berlokasi di Kulonprogo. Dengan pembagian wilayah antara lain Galur, Kokap, dan Kalibawang. Periode angkatan 90 akan diterjunkan sebanyak 1500 mahasiswa pada tanggal 20 Juli 2016 yang berlokasi di Gunung Kidul dan Sleman. Untuk pembagian daerah yang akan ditempati untuk yang berlokasi di Gunung Kidul antara lain

²⁷ Wawancara dengan Wildan, Sekretaris LP2M UIN Yogyakarta, 12 Juli 2016

Panggung dan Saptasari, dan yang berlokasi di Sleman bertempat di Turi dan Pakem.²⁸

Dengan mengacu pada buku panduan KKN UIN Kalijaga Yogyakarta diperoleh penjelasan bahwa KKN di UIN Yogyakarta terdiri dari beberapa bentuk, yaitu :²⁹

1) KKN Reguler

KKN reguler dilaksanakan secara rutin pada setiap gasal, genap dan semester pendek dengan ketentuan dan persyaratan umum. Adapun KKN reguler ini dibagi ke dalam dua macam, yaitu integrasi-interkoneksi dan Posdaya Berbasis masjid.

2) KKN Integrasi-Interkoneksi

Jenis atau model KKN reguler integrasi-interkoneksi memiliki beberapa prinsip. *Pertama, co-integration-interconnection* (pemaduan-pengaitan bersama), yang dilaksanakan berdasarkan pada suatu tema dan program yang merupakan gagasan pemaduan-pengaitan bersama antara universitas (dosen, mahasiswa, prodi) dengan Pemerintah Daerah, mitra kerja dan masyarakat di lokasi setempat.

Kedua, co-sinergy (sinergi bersama), yang dilaksanakan dengan mensinergikan sumber daya manusia, sumber dana bersama, dan segala potensi yang ada antara mahasiswa pelaksana, universitas dengan pihak Pemerintah Daerah, mitra kerja dan masyarakat di lokasi setempat disesuaikan dengan tema program yang telah disepakati bersama.

²⁸ Wawancara dengan Fatimah, Ketua LP2M UIN Yogyakarta, 12 Juli 2016

²⁹ Anonimous, *KKN Integrasi Interkoneksi*. (Yogyakarta: LP2M UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016), hlm 23-44

Ketiga, intensive cooperation (kerjasama intensif), yang dilaksanakan dengan *win-win solution* intensif antara mahasiswa pelaksana, universitas dengan pihak Pemerintah Daerah, mitra kerja dan masyarakat di lokasi setempat.

Keempat, sustainability (berkesinambungan), yang dilaksanakan secara terus-menerus berdasarkan suatu tema dan program yang sesuai dengan tempat lokasi KKN dan target tertentu.

Berdasarkan prinsip-prinsip di atas, maka aktivitas perkuliahan mahasiswa di lapangan dalam bentuk pengabdian untuk membantu masyarakat dalam memecahkan permasalahan pembangunan serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan SD G's (*Sustainable Development Goals*). Bentuk kegiatan ini mengintegrasikan dan menginterkonesikan antar-kedua kegiatan KKN-LPM yang dilakukan mahasiswa dengan pemanfaatan dan pengalaman IPTEKS sesuai dengan Pancasila.

3) KKN Posdaya Berbasis Masjid

Pos pemberdayaan masyarakat (Posdaya) pada prinsipnya hendak memperkuat fungsi-fungsi keluarga agar setiap keluarga memiliki ketahanan lahir batin dalam menopang tujuan pembangunan bangsa Indonesia. Posdaya dengan demikian adalah lembaga masyarakat yang berfungsi sebagai forum silaturahmi, advokasi, komunikasi, edukasi dan wadah kegiatan penguatan fungsi-fungsi keluarga secara terpadu yang dilaksanakan dari, oleh, dan untuk keluarga serta masyarakat.

Posdaya bukan lembaga pesaing atau pengganti lembaga kemasyarakatan yang sudah ada, melainkan forum untuk mengembangkan kegiatan yang terpadu dan dinamis, mem-

berdayakan keluarga agar tanggap, berani mengambil prakarsa dan bekerja keras dalam pembangunan dengan partisipasi yang lebih merata. Dalam arti yang lebih sempit, Posdaya merupakan forum gotong royong untuk memperkuat fungsi keluarga dalam rangka meningkatkan indeks pembangunan manusia.

Posdaya memiliki banyak basis, di antaranya adalah masjid yang menyimpan potensi besar sebagai pusat gerakan masyarakat, umat muslim pada umumnya. Indikator ini dapat diperhatikan pada pengembangan peran dan fungsi masjid sebagaimana era Rasulullah, antara lain: *pertama*, pusat pendidikan seumur hidup; *kedua*, medan budaya untuk menyegarkan modal sosial dalam kontribusinya membangun peradaban; *ketiga*, penggalangan sumber dana masyarakat lebih akuntabel dan transparan; *keempat*, media mobilisasi umat untuk dakwah dalam berbagai bentuknya; kelima, sarana membangun komunikasi intensif dalam relasi sosial para jama'ahnya melalui waktu shalat, serta menjadi pusat pemecahan masalah umat dalam berbagai aspek kehidupan termasuk pengentasan kemiskinan.

Tujuan pembentukan dan pengembangan Posdaya berbasis masjid melalui KKN dibangun dari kehendak untuk mengintegrasikan gagasan pemakmuran masjid dan mengembalikan fungsi masjid sebagaimana zaman Rasulullah sebagai pusat kegiatan sosial, ekonomi, kebudayaan, kesehatan, dan berbagai kepentingan jamaah dengan tujuan kemaslahatan. Mahasiswa berperan sebagai kelompok pendamping masyarakat dengan posisi kemitraan bersama jamaah.

Keluarga yang menjadi sasaran kegiatan Posdaya berbasis masjid ini dildasifikasi dalam lima kelompok keluarga sejahtera, yaitu:

a. Keluarga Pra Sejarah (PS): apabila kondisi keluarga tidak memenuhi semua unsur criteria Keluarga Sejahtera I (KS) apabila kondisi keluarga memenuhi semua 6 unsur berikut:

- (1) Pada umumnya anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih;
- (2) Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk kegiatan di rumah, untuk bekerja, sekolah dan bepergian;
- (3) Rumah yang ditempati keluarga memiliki atap, lantai dan dinding yang baik;
- (4) Apabila ada anggota keluarga yang sakit dibawa ke sarana kesehatan (bukan dukun/tabib);
- (5) Apabila pasangan subur (usia istri 15-49 tahun) ingin ber-KB pergi ke sarana kesehatan;
- (6) Semua anak berusia 7-15 tahun bersekolah.

b. Keluarga Sejahtera II (KS 2): apabila kondisi keluarga memenuhi 6 unsur KS 1 ditambah dengan 8 unsur berikut:

- (1) Pada umumnya anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing;
- (2) Seluruh anggota keluarga makan daging/teludikan, paling kurang seminggu sekali;
- (3) Seluruh anggota keluarga memperoleh pakaian baru, paling kurang satu stel dalam setahun;
- (4) Luas lantai rumah paling kurang 8 M² untuk setiap (1 orang) penghuni rumah;

- (5) Tiga bulan terakhir, semua anggota keluarga dalam keadaan sehat sehingga dapat menjalankan fungsi masing-masing;
 - (6) Ada seorang atau lebih anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh penghasilan;
 - (7) Seluruh anggota keluarga usia 10-60 tahun bisa baca tulisan latin;
 - (8) Pasangan usia subur (usia istri 15-49 tahun) dengan anak 2 atau lebih menggunakan alat/obat kontrasepsi KB.
- c. Keluarga Sejahtera III (KS 3): apabila kondisi keluarga memenuhi 6 unsur KS 1 dan memenuhi 8 unsur KS 2 serta ditambah dengan semua 5 unsur berikut:
- (1) Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama;
 - (2) Sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam **bentuk** uang atau barang;
 - (3) Ada waktu bersama segenap anggota keluarga untuk komunikasi, paling kurang seminggu sekali, misalnya makan bersama, nonton bersama, jalan-jalan bersama, dan lain-lain;
 - (4) Keluarga sering ikut dalam kegiatan masyarakat di sekitar lingkungan tempat tinggal;
 - (5) Keluarga memperoleh informasi dari surat kabar, majalah, TV, radio, dan media elektronik lainnya;
- d. Keluarga Sejahtera III plus (KS 3+): apabila kondisi keluarga memenuhi 6 unsur KS1, memenuhi 8 unsur KS 2, dan memenuhi 5 unsur KS 3 serta ditambah dengan 2 unsur, yaitu:
- (1) Keluarga secara teratur dan sukarela (bukan iuran wajib) memberikan sumbangan material untuk kegiatan sosial.

(2) Ada anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus perkumpulan sosial/yayasan/institusi masyarakat.

4) KKN Non-reguler

KKN non-reguler dilaksanakan tidak berdasarkan kalender akademik semester pendek atau masa liburan, tetapi dapat dilaksanakan oleh mahasiswa saat kegiatan aktif kuliah, atau dengan kata lain, mahasiswa dapat melaksanakan KKN sambil mengikuti kuliah reguler pada umumnya. Adapun KKN Non-reguler ini dibagi ke dalam empat macam, yaitu Mandiri, Tematik, Mandiri Konversi, dan Internasional.

Adapun ketentuan syarat secara khusus sebagai berikut:

- a) Jumlah mahasiswa 10-12 orang perkelompok,
- b) Membentuk kelompok dan termasuk menentukan lokasi serta mengusulkan DPL sendiri,
- c) Mahasiswa telah mempunyai program kegiatan untuk KKN berupa proposal,
- d) Anggota kelompok terdiri dari (minimal) 2 fakultas dan 3 prodi;
- e) Dapat dilakukan oleh perseorangan atau kurang dari 10 orang pada jenis KKN Mandiri Konversi dan KKN Internasional.

5) KKN Mandiri

KKN Mandiri adalah kegiatan pengabdian masyarakat yang diinisiasi sendiri oleh mahasiswa, baik waktu maupun program kegiatannya. KKN Mandiri ini, dengan kata lain, program kegiatan dan waktu volume pelaksanaannya didasarkan pada proposal yang

disusun oleh talon peserta KKN dengan bimbingan DPL dan atas persetujuan LP2M.

Secara umum, prosedur yang harus dilakukan adalah mahasiswa mengajukan perencanaan kegiatan secara lengkap dengan membuat proposal kepada LP2M UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta berikut kebutuhan dananya. Lokasi dipilih berdasarkan pada fenomena dan kebutuhan masyarakat mitra dampingan yang telah direncanakan oleh mahasiswa.

LP2M akan melihat tingkat kesiapan program dan biaya yang dibutuhkan. Selain itu, dalam proses ini akan disesuaikan dengan kompetensi mahasiswa. Program kerja KKN Mandiri yang diajukan oleh mahasiswa harus memiliki kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dalam berbagai bidang, seperti agama, kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan infrastruktur sekaligus menjawab problematika yang ada dalam masyarakat sebagai calon mitra dampingan secara mandiri.

Pelaksanaan KKN Mandiri dilakukan oleh mahasiswa dengan sumber biaya sepenuhnya dari mahasiswa. Mahasiswa diberi kebebasan untuk menggali biaya dari sponsorship, donatur, dan pihak-pihak lain dengan sepengetahuan DPL atau LP2M.

6) KKN Tematik

KKN Tematik merupakan KKN Mandiri yang program kegiatan, waktu, dan volume pelaksanaannya didasarkan pada proposal yang disusun dan diusulkan oleh institusi internal UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta atau berdasarkan permintaan khusus dari sebuah lembaga, sebagai implementasi dari kegiatan pengabdian

kepada masyarakat dengan melibatkan mahasiswa sesuai dengan visi-misi kampus.

KKN Tematik dilaksanakan atas dasar tindak lanjut kerjasama (MoU) antara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan instansi, lembaga, organisasi, kelompok masyarakat, badan usaha, dan sejenisnya. Institusi internal UIN Sunan Kalijaga sebagai pengusul atau menyusun proposal kegiatan KKN yang akan dilaksanakan dan berkoordinasi dengan LP2M. Pihak LP2M kemudian menyelenggarakan seminar proposal KKN Tematik untuk mendapatkan masukan demi penyempurnaan proposal.

Biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan KKN Tematik dibebankan kepada pihak ketiga dan mahasiswa secara proporsional, sedangkan pengelolaan administrasi dan keuangan oleh lembaga pengusul KKN Tematik dan mahasiswa secara proporsional. Artinya, pengusul dan mahasiswa diberi kebebasan untuk menggali biaya dari sponsorship, donatur, dan pihak-pihak yang siap mendukung program KKN jenis ini.

7) KKN Mandiri-Konversi

KKN Mandiri Konversi atau disingkat KKN -MK merupakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan oleh mahasiswa berdasarkan pertimbangan dan kebijakan Ketua LP2M UIN Sunan Kalijaga dan dapat diakui serta disamakan dengan kegiatan KKN reguler. Kegiatan pengabdian yang telah dilakukan mahasiswa memberikan manfaat riil bagi masyarakat atau bagi bangsa Indonesia dalam situasi dan kondisi tertentu yang bersifat monumental dan insidental baik di tingkat regional, nasional, dan internasional.

Kegiatan tersebut seperti keterlibatan mahasiswa dalam penanganan bencana alam, misi kemanusiaan, kegiatan bela negara, dan sebagainya. Kriteria kegiatan pengabdian yang dapat diakui sebagai KKN ini sepenuhnya menjadi wewenang LP2M UIN Sunan Kalijaga berdasarkan rekomendasi dari tim penilai *ad hoc* yang ditunjuk oleh LP2M. Untuk mendapatkan pengakuan kegiatan yang telah dilaksanakannya sebagai KKN Mandiri, mahasiswa mengajukan permohonan kepada rektor c.q. Ketua LP2M dengan melampirkan laoran lengkap kegiatan yang telah dilaksanakannya, nilai dari penyelenggara (jika ada), berikut manfaat dari kegiatan yang telah dilaksanakan dengan disertai bukti pendukung.

8) KKN Internasional

KKN internasional merupakan jenis KKN “rintisan baru” di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang jika dilihat dari lokasi pengabdian, tidak di daerah dalam negeri, tetapi justru di luar negeri. Bentuk-bentuk pengabdian ini tentu saja tidak sebagaimana dilakukan model KKN yang lazim dilaksanakan di dalam negeri, tetapi bisa melalui kegiatan-kegiatan khusus, seperti sebagai relawan kemanusiaan di negara konflik atau aktivitas dakwah sebagai penceramah dalam waktu tertentu secara *continue* dan telah memenuhi syarat jangka waktu KKN selama 30 hari.

Secara umum, KKN ini mirip dengan jenis KKN non reguler tematik, tetapi ada beberapa perbedaan. KKN Internasional tidak dilaksanakan secara mandiri berdasarkan pengajuan proposal dari peserta atau mahasiswa tetapi sudah terprogram dengan jalinan

tertentu yang memungkinkan untuk melaksanakan KKN internasional.

3. Metode PkM di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Metode pelaksanaan KKN di UIN Sunan Kalijaga dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu tahapan pembekalan, studi kelayakan dan penyusunan rencana kerja dan pelaksanaannya dilokasi.

a. Tahap Pembekalan

Sebelum KKN dilaksanakan, mahasiswa diharuskan mengikuti pembekalan. Tujuan dilakukan pembekalan yaitu untuk memberikan penjelasan kepada mahasiswa tentang paradigma dan filosofi KKN, memberikan pengertian bagi mahasiswa tentang kebijakan seputar KKN dan juga macam-macam KKN, memberikan pemetaan aset mappingnya dan penyusunan rencana program kerja, memberikan pengetahuan kepada mahasiswa tentang orientasi dan studi lapangan sebelum pelaksanaan KKN dan memberikan pengetahuan sosial kemasyarakatan kepada calon peserta KKN mengenai problematika, pendekatan dan pemecahannya.

b. Studi kelayakan dan Penyusunan Rencana Kerja

Studi kelayakan dilakukan oleh mahasiswa KKN di bawah bimbingan DPL sebagai bahan bagi mahasiswa dalam rangka menyusun program kerja kolektif dan individual. Studi kelayakan dimaksudkan agar mahasiswa mengenal dan menemukan data di lokasi secara terperinci dan lengkap, meliputi potensi, kebutuhan, masalah dan tantangan yang dihadapi masyarakat.

Ada dua macam data yang diperlukan untuk pembuatan rencana program kerja KKN, yaitu data umum dan data khusus. Data umum antara lain berupa kondisi geografi dan monografi desqa, perekonomian, perikanan, peternakan, perdagangan dan sebagainya. Adapun data khusus yaitu data pemetaan sarana kegiatan berupa kondisi keagamaan yang meliputi aktivitas ibadah, pendidikan keagamaan dalam kluarga, kelompok keluarga dewasa, remaja dan anak, kelompok keluarga berdasarkan pekerjaan dan lembaga yang ada di bawah lokasi KKN, seperti masjid, pesantren sekolah, madrasah dan sebagainya.

Kemudian disusun suatu daftar interview, daftar isian atau buku rekapitulasi untuk selanjutnya dipetakan. Adapun cara mengkaji potensi dan masalah di lokasi KKN dapat dilakukan dengan dua model teknik kaji tindak, yaitu teknik pemetaan dan transek (penelusuran)

c. Pelaksanaan di lokasi

Langkah pertama melakukan pelepasan peserta KKN, pemberangkatan peserta ke lokasi dan penerimaan mahasiswa di lokasi. Selama di lokasi KKN, mahasiswa peserta KKN wajib mematuhi tata tertib peserta sebagai berikut:

- 1) Peserta KKN wajib melaksanakan tugas-tugas KKN dengan penuh tanggungjawab dan dedikasi yang tinggi;
- 2) Peserta KKN wajib menghayati dan menyesuaikan diri dengan kehidupan di lokasi KKN sejauh tidak melanggar tuntunan agama dan norma lainnya;
- 3) Peserta KKN yang meninggalkan lokasi selama berlangsungnya KKN harus pamit pada induk semang, bila meninggalkan lokasi

tanpa alasan yang dapat dibenarkan, dikategorikan absen di lokasi dan akan mendapat sanksi;

- 4) Peserta KKN harus bersikap sopan, berpakaian rapi dan senantiasa menjunjung tinggi nama baik almamater;
- 5) Pada waktu melaksanakan kegiatan resmi peserta KKN harus mengenakan jaket almamater;
- 6) Peserta KKN wajib membawa Kartu Peserta KKN yang dikeluarkan Panitia Pelaksana KKN;
- 7) Dilarang mengangkat tema-tema sensitif dan mengandung masalah SARA yang membahayakan ukhuwah Islamiyah dan keutuhan NKRI;
- 8) Peserta KKN setelah berada di lokasi menjadi tanggungjawab DPL. Oleh karena itu peserta KKN tidak diperkenankan berhubungan langsung dengan Panitia Pelaksana KKN, tetapi harus melalui DPL (kecuali dalam keadaan darurat), begitu pula segala bentuk hubungan ke luar harus sepengetahuan/seizin DPL. Semua urusan surat menyurat yang penning yang berhubungan dengan kegiatan KKN baik ke luar maupun ke dalam harus diketahui dan ditandatangani oleh DPL;
- 9) Peserta KKN supaya mengadakan pertemuan kelompok secara rutin dan terjadwal untuk mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja, baik kolektif maupun individual. Pertemuan rutin dan terjadwal juga diadakan antarkelompok dalam satu desa di bawah koordinasi Kordes, antarkordes dalam satu kecamatan di bawah koordinasi Korcam;
- 10) Peserta KKN dibenarkan memberikan keterangan pers kepada wartawan/media massa secara individu maupun kelompok;

11) Peserta KKN harus mentaati peraturan dan ketentuan seperti yang tercantum dalam surat izin pelaksanaan KKN yang diberikan oleh Pemkab/Pemkot setempat, antara lain:

- a) Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan yang berlaku;
- b) Tidak menyalahgunakan ijin untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan daerah setempat.

Sebagai upaya meningkatkan disiplin mahasiswa dalam mengikuti kegiatan KKN, serta mempertahankan citra UIN Sunan Kalijaga, maka pelaksanaan pemberian sanksi terhadap berbagai pelanggaran oleh para peserta selama mengikuti KKN diatur sebagai berikut :

- 1) Peringatan tingkat I diberikan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran ringan seperti:
 - a) Tidak mengisi presensi di lokasi yang telah disediakan.
 - b) Meninggalkan lokasi tanpa izin pada waktu kegiatan yang seharusnya atau sedang dilakukan sebanyak 1 x (satu kali).
 - c) Mengisi presensi harian melebihi tanggal/hari yang sedang berjalan.
- 2) Peringatan tingkat II diberikan kepada mahasiswa yang telah mendapatkan peringatan I tetapi masih tetap belum ada perbaikan atau tanpa peringatan tingkat I langsung akan memberikan peringatan II terhadap mahasiswa yang melakukan pelanggaran sedang seperti:
 - a) Meninggalkan lokasi melebihi izin yang diajukan, tetapi masih dalam batas toleransi.

- b) Meninggalkan lokasi tanpa izin pada waktu kegiatan seharusnya atau sedang dilakukan sebanyak 2 x (dua kali).
- 3) Keluarga/teman dari mahasiswa peserta KKN menginap di lokasi 2 malam atau lebih dengan alasan apapun.
- 4) Tidak dapat menghayati dan menyesuaikan diri dengan kehidupan di lokasi.
- 5) Peringatan tingkat II akan turut menentukan nilai akhir KKN, yang direkomendasikan oleh pejabat yang berwenang.
- 6) Peringatan tingkat III diberikan kepada mahasiswa yang melakukan perbuatan yang termasuk kategori pelanggaran ringan dan sedang dan telah mendapat peringatan tingkat I dan II, tetapi belum ada perbaikan, atau tanpa peringatan terlebih dahulu akan langsung diberi Peringatan tingkat III terhadap mahasiswa yang melakukan pelanggaran berat, seperti:
 - a) Meninggalkan lokasi tanpa ijin pada waktu kegiatan seharusnya sedang dilakukan sebanyak 30% dari hari efektif pelaksanaan KKN;
 - b) Melakukan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan kriminal, tindakan asusila, kegiatan yang menyebabkan timbulnya keresahan masyarakat;
 - c) Mengeluarkan perkataan, pernyataan (tertulis atau lisan), sikap dan perbuatan yang oleh pejabat yang berwenang dianggap sebagai tindakan yang mencemarkan nama baik pemerintah setempat maupun almamater UIN Sunan Kalijaga.

Prosedur pemberian sanksi dengan peringatan tingkat III ini dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:

- 1) Mahasiswa yang bersangkutan akan dipanggil ke kantor Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Sunan Kalijaga oleh Panitia Pelaksana KKN. Kemudian dilakukan sidang untuk menetapkan sanksi yang akan diberikan kepada mahasiswa tersebut. Persidangan dihadiri oleh mahasiswa, DPL, Ketua Pusat Pengabdian kepada Masyarakat, dan Panitia Pelaksana KKN.
- 2) Apabila keadaan sangat memaksa maka sanksi terhadap pelanggaran berat ini dapat diberikan di lokasi dengan sekurang-kurangnya dihadiri oleh Panitia Pelaksana KKN, untuk mendapatkan pengesahan dari Ketua Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat;
- 3) Sanksi terhadap mahasiswa yang melakukan pelanggaran berat ini dapat berupa, antara lain:
 - a) Meneruskan kegiatan di lokasi, tetapi mendapatkan penurunan nilai; bila perlu sampai batas minimal kelulusan.
 - b) Penarikan dari lokasi (drop out KKN) dan diwajibkan mengikuti KKN pada Angkatan berikutnya dengan hak dan kewajiban yang sama dengan peserta KKN lainnya.
 - c) Direkomendasikan kepada Rektor dan tembusannya disampaikan kepada Dekan Fakultas yang bersangkutan untuk diberikan sanksi lainnya (skorsing dan sebagainya).

Peringatan tingkat III hanya dikeluarkan oleh Panitia Pelaksana KKN UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, setelah mendapat

laporan DPL yang bersangkutan, dan atau diketahui sendiri oleh Panitia Pelaksana secara langsung.

Kegiatan di lokasi merupakan pelaksanaan program kerja yang telah dirumuskan. Mahasiswa peserta KKN dalam melaksanakan kegiatan di lokasi bertindak sebagai motivator, dinamisator, menjadi dan memberi contoh serta sebagai koordinator. Kegiatan di lokasi dimulai sejak jam 08.00 sampai jam 22.00 atau menyesuaikan dengan kondisi setempat dan tidak ada hari libur. Tempat kegiatan pada umumnya mengambil tempat di kantor Kelurahan/Desa, Kantor Pedukuhan, Kantor RW/RT, Masjid, Langgar, Pesantren, Sekolah, Madrasah, Kantor Pemerintahan, Lapangan dan lain-lain. Materi yang diberikan kepada masyarakat melalui petunjuk populer yang mudah diterima. Secara nyata bidang-bidang yang ditangani dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk kegiatan:

- 1) Penyuluhan,
- 2) Bimbingan keagamaan,
- 3) Pengajian,
- 4) Pelatihan,
- 5) Percontohan,
- 6) Pendidikan kader,
- 7) Kursus,
- 8) Pengarahan,
- 9) Bimbingan belajar,
- 10) Peran serta aktif dalam kegiatan fisik.

Untuk lebih meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program kerja KKN di lokasi, perlu dan penting dilakukan

pengorganisasian peserta KKN di tingkat kelompok, desa/kelurahan, kecamatan, maupun kabupaten. Pengorganisasian tersebut sebagai berikut:

- 1) Para peserta dibagi dalam kelompok, setiap kelompok terdiri dari **10-12** peserta.
- 2) Setiap kelompok dipimpin oleh Ketua Kelompok yang dipilih oleh anggota kelompok.
- 3) Pada setiap desa/kelurahan dibentuk Koordinator Desa (Kordes) yang dipilih oleh Ketua Kelompok di desa/ kelurahan tersebut.
- 4) Pada setiap kecamatan dibentuk Koordinator Kecamatan (Korcem) yang dipilih oleh Ketua Kelompok di kecamatan tersebut.
- 5) Pada setiap kabupaten/kota dibentuk Koordinator Kabupaten/Kota (Korkab/Korta) yang dipilih oleh Ketua Kelompok di kabupaten/kota tersebut.

Program kerja yang telah ditetapkan memerlukan pelaksanaan yang tertib dan terorganisir sehingga memperoleh hasil konkrit, bukan lagi sebagai daftar keinginan belaka. Untuk merealisasikan program kerja, baik kolektif maupun individual mahasiswa supaya memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1) Berpegang teguh kepada program kerja yang telah ditetapkan. Seandainya terjadi perubahan maupun penambahan, supaya dilaporkan kepada DPL dan dijelaskan dalam laporan.
- 2) Menetapkan mekanisme pelaksanaan program kerja secara tepat dan terpadu (meliputi organisasi pelaksana, pihak-pihak yang diajak, jadwal kegiatan).
- 3) Memperhatikan azas-azas manajemen antara lain (a) ketelitian,

- (b) keterkaitan, (c) disiplin waktu.
- 4) Bekerja secara terjadwal sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan Berusaha mencapai target yang telah ditetapkan semaksimal mungkin. Memperhatikan dana, sarana dan prasarana yang diperlukan.
 - 5) Melakukan koordinasi antara pelaksana program kerja individual dan kolektif dalam wujud pola koordinasi.
 - 6) Memantau dan mengawasi pelaksanaan program kerja.
 - 7) Selalu berkonsultasi dengan kepala Desa/Lurah, Perangkat Desa, Kecamatan, Takmir Masjid, Instansi terkait serta DPL.
 - 8) Khusus pelaksanaan Program kerja Kolektif, terlebih dahulu ditetapkan pola koordinasi oleh kelompok yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan hakekat KKN sebagai studi interdisipliner, sehingga peranan pola koordinasi sangat menentukan bagi suksesnya pelaksanaan program.
 - 9) Mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja individual dan kolektif paling sedikit sekali dalam 1 minggu atau setiap saat diperlukan. Tujuan pokok evaluasi, untuk mengetahui secara konkrit basil yang telah diperoleh serta hambatan yang dihadapi dan pemecahannya maupun faktor pendukung yang ada.
 - 10) Rencana Program Kerja (RPK) kolektif dan individu masing-masing digandakan 4 buah.

Untuk memantau pelaksanaan kegiatan KKN di lokasi yang dilaksanakan mahasiswa, setiap kelompok diwajibkan membuat laporan kegiatan KKN sebanyak 4 rangkap dalam blangko rekapitulasi hasil seluruh kegiatan KKN baik kolektif maupun

individu merupakan lampiran untuk laporan kolektif dan lampiran laporan anggaran dana stimulan KKN dapat dilihat pada lampiran 13. Setelah disahkan oleh Kepala Desa Lurah dan DPL, 1 (satu) exemplar untuk Panitia Pelaksana KKN, satu exemplar untuk DPL, dan satu exemplar lagi untuk arsip kelompok. Laporan Rekapitulasi ini diserahkan kepada Panitia Pelaksana KKN bersamaan dengan penyerahan Laporan Akhir KKN. Laporan Rekapitulasi Hasil Kegiatan KKN dimaksud mencakup hasil pelaksanaan program kerja kolektif dan individual (contoh blangko laporan hasil kegiatan KKN, lihat lampiran 12a dan 12b).

D. Pengabdian kepada Masyarakat di IAIN Syekh Nurjati Cirebon

1. Implementasi Pengabdian kepada Masyarakat di IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Penyelenggaraan KKN di IAIN Syekh Nurjati merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, terutama dharma pengabdian kepada masyarakat. dalam pelaksanaannya, prinsip efektivitas dan peningkatan kualitas penyelenggaraan yang meliputi persiapan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan dilalui dengan berbagai dinamika baik pada tataran konseptual maupun praktis di lapangan.

Berbagai model pendekatan dan metode penyelenggaraan KKN selama ini telah dilakukan, seperti model Kuliah Kerja Sosial Terpadu (KKST) dan KKN-PAR (*Participatory Action Research*). Model pertama berupaya memadukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan praktek pengalaman lapangan (PPL). Sementara

model yang kedua berupaya menggabungkan pengabdian kepada masyarakat dengan penelitian sekaligus.

Model KKN Tematik merupakan model ketiga yang menjadi pilihan paradigma KKN yang sedang dilakukan. Paradigma KKN model ini pada dasarnya diselenggarakan dalam rangka pengabdian kepada masyarakat berbasis *problem solving*. Pemecahan masalah diorientasikan pada tema tertentu. Pilihan tema ini dimaksudkan agar kegiatan mahasiswa terfokus untuk mengatasi masalah tertentu dan untuk mencapai target tertentu sesuai dengan permasalahannya.

KKN Tematik posdaya memiliki visi peningkatan keberdayaan masyarakat dalam mewujudkan masyarakat dengan memanfaatkan potensi SDM dan SDA lokal melalui pengembangan kewirausahaan, peningkatan pendidikan dan keterampilan, kesehatan serta pemberdayaan lingkungan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Visi ini dalam pelaksanaannya dilakukan melalui misi pembentukan dan pengembangan posdaya yang berfungsi sebagai wahana silaturahmi, komunikasi, informasi, edukasi dan partisipasi yang dilakukan secara gotong royong.

Pengabdian kepada Masyarakat di IAIN Syekh Nurjati Cirebon dilaksanakan dibawah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M), khususnya pusat pengabdian kepada masyarakat, dan dilakukan oleh sivitas akademik baik dosen atau mahasiswa. Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan berupa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mahasiswa dan Pengabdian kepada masyarakat oleh dosen.

2. Bentuk dan Model Implementasi PkM

a. Kuliah Kerja Nyata

Kuliah Kerja Nyata (KKN) dilakukan oleh seluruh mahasiswa IAIN Syeikh Nurjati Cirebon, khususnya mahasiswa semester VI akhir yang telah menyelesaikan 75% perkuliahan atau 105 sks dari seluruh sks yang dibebankan. Selain itu mahasiswa tersebut harus memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,00, lulus ujian mata kuliah Al-Quran, lulus praktek ibadah dan telah membayar SPP semester VI.³⁰

Selain itu KKN juga melibatkan dosen dalam pelaksanaannya sebagai pembimbing lapangan, bimbingan dimaksud untuk memberi arahan dalam pelaksanaan program kerja KKN yang telah disusun. Lebih lanjut bimbingan dilakukan sebagai upaya membantu mahasiswa dalam mengembangkan sikap dan tanggung jawab sosialnya dengan harapan mahasiswa memiliki kesiapan dalam melaksanakan program KKN. Pembimbing lapangan yang dilaksanakan oleh dosen dengan persyaratan minimal bergolongan IIIc, dinyatakan lulus dalam pelatihan/ *workshop* DPL, dll.

Bentuk KKN yang dikembangkan oleh IAIN Syeikh Nurjati Cirebon adalah KKN Tematik Posadaya, dimana model ini merupakan hasil kerja sama dengan yayasan Damandiri Jakarta yang berkedudukan di Jakarta yang diketuai oleh Dr. Subiakto Tjakrawerdaja. KKN tematik Posadaya merupakan buah kesadaran IAIN Syekh Nurjati Cirebon melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam upaya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan percepatan pencapaian tujuan pembangunan *Millennium Development Goals* (MDGs).

³⁰ (LP2M IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2016: 35).

Posdaya merupakan akronim dari Pos Pemberdayaan Keluarga, posdaya adalah suatu lembaga masyarakat yang berfungsi atau dapat dimanfaatkan sebagai forum silaturahmi, advokasi, komunikasi, edukasi dan wadah kegiatan penguatan fungsi-fungsi keluarga secara terpadu yang dilaksanakan dari, oleh dan untuk keluarga dan masyarakat. Program posdaya bukan wadah yang menggantikan kegiatan lainnya yang telah ada di masyarakat seperti posyandu, BKB, PAUD, arisan, kegiatan keagamaan, dan lain-lain, tetapi menjadi wadah yang mensinergikan dan menguatkan serta memadukan kegiatan-kegiatan tersebut dalam satu kesatuan.

KKN Tematik Posdaya yang dilaksanakan di IAIN Syekh Nurjati Cirebon tidak hanya berorientasi pada *problem solving* yang dialami masyarakat, melainkan bersifat komprehensif dan memberikan supporting baik dengan ide ataupun program agar masyarakat memiliki kemampuan dalam mengatasi masalah sehari-harinya secara mandiri.

Selain hal tersebut KKN Tematik Posdaya dilaksanakan secara ilmiah, sistematis dengan menempatkan penduduk dan keluarga sebagai titik sentral pembangunan, dan berkesinambungan. Tujuan akhir dari KKN Tematik Posdaya adalah membentuk, membina dan mengembangkan Posdaya sebagai terobosan baru dalam pemberdayaan masyarakat, melalui pemanfaatan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam lokal.

Prinsip pelaksanaan KKN Tematik Posdaya adalah: 1.pemberdayaan; berikutnya 2. Keterpaduan; 3. Kebutuhan; 4. Kemampuan Sendiri; 5. Interdisipliner; 6. Partisipatif Aktif; 7. Keberlanjutan.

Pemberdayaan yang dimaksud adalah mengangkat daya dan potensi yang ada pada setiap anggota keluarga dan setiap anggota masyarakat. hal ini bertujuan agar anggota keluarga dan anggota masyarakat tersebut mengubah dan berubah, dari yang sudah dimiliki sejak lahir tetapi terpendam dan anggota keluarga serta anggota masyarakat sendiri tidak mengetahui bahwa daya dan potensi itu ada.

Keterpaduan yang merupakan prinsip berikutnya dari program KKN Tematik Posdaya dilaksanakan mencakup aspek intelektual, sosial-ekonomi, fisik dan menejerial agar mampu meningkatkan aspek pengetahuan, kemampuan dan keterampilan. Dari sisi Tri Dharma Perguruan Tinggi, KKN Tematik Posdaya IAIN Syekh Nurjati Cirebon harus mampu memadukan unsur Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, pengajaran dan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis penelitian.

Faktor kebutuhan yang terasa yang dinyatakan oleh perorangan, keluarga, lembaga-lembaga masyarakat dan pemerintah. Kegiatannya bertumpu pada kepentingan rakyat banyak dan pemerintah yang disusun oleh masyarakat, bersama masyarakat, dalam masyarakat dan untuk masyarakat atas dasar kebutuhan dan berbagai sumber yang tersedia untuk memenuhi kepentingan bersama dalam aspek kehidupan dan penghidupan.

Kemampuan sendiri yang dimaksud adalah dengan mengutamakan penggalian dan pengembangan potensi lokal serta peningkatan swadaya masyarakat yang bertumpu pada kekuatan masyarakat sendiri.

KKN Tematik Posdaya IAIN Syekh Nurjati dilaksanakan oleh mahasiswa dari berbagai disiplin ilmu di lingkungan IAIN. Mahasiswa dalam melaksanakan tugasnya atas dasar pola pikir dan pola kerja secara interdisipliner.

IAIN Syekh Nurjati melalui KKN Tematik Posadaya bertujuan agar masyarakat, pemerintah dan unsur-unsur lainnya yang berkaitan dengan program ini, didorong berpartisipasi aktif sejak perencanaan, pelaksanaan sampai pada evaluasi program.

Lebih jauh, IAIN Syekh Nurjati Cirebon melaksanakan KKN Tematik Posdaya bertujuan untuk membantu mahasiswa dalam meningkatkan kemampuan menyatu bersama masyarakat, mempelajari dan mengatasi permasalahan keluarga dan penduduk masyarakat, menerapkan ilmu agama terintegrasi dengan teknologi, seni dan budaya. Penerapan ilmu ini pada waktunya memberikan kontribusi praktis kepada mahasiswa terkait dinamika keilmuan yang dibutuhkan masyarakat.

Sasaran masyarakat dalam pelaksanaan KKN Tematik Posdaya khususnya keluarga dan masyarakat adalah untuk membantu pemberdayaan keluarga dan masyarakat tersebut melalui pembinaan keagamaan, penerapan ilmu dan teknologi dalam bidang wirausaha, pendidikan dan keterampilan, KB dan kesehatan, serta pembinaan lingkungan untuk membangun keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah.

Dosen sebagai salah satu unsur yang berperan dalam pelaksanaan KKN Tematik Posadaya dimaksudkan agar pengembangan profesionalisme dosen dalam memberdayakan masyarakat dan melakukan penelitian sosial keagamaan secara

integratif dengan isu-isu pembangunan khususnya dalam mengakselerasi capaian *Sustainable Development Goals* (SDGs).

KKN Tematik Posdaya IAIN Syekh Nurjati Cirebon menggalang komitmen, kepedulian, dan kerjasama berbagai elemen dari pemerintah daerah, swasta, LSM dan masyarakat dalam upaya pengentasan kemiskinan, kelaparan, mengatasi permasalahan penduduk dan keluarga lainnya.

Selanjutnya membantu dalam mempersiapkan keluarga dan masyarakat agar memiliki kemampuan untuk memanfaatkan fasilitas dan dukungan yang diberikan oleh mitra kerja pembangunan (pemerintah daerah, lembaga swasta dan LSM) dalam perencanaan dan pengelolaan program yang bersifat partisipatif.

Sasaran KKN Tematik Posdaya adalah terbentuknya pos pemberdayaan keluarga sebagai sarana pemberdayaan keluarga dan penduduk untuk pengembangan sumber daya manusia dan pengentasan kemiskinan. Selanjutnya dimaksudkan agar keluarga muda, keluarga lansia, keluarga kaya, dan keluarga miskin dapat bersilaturahmi dan saling peduli sesamanya. Posadaya yang telah terbentuk memiliki rencana program dan kegiatan pembangunan yang kreatif dan inovatif berdasarkan SDGs.

Pemetaan sasaran dalam program Posdaya adalah bagian penting dari mengaktifkan semua komponen dalam forum komunikasi, advokasi dan wadah kegiatan penguatan fungsi-fungsi keluarga secara terpadu.

Program pemetaan sasaran di setiap desa atau dusun wilayah posdaya merupakan kebutuhan mutlak yang harus dilaksanakan. Pemetaan tersebut didahului dengan menggunakan indikator yang

dikembangkan BKKBN. Indikator tersebut dalam prakteknya dapat berubah sesuai dengan dinamika masyarakat dan keluarga sebagai sasarannya.

Sebagai basis pemetaan sasaran posdaya pada dasarnya adalah keluarga baik dalam lingkup Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) atau lingkup yang lebih luas. Pendataan seluruh keluarga pada lingkup yang lebih luas. Pendataan seluruh keluarga pada lingkup-lingkup tersebut merupakan langkah awal pemetaan terkait kondisi keluarga yang menghubungkan dengan akses fasilitas dalam membangun keluarga sejahtera berdasarkan MDGs dan melakukan penguatan fungsi-fungsi keluarga. Dalam setiap tahunnya, pemetaan seperti ini tentu saja mengalami dinamika dan karenanya pembaharuan terhadap pendataan keluarga ini menjadi kebutuhan. Tak terkecuali munculnya keluarga muda dalam setiap tahunnya menjadi fenomena sosial yang sangat niscaya. Dalam konteks posdaya ini, kalangan keluarga muda tentu saja dapat diletakkan sebagai sasaran utama dan mendapat perhatian yang memadai.

KKN Tematik Posdaya mengklasifikasikan keluarga sebagai kerangka acuan bagi dosen pembimbing dan mahasiswa peserta KKN melaksanakan program yang sesuai dengan kondisi keluarga berdasarkan indikator yang dibuat. Klasifikasi yang dimaksud adalah 1. Keluarga prasejahtera; 2. Keluarga sejahtera I; 3. Keluarga sejahtera II; 4. Keluarga sejahtera III; 5. Keluarga sejahtera III plus.

Yang dimaksud keluarga prasejahtera adalah keluarga dengan indikator; 1. Keluarga itu tidak makan dua kali sehari; 2. Mempunyai pakaian layak untuk keperluan yang berbeda; 3. Jika anggota keluarga sakit dibawa ke sarana atau petugas kesehatan; 4.

Rumah yang ditempati memiliki atap, lantai dan dinding yang baik; 5. Jika pasangan usia subur ingin ber-KB pergi ke sarana pelayanan KB; 6. Semua anak berusia 7-15 tahun bersekolah. Keluarga prasejahtera adalah mereka yang salah satu dari indikator tersebut tidak terpenuhi.

Keluarga sejahtera I adalah sebuah keluarga yang seluruh kondisi pada keluarga pra sejahtera telah dapat dipenuhi.

Keluarga sejahtera II adalah sebuah keluarga yang selain memenuhi kondisi keluarga sejahtera I juga memenuhi kondisi lain antaranya: 1. Anggota keluarga melaksanakan ibadah menurut agamanya masing-masing; 2. Anggota keluarga makan daging/ telur/ ikan paling kurang sekali dalam seminggu; 3. Anggota keluarga memperoleh satu setel pakaian baru dalam satu tahun; 4. Luas lantai rumah paling kurang $8m^2$ untuk setiap penghuni rumah; 5. Dalam tiga bulan terakhir seluruh anggota keluarga dalam keadaan sehat; 6. Terdapat seorang atau lebih anggota keluarga yang bekerja; 7. Seluruh anggota keluarga berumur 10-60 tahu bisa baca tulis latin; 8. Pasangan usia subur dengan dua anak atau lebih mempergunakan kontrasepsi.

Keluarga sejahtera III adalah sebuah keluarag yang selain memenuhi kondisi keluarga sejahtera II juga memenuhi kondisi lain diantaranya: 1. Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agamanya; 2. Sebagian penghasilan keluarga bisa ditabung; 3. Keluarga makan bersama paling kurang sekali dalam satu minggu sambil berkominkasi; 4. Keluraga ikut kegiatan masyarakat di lingkungannya; 5. Keluarga memperoleh informasi dari media massa.

Keluarga sejahtera III plus adalah sebuah keluarga yang selain memenuhi kondisi lain diantaranya: 1. Keluarga secara teratur memberikan sumbangan materil untuk kegiatan sosial; 2. Ada anggota keluarga yang aktif dalam kegiatan kemasyarakatan.

Pemetaan berdasarkan klasifikasi keluarga tersebut dapat dijadikan sebagai subyek pemberdayaan baik dalam skala prioritas maupun untuk penyusunan standarisasi kelayakan hidup dalam setiap posdaya. Apabila seluruh keluarga telah terdaftar dan klasifikasinya sudah dapat ditentukan secara lengkap, maka dapat dilakukan pemetaan berdasarkan lokasi persebaran dan kategorinya. Termasuk dalam hal ini adalah indikator-indikator yang mengarah pada jenis-jenis kekurangan yang dimiliki keluarga yang bersangkutan.

Peta keluarga yang cema tersebut diperbaharui secara berkala dan menjadi pembahasan oleh pengurus posdaya yang dibentuk melalui KKN Tematik Posdaya IAIN Syekh Nurjati Cirebon untuk pengembangan pemecahannya secara gotong royng. Dalam forum yang dilaksanak oleh posdaya, keluarga yang lebih mampu dapat memberikan saran, bantuan dan pendampingan. Sedangkan keluarga kurang mampu harus bekerja keras untuk mengikuti kesepakatan yang dibahas bersama dalam pertemuan seluruh masyarakat yang ada.

Apabila kondisi pengelolaan posdaya memperlihatkan peningkatan yang lebih baik, pemetaan keluarga dapat dikembangkan menjadi pemetaan secara digital. Pemetaan jenis ini dapat digabung dengan pemetaan lain yang dilakukan pada tingkat kabupaten/ kota dan dibandingkan oleh fasilitator pendamping dari

tingkat tersebut dengan desa dan dukuh lainnya. Perbandingan antara desa dan dukuh dapat dipergunakan untuk memberikan motivasi bagi fasilitator, penduduk, dan keluarga yang berada di suatu lokasi. Jika keluarga di desa lain dapat bekerja dengan baik dan mencapai kemajuan, maka keluarga di desa tersebut juga akan mampu dipicu meniru rekannya dari dukuh tau desa lainnya.

Pengembangan pemetaan secara digital dapat menginspirasi tentang strategi dalam melihat komponen apa saja yang bisa memicu pada peningkatan yang dianggap lebih signifikan. Strategi ini dilakukan semata-mata sebagai upaya pemberdayaan yang terencana, dilaksanakan secara ilmiah dan menepati sasaran secara efisien.

KKN Tematik Posdaya IAIN Syekh Nurjati dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan. Program kegiatan yang telah berhasil merupakan titik awal untuk program berikutnya hingga tercapai tujuan yang diharapkan oleh masyarakat dan pemerintah.

Penempatan mahasiswa KKN di lokasi merupakan hasil dari data yang masuk ketika proses pendaftaran, yang dijadikan pertimbangan dalam menempatkan mahasiswa peserta KKN adalah:

- 1) Komposisi antara putra dan putri;
- 2) Jurusan dan fakultas;
- 3) Asal daerah;
- 4) Kondisi kesehatan.

Berdasarkan kriteria penempatan tersebut, LP2M IAIN Syekh Nurjati Cirebon pada tahun ini membagi mahasiswa peserta KKN menjadi 85 kelompok yang masing-masing kelompok terdiri dari 13-14 mahasiswa peserta KKN. Dengan proporsi jenis kelamin putra 5-

6 dan putri 8-9. Pengelompokan ini didasarkan pada azas kemudahan koordinasi, keterjangkauan jarak tempuh dan fasilitas.

Jumlah rata-rata mahasiswa peserta KKN Tematik Posdaya setiap tahunnya sebanyak 1129 orang yang berasal dari fakultas ilmu tarbiyah dan keguruan (FITK), fakultas syariah dan ekonomi Islam (FSEI), dan fakultas ushuluddin adab dan dakwah (FUAD). Seluruh peserta dengan kelompok berjumlah 85 ditugasi untuk melaksanakan KKN Tematik Posdaya di 85 desa dalam 8 kecamatan di kabupaten Cirebon.

Selama menjalani program KKN Tematik Posdaya, mahasiswa peserta KKN dibebankan kewajiban untuk melaksanakan KKN sekurang-kurangnya 90% dari alokasi waktu yang telah ditentukan. Menyusun program rencana kegiatan yang harus sudah diselesaikan dalam waktu satu pekan setelah tiba di lokasi KKN yang diwujudkan dalam bentuk matriks rencana kegiatan dan proposal kegiatan.

Mahasiswa peserta KKN diwajibkan membuat catatan harian secara tertib setiap hari sesuai dengan program kegiatan yang telah dilakukan. Menyelesaikan seluruh rangkaian tugas dan kegiatan KKN termasuk menyusun laporan tertulis dan ujian pada semester. Peserta wajib menghindarkan diri dari kegiatan politik praktis, mencampuri urusan internal lembaga di lokasi KKN, menyalahgunakan narkoba, melakukan perbuatan melanggar norma susila, dan perbuatan tercela yang dapat merusak nama baik almamater dan merugikan pihak lain.

Menciptakan hubungan yang baik dengan semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan program KKN, menggunakan identitas

dan atau pengenalan KKN pada saat melaksanakan kegiatan KKN. Mentaati tata tertib yang berlaku dan menjaga nama baik almamater IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Peserta yang telah dibagi dengan kewajiban yang melekat, selanjutnya melakukan lokakarya untuk menentukan persiapan-persiapan keperluan selama menjalani program KKN Tematik Posdaya. Tapi sebelum itu peserta dibekali dengan berbagai hal yang akan menunjang kegiatan KKN di lapangan. Pembekalan yang dilakukan berorientasi peningkatan *soft skill* seperti komunikasi, kerja sama (*team work*), *leadership*, dan *problem solver*.

Tujuan spesifik dari pembekalan adalah agar peserta dapat memahami dan menghayati filosofi, pengertian dan tujuan KKN Tematik Posdaya. Kebutuhan informasi tentang situasi, kondisi dan permasalahan lokasi yang akan dijadikan tempat KKN. Kemampuan tata krama dan adat istiadat masyarakat di lokasi KKN.

Materi yang diberikan kepada mahasiswa peserta KKN adalah tentang program pengabdian kepada masyarakat berbasis masjid dan pemberdayaan masyarakat, materi konsep *sustainable development goals* (SDGs). Pengenalan kondisi objektif masyarakat di lokasi KKN, materi tentang teknik menjadi fasilitator, bimbingan dan pendampingan berupa: 1. Teknik pengumpulan data dan pemetaan masyarakat; 2. Penyusunan laporan KKN secara individu maupun kelompok; 3. Pembagian kerja tugas dan pembentukan pengurus kelompok KKN.

Teknik pengumpulan data dalam pelaksanaan program pembentukan posdaya dilalui dengan hal-hal berikut:

- 1) Menghimpun data dasar;

- 2) Identifikasi potensi, sasaran dan kebutuhan masyarakat;
- 3) Menjajaki pendapat tokoh masyarakat (toma), tokoh agama (toga) dan tokoh militer (tomi);
- 4) Menyajikan data dalam pertemuan lokakarya mini;
- 5) Pemetaan kondisi keluarga miskin atau kurang mampu;
- 6) Pembentukan tim pelaksana dan pengurus posdaya (tingkat RW);
- 7) Penyusunan program kerja dan pelaksanaan;
- 8) Penerbitan surat keputusan pembentukan posdaya dan penyusunan AD/ART posdaya, diutamakan pada tingkat RW agar kegiatan posdaya dapat berlangsung dan diikuti oleh warga setempat;

Setelah posdaya terbentuk, hal selanjutnya adalah melaksanakan program pendampingan atau penguatan posdaya dengan:

- 1) Konsolidasi pengurus posdaya;
- 2) Identifikasi masalah dan potensi dalam posdaya;
- 3) Penyegaran kembali tentang program kerja yang sudah disusun;
- 4) Mengadakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait;
- 5) Mengadakan bimbingan dan pelatihan yang dibutuhkan posdaya;

Program-program Posdaya yang dilaksanakan oleh IAIN Syekh Nurjati Cirebon, diantaranya:

- 1) Pengembangan keluarga petani melalui pembuatan pupuk kompos oleh keluarga muda di pedesaan;

- 2) Pengembangan keluarga peternak melalui pengembangan mutu ayam kampung atau ayam nusantara oleh keluarga muda di pedesaan;
- 3) Pengembangan keluarga pengusaha muda melalui pemberdayaan dan pelatihan wirausaha;
- 4) Pengembangan keluarga muda dengan memperingan beban anak batita dan anak balitanya melalui pengembangan pendidikan anak usia dini (PAUD);
- 5) Pengembangan pelatihan keterampilan untuk anak sekolah dan anak putus sekolah;
- 6) Penguatan kesadaran keluarga melalui peningkatan pengetahuan dan budaya hidup sehat;
- 7) Penguatan kemandirian masyarakat dalam pembiayaan kegiatan Posdaya melalui pengembangan budaya;

Dalam pelaksanaan KKN Tematik Posdaya, mahasiswa perlu membangun dan mengembangkan jaringan dan konsultasi dengan berbagai pihak yang terkait dengan rencana kerja yang disusun bersama masyarakat. Misalnya dengan dinas terkait di tingkat kecamatan atau kabupaten/ kota antara lain Puskesmas, dinas pendidikan, dengan lembaga kemasyarakatan lainnya seperti PKK, kelompok majelis taklim dan pengurus DKM. Hal ini bertujuan memadukan dukungan program atau membantu pembinaan, memberikan fasilitasi, membantu menyediakan sumber daya dan dana yang dapat dipergunakan untuk mengefektifkan pelaksanaan program kerja posdaya.

Keterbatasan waktu bisa menyebabkan tidak semua kegiatan dapat diselesaikan pada akhir program KKN Tematik Posdaya. Jika

hal ini terjadi, pelaksanaan KKN Tematik, dalam hal ini mahasiswa dan DPL perlu mencantumkan langkah-langkah yang telah dilaksanakan dan catatan yang menjelaskan beberapa program tindak lanjut. Langkah ini dilakukan sebagai bahan pertimbangan jika dilakukan program KKN Tematik Posdaya periode berikutnya di tempat yang sama. Berikut adalah hal-hal teknis administratif yang perlu diperhatikan pesetra KKN Tematik:

- 1) Kegiatan peserta yang bersifat individual dicatat dalam lembaran/ buku laporan harian.
- 2) Kegiatan peserta dalam kelompok dicatat dalam lembaran/ buku laporan kelompok.
- 3) Biaya dan sarana kegiatan direncanakan dan dimusyawarahkan di antara peserta dengan mengoptimalkan potensi dan dukungan yang ada.
- 4) Evaluasi kegiatan lapangan dan pelaporan dirumuskan pada lokakarya yang diselenggarakan sebelum KKN berakhir.
- 5) Hasil evaluasi dan laporan dicatat BLK.

Bimbingan dan monitoring dalam pelaksanaan KKN Tematik Posdaya merupakan kegiatan penting dilakukan. Keduanya bertujuan tidak saja untuk mengefektifkan pelaksanaan KKN di lapangan, melainkan sebagai upaya melakukan komunikasi interaktif antara DPL dan mahasiswa peserta KKN. Dalam konteks ini, posisi DPL memiliki peranan yang sangat dalam memberikan bimbingan dan pendampingan kepada mahasiswa untuk keberhasilan KKN Tematik. Bimbingan dan pendampingan yang dilakukan DPL meliputi hal-hal:

- 1) Pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat serta pemerintah kabupaten/ kota, dinas/ instansi terkait untuk memperoleh dukungan terhadap dukungan terhadap program kerja KKN Tematik.
- 2) Observasi lapangan meliputi identifikasi potensi dan masalah serta penyusunan langkah-langkah pemecahan yang akan menjadi program kerja KKN Tematik.
- 3) Penyelenggaraan lokakarya untuk membahas program kerja yang disusun oleh tim KKN bersama masyarakat. DPL membantu pengarahannya teknis agar dapat diperoleh hasil yang optimal. Demikian pula DPL berperan dalam penyelenggaraan rapat koordinasi yang sekaligus menjadi forum untuk memperoleh dukungan dari berbagai pihak.
- 4) Pelaksanaan pelatihan bagi peserta dan kader masyarakat. DPL dapat mendampingi peserta saat menyusun kurikulum pelatihan, melaksanakan dan mengevaluasi proses pelatihan. Di samping itu, DPL dapat juga berperan sebagai narasumber sepanjang materi yang disampaikan sesuai dengan keahliannya.
- 5) Pendampingan pada saat lokakarya untuk melakukan evaluasi dan menyusun pelaporan.

Sementara itu, monitoring kegiatan KKN bertujuan untuk mengetahui secara dini adanya kelemahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan program sehingga dapat dilakukan perbaikan secara cepat sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Monitoring dilakukan secara berkala, baik dalam kegiatan

perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, maupun tindak lanjut program KKN.

Monitoring pelaksanaan dilakukan di lokasi KKN oleh masing-masing DPL. Sementara itu, monitoring secara menyeluruh dilakukan oleh lembaga penelenggara dalam hal ini LP2M dan pimpinan IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Beberapa aspek monitoring antara lain:

- 1) Proses kegiatan lapangan.
- 2) Komunikasi dan kerjasama antar peserta.
- 3) Komunikasi dan kerjasama pesera dengan DPL.
- 4) Komunikasi dan kerjasama antara peserta dengan msyarakat.
- 5) Respon dan pastisipasi masyarakat dalam kegiatan KKN Tematik Posdaya.
- 6) Pencapaian kegiatan/ program, terbentuknya posdaya di tingkat RW.

Evaluasi KKN Tematik Posdaya dilakukan pada setiap tahapan pelaksanaan kegiatan KKN. Bentuk evaluasi yang digunakan adalah:

- 1) Evaluasi proses, yaitu evaluasi yang dilaksanakan selama proses kegiatan KKN Tematik berlangsung, misalnya pada setiap tahapan atau sub tahapan kegiatan. Hasil monitoring dan evaluasi proses dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk melakukan perbaikan, peningkatan atau pengembangan bagi kegiatan selanjutnya, oleh pelaksana KKN tematik maupun oleh masyarakat.

- 2) Evaluasi akhir, dilakukan pada akhir seluruh kegiatan KKN Tematik. Komponen yang dievaluasi mencakup tingkat pencapaian, faktor pendukung dan hambatan, efisiensi dan efektivitas program serta dampak yang ditimbulkan setelah dilaksanakan KKN Tematik. Hasil evaluasi dapat menjadi umpan balik bagi IAIN Syekh Nurjati untuk melakukan perbaikan, peningkatan dan pengembangan program KKN Tematik di waktu berikutnya,

Evaluasi terhadap kegiatan KKN Tematik adalah evaluasi terhadap pengelolaan, pelaksanaan, tahapan kegiatan, penyusunan laporan dan penilaian. Evaluasi terhadap dampak kegiatan KKN Tematik adalah evaluasi untuk megkonfirmasi sejauh mana program-program yang telah dilakukan dapat dijaga dan dikembangkan oleh masyarakat maupun oleh instansi terkait yang ikut terlibat aktif dalam kegiatan KKN Tematik.

Evaluasi terhadap peserta dilakukan mulai dari pembekalan, penyusunan program kerja, pelaksanaan program kerja, kinerja mahasiswa peserta KKN, laporan KKN Tematik. Bobot komponen penilaian adalah sebagai berikut.

1) Pembekalan (materi, proses dan isi)	10%
2) Penyusunan program kerja	5%
3) Pelaksanaan program kerja	10%
4) Kinerja mahasiswa	70%
5) Laporan KKN Tematik	5%

Evaluasi program didapatkan dari laporan tertulis mahasiswa maupun DPL. Tujuan evaluasi ini yaitu untuk mengetahui tingkat keberhasilan program. Aspek-aspek yang dievaluasi meliputi hal-hal

yang berhubungan dengan pengelolaan, pelaksanaan setiap tahapan kegiatan termasuk penyusunan laporan dan penilaian. Berikut adalah rincian aspek-aspek yang dievaluasi:

- 1) Keseluruhan proses kegiatan.
- 2) Perubahan dan perkembangan kehidupan masyarakat yang menjadi sasaran KKN Tematik.
- 3) Respons dan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan KKN Tematik.
- 4) Keterbukaan masyarakat terhadap inovasi.
- 5) Umpan balik pasca kegiatan KKN Tematik.

Kegiatan KKN Tematik wajib dipertanggungjawabkan secara ilmiah maupun manajerial melalui suatu laporan. Materi laporan meliputi kegiatan perencanaan program, perkembangan pelaksanaan program hingga evaluasi penyelenggaraan KKN Tematik secara keseluruhan. Laporan yang pertama adalah laporan mahasiswa peserta KKN dan yang kedua adalah laporan penyelenggara KKN.

Laporan penyelenggaraan KKN Tematik posdaya disusun dan dilaporkan oleh penanggung jawab penyelenggaraan KKN Tematik. Laporan ini harus disampaikan kepada pimpinan IAIN Syekh Nurjati Cirebon, materinya berupa:

- 1) Rencana kegiatan.
- 2) Penyelenggaraan program KKN Tematik Posdaya.
- 3) Hasil kegiatan yang dicapai.
- 4) Permasalahan dan upaya penganggulannya.
- 5) Rencana tindak lanjut

Publikasi hasil KKN Tematik Posdaya dilakukan melalui:

- 1) Lokakarya

- 2) Media cetak
 - 3) Media elektronik, seperti radio dan televisi
- b. Pengabdian Kepada Masyarakat oleh Dosen

Pengabdian kepada Masyarakat oleh dosen di IAIN Syekh Nurjati dilakukan dengan program pendampingan madrasah. Pendampingan oleh dosen tersebut dikelola oleh masing-masing program studi. Selain itu, pengabdian di lokasi KKN saat menjadi dosen pembimbing lapangan (DPL) juga merupakan pengabdian yang diakui sebagai pengabdian.³¹

3. Metode PkM di IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Metode pengabdian IAIN Syekh Nurjati Cirebon hanya melihat mengenai tahapan pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Posdaya, mulai dengan tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut.

Agenda dalam tahap perencanaan adalah koordinasi dengan pimpinan, koordinasi dengan mitra kerja, audiensi dengan pemerintah daerah/ BAPPEDA, penentuan lokasi dan tema KKN, serta penyusunan TOR (*Term Of Reference*) dan proposal KKN. Tahapan berikutnya adalah persiapan, agenda yang dilaksanakan dalam tahap persiapan adalah studi kelayakan (survey) lokasi KKN, perizinan lokasi, pendaftaran, pengelompokkan dan penempatan lokasi, koordinasi dengan dinas/ instansi terkait, workshop/ pembekalan dosen pembimbing lapangan (DPL) dan pembekalan

³¹ Keterangan yang didapat peneliti saat wawancara dengan Wawan Ahmad Ridwan (Kepala Pusat Pengabdian) tanggal 30 Juni 2016

peserta KKN, konsultasi efektif peserta dengan dosen pembimbing lapangan serta observasi lokasi KKN oleh peserta.

Pada tahap pelaksanaan terdapat rangkaian berupa pelepasan/ pemberangkatan peserta, upacara pembukaan KKN, pelaksanaan kegiatan di lokasi KKN selama 40 hari, penyusunan proposal dan pelaksanaan kegiatan monumental, pembimbingan oleh DPL, monitoring dan evaluasi oleh tim, lokakarya mini tingkat desa, lokakarya tingkat kecamatan, lokakarya tingkat kabupaten dan penutupan KKN dan berikutnya penarikan/ pemulangan peserta. Rangkaian terakhir dalam kegiatan KKN adalah tahap evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut berupa evaluasi keberhasilan dan evaluasi program, penyusunan laporan individu, laporan kelompok, dan laporan tim lokakarya tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten. Tindak lanjut berupa seminar/ lokakarya, kegiatan pendampingan, desa binaan dan terakhir penyusunan program KKN berikutnya.

E. Pengabdian kepada Masyarakat di IAIN Salatiga

1. Implementasi Pengabdian kepada Masyarakat di IAIN Salatiga

Pengabdian kepada masyarakat di IAIN Salatiga dilaksanakan dibawah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M), khususnya pusat pengabdian kepada masyarakat, dan dilakukan oleh sivitas akademik baik dosen atau mahasiswa. Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan berupa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mahasiswa dan Pengabdian dosen. Kuliah kerja nyata di IAIN Salatiga dilakukan dengan beberapa jenis, diantaranya:

- a. KKN Reguler;

- b. KKN Tematik;
- c. KKN Posdaya.

Jenis kuliah kerja nyata (KKN) yang sering dilakukan oleh IAIN Salatiga adalah jenis KKN Tematik Posdaya. Tahun 2016 LP2M IAIN Salatiga menyelenggarakan program KKN jenis KKN Tematik Posdaya dengan fokus garapan berbasis Masjid. Pemilihan masjid sebagai basis kegiatan posdaya adalah karena masjid merupakan wadah bagi keluarga, jamaah masjid dan masyarakat untuk bersama-sama mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam bidang kewirausahaan, pendidikan dan pelatihan keterampilan, keluarga berencana dan kesehatan, serta pembenahan lingkungan yang sekaligus merupakan upaya memperbaiki kualitas sumberdaya manusia yang diukur indeks pembangunan manusia.

Sedangkan untuk pengabdian kepada masyarakat (PkM) oleh dosen, LP2M menggandeng fakultas untuk terlibat secara langsung dalam program pengabdian kepada masyarakat oleh dosen. Hal ini dibuktikan dengan keleluasaan yang diberikan oleh LP2M kepada fakultas untuk memilih segmentasi masyarakat yang akan dilakukan pengabdian oleh dosen, sesuai dengan ciri khas masing-masing fakultas. Pola seperti ini dikarenakan dengan menjadi fakultas sebagai pelaksana langsung kegiatan, diharapkan solusi yang diberikan kepada masyarakat atas permasalahan sesuai dengan keilmuan dari fakultas tersebut.

Kegiatan-kegiatan yang telah dan biasa dilakukan untuk pengabdian kepada masyarakat oleh dosen di lingkungan IAIN Salatiga diantaranya:

- 1) Pemberdayaan ekonomi umat

- 2) Pemberdayaan madrasah
- 3) Pemberdayaan masjid
- 4) Pemberdayaan pesantren

2. Bentuk dan Model Implementasi PkM

a. Kuliah Kerja Nyata

Jenis kuliah kerja nyata (KKN) yang dikembangkan di IAIN Salatiga terdiri dari KKN Reguler, KKN Posdaya, dan KKN Tematik.³² Penyelenggaraan Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) bertolak pada landasan pemikiran bahwa IAIN Salatiga merupakan bagian dari masyarakat, melalui keberadaan mahasiswa terjun di tengah-tengah masyarakat untuk mendampingi dan membantu masyarakat dalam memanfaatkan potensi dan sumber daya alam (SDA) lokal dan sumber daya manusia (SDM)-nya.

Program KKN Tematik Berbasis Masjid dilaksanakan secara ilmiah, dan sistematis dengan menempatkan warga masyarakat, keluarga dan jamaah masjid sebagai titik sentral pembangunan secara berkesinambungan. KKN Tematik berbasis masjid diarahkan dengan maksud memperkuat kemampuan keluarga, jamaah masjid dan masyarakat secara mandiri. Penyelenggaraan KKN Tematik berbasis masjid dalam hal ini adalah penguatan lembaga masyarakat berbasis masjid yang berfungsi atau dapat dimanfaatkan sebagai forum silaturahmi, advokasi, komunikasi, edukasi, dan wadah kegiatan penguatan fungsi-fungsi keluarga secara terpadu yang dilaksanakan dari, oleh, dan untuk jamaah, keluarga dan masyarakat.

³² Data yang didapatkan berupa petunjuk teknis hanya jenis KKN Tematik Posdaya Berbasis Masjid. Jenis-jenis KKN yang disebutkan di atas di dapat dari hasil wawancara dengan Adang Kuswaya (Ketua LP2M IAIN Salatiga).

Pelaksanaan KKN Tematik berbasis masjid diarahkan untuk membantu membentuk, mengisi dan mengembangkan Lembaga Sosial berbasis masjid di desa atau pedukuhan secara sistematis. Penguatan kelembagaan sosial berbasis masjid yang dibentuk merupakan wadah bagi keluarga, jamaah masjid dan masyarakat untuk bersama-sama mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam bidang kewirausahaan, pendidikan dan pelatihan ketrampilan, Keluarga Berencana dan kesehatan, serta pembenahan lingkungan yang sekaligus merupakan upaya memperbaiki kualitas sumberdaya manusia yang diukur indeks pembangunan manusia.

Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah kegiatan belajar dan kerja lapangan yang merupakan pengintegrasian dari pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui pendekatan interdisipliner dan lintas sektoral. Kuliah Kerja Nyata (KKN) di IAIN Salatiga merupakan salah satu mata kuliah intra kurikuler yang wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa program S1 sebelum menyelesaikan studinya. Program kegiatan KKN diikuti oleh mahasiswa yang telah terdaftar pada semester dimana ia mengambil program KKN; telah memasukkan mata kuliah KKN dalam rencana studi pada semester dimana ia mengambil mata kuliah KKN. Beban kredit KKN adalah 4 SKS (Satuan Kredit Semester) terdiri dari: (1). Pembekalan, (2). Kegiatan lapangan selama 45 hari dan pelaporan hasil. Secara lebih rinci kewajiban mahasiswa peserta KKN adalah sebagai berikut:

- 1) Mengikuti kuliah pembekalan;
- 2) Melakukan penjajakan lokasi guna menghimpun informasi mengenai potensi dan permasalahan;

- 3) Merencanakan dan melaksanakan program dengan mempertimbangkan kondisi riil obyek sasaran;
- 4) Membuat jadwal kegiatan harian;
- 5) Membuat laporan pelaksanaan kegiatan KKN setia unit kerja ditempat dimana melaksanakan KKN.

Selain itu mahasiswa peserta KKN diwajibkan mentaati tata tertib yang telah dibuat yaitu:

- 1) Mahasiswa wajib mengikuti kegiatan harian yang telah diprogramkan oleh kelompok;
- 2) Mahasiswa diwajibkan saling membantu di antara sesama peserta dalam melaksanakan program;
- 3) Menjaga nama baik almamater;
- 4) Melakukan kegiatan sesuai program yang telah disetujui DPL;
- 5) Membuat jadwal kegiatan harian dan melampirkan dalam laporan pelaksanaan KKN;
- 6) Membuat laporan sesuai ketentuan panitia;
- 7) Tidak dibenarkan membuat stempel atas nama KKN.

Jika tata tertib tersebut dilanggar maka sanksi yang diberikan dapat berupa:

- 1) Pelanggaran ringan seperti tidak membuat jadwal harian, tidak mengisi buku daftar hadir sanksi yang diberikan oleh DPL;
- 2) Pelanggaran sedang seperti mengulang kesalahan yang sama tanpa alasan yang dapat diterima diberikan peringatan keras oleh DPL:

- 3) Pelanggaran berat seperti tindak kriminal dan atau pencemaran nama baik amamter akan digugurkan haknya sebagai peserta KKN.

Program kerja KKN disusun dengan mempertimbangkan permasalahan, dan kebutuhan unit sasaran setempat serta disesuaikan dengan bidang keahlian mahasiswa. Mahasiswa yang menjalani program ini diharapkan dapat membantu memecahkan persoalan di daerah kerja melalui pelaksanaan program kerja KKN yang telah ditetapkan.

Kerangka umum rincian program kerja KKN yang disarankan untuk diagendakan oleh mahasiswa, meliputi :

- 1) Bidang Sektoral

- a) Sektoral Fisik

Bidang sektoral fisik ini berkaitan dengan kehidupan keagamaan umat Islam (pembenahan tempat ibadah, pembenahan sarana penunjang seperti buku-buku, kitab, alat shalat, dsb) dan kelembagaan pendidikan Islam (Madin, MI, MTS, MA, TPA/TPQ, dan sebagainya).

- b) Sektoral non fisik

Bidang ini berkaitan dengan kehidupan keagamaan yang bersifat non fisik, antara lain meliputi :

- (1) Bimbingan kehidupan beragama dalam bentuk peningkatan partisipasi warga dalam kegiatan shalat berjamaah di masjid.
- (2) Membantu meningkatkan pelaksanaan program TPQ.
- (3) Membantu meningkatkan program kemasjidan.

- (4) Membantu meningkatkan kualitas MI.
- (5) Penyuluhan tentang fenomena nikah dini
- (6) Membantu meningkatkan kegiatan kajian keislaman
- (7) Peningkatan gerakan zakat, infaq dan shadaqah.
- (8) Pengembangan koperasi, BMT dan pengelolaan kotak amal.
- (9) Pemberdayaan remaja masjid

2) Bidang Lintas Sektoral

a) Lintas Sektoral Fisik.

Bidang ini meliputi sarana sosial yang diperlukan oleh masyarakat secara umum dan terbuka, seperti: pemasangan papan nama jalan, sarana air bersih, program pelistrikan, administrasi kelurahan, dan sebagainya.

b) Lintas Sektoral Non Fisik.

Bidang ini mencakup semua bentuk penyuluhan, pendampingan dan rintisan lembaga masyarakat, misalnya:

- (1) Penyuluhan dan bimbingan keluarga berencana
- (2) Pembentukan dan pendampingan Pendidikan Anak-anak Usia Dini (PAUD)
- (3) Pemberdayaan perempuan & kesehatan ibu-anak
- (4) Pembinaan kewirausahaan dan ekonomi produktif
- (5) Pembinaan kesenian dan olah raga
- (6) Pelayanan kesehatan masyarakat

- (7) Penerbitan media komunikasi, informasi dan edukasi
- (8) Layanan bimbingan belajar
- (9) Pemberdayaan perkumpulan remaja dan karang taruna
- (10) Penyuluhan kesehatan reproduksi dan bahaya AIDS/HIV, dan sebagainya.

Sebelum pemberangkatan, terlebih dahulu peserta dan DPL *men-survey* lokasi KKN. *Survey* yang dilakukan merupakan agenda untuk memperkenalkan diri seklaigus meminta izin (kulonuwun) kepada penanggung jawab wilayah tempat lokasi KKN. Model yang digunakan adalah dengan mengundang camat untuk memberika pembekalan kepada peserta, untuk selanjutnya camat meneruskan kepada kepala desa-kepala desa yang daerahnya dilaksanakan KKN.

“ Nanti ada dinamika kelompok itu mempertemukan peserta KKN dengan DPL, jadi umpama berangkat/ penyerahan tanggal 15, nanti DPL dan peserta tanggal 10 atau 12 *survey* ke lokasi, mereka istilahnya kulonuwun ya. jadi memetakan, ketemu kepala desa, baru penyerahan di kecamatan. Nah sekarang cara bagaimana bertemu kepala desa pertama kali? Ini ada 2 model. Dulu pernah ngirim surat ke desa-desa, itu gak jalan, jadi ngundang kepala desa dengan surat itu gak jalan. yang efektif itu adalah lewat camatnya. kita raih dulu camatnya terus nanti camat itu desa mana yang diperlukan KKN, nanti bapak tolong kumpulkan kepala desa nanti tanggal sekian.”³³

Pemberangkatan peserta KKN dilaksanakan setelah pelepasan di Kampus IAIN Salatiga oleh Rektor IAIN, pemberangkatan ke

³³ *Ibid*

lokasi menggunakan bis yang disediakan oleh pihak kampus dan penanggung jawab bis tersebut adalah mahasiswa peserta KKN yang berasal dari daerah yang dituju.

“ Jadi kan satu kelompok KKN biasanya 9-10 orang, nanti satu lokasi 1 bis itu sudah di tata. Cara ngebis juga bagaimana mendapatkan bis jadi kita mencari kordinator bis, umpama tujuannya mau ke magelang berarti kita cari kordinator bis yang di magelang. kalau tujuannya ke Boyolali kita cari kordinator bis di Boyolali jadi memberdayakan.”³⁴

Selama pelaksanaan program pihak panitia penyelenggara KKN dalam hal ini LP2M IAIN Salatiga dan DPL melakukan supervisi dalam bentuk kunjungan ke lokasi KKN.

Sumber pendanaan KKN diperoleh dari DIPA IAIN Salatiga, Mahasiswa peserta KKN dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat.

b. Pengabdian kepada masyarakat oleh dosen

Pengabdian kepada masyarakat oleh dosen di lingkungan IAIN Salatiga dilakukan dengan program pengabdian yang bervariasi, diantaranya³⁵:

- 1) Pemberdayaan ekonomi umat
- 2) Pemberdayaan madrasah
- 3) Pemberdayaan masjid
- 4) Pemberdayaan pesantren

Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha ekonomi merupakan salah satu upaya dalam kerangka meningkatkan

³⁴ *Ibid*

³⁵ *Ibid*

taraf hidup dan kehidupan masyarakat. Program ini diberlakukan kepada kelompok-kelompok masyarakat kurang mampu, baik di perkotaan atau pedesaan. Pengabdian kepada masyarakat seperti yang disebutkan di atas disebar pelaksanaannya kepada fakultas-fakultas.

“ Kalau itu sistemnya kita gandeng fakultas. umpama nanti yang pesantren itu syariah, madrasah tarbiyah.”³⁶

Pelaksanaan pembagian segmentasi pengabdian yang dilakukan di atas dilakukan dengan kesepakatan antar fakultas. Setiap tahunnya fakultas dapat memilih dengan bebas segmentasi pengabdiannya, kesepakatan yang dihasilkan adalah kesepakatan yang dibuat ketika menyusun RKA-KL di tahun anggaran baru.

“ itu berdasarkan kesepakatan bisa pindah, umpama syariah tahun depan dapat pemberdayaan apa itu langsung kesepakatan pas di RKAKL, jadi nanti kamu mau apa gitu.”³⁷

Dengan pola yang dibuat sedemikian, LP2M hanya melaksanakan tugas pengawasan dengan membuat pedoman. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen sepenuhnya dilaksanakan secara teknis oleh fakultas-fakultas yang penyelenggaraan kegiatannya antara Juni-November.

Pengabdian kepada masyarakat termasuk di dalamnya adalah program syiar Ramadhan, dimana kegiatannya dilaksanakan oleh LP2M dengan menugaskan dosen-dosen untuk mengabdikan di lingkungan sekitar IAIN Salatiga. Selain menjadi program

³⁶ *Ibid*

³⁷ *Ibid*

pengabdian, kegiatan syiar ramadhan juga merupakan kegiatan yang di dalamnya terdapat ajang memperkenalkan kampus kepada masyarakat.

Selain syiar ramadhan di sekitar kampus, program pengabdian di bulan ramadhan juga dilaksanakan di dalam kampus. Program yang dilaksanakan adalah kajian selama ramadhan yang diisi oleh dosen-dosen dari fakultas yang ada di lingkungan IAIN Salatiga. Panitia pelaksanaannya terdiri dari wakil dekan III dari setiap fakultas.

Pada tahun 2014 P3M STAIN Salatiga menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dengan tema-tema seperti pada pelaksanaan tahun ini, hanya saja pengabdian yang dilakukan dilaksanakn langsung oleh P3M, tema-tema pengabdian yang dilaksanaka adalah:

1) Pemberdayaan Ekonomi Umat

Agenda pengabdian ini berupa workshop yang dikhususkan pada pemberdayaan di sektor peternakan, diselenggarakan untuk masyarakat terlebih adalah pengurus/takmir dan jamaah masjid, santri pada pesantren serta masyarakat pedesaan. Setelah agenda workshop P3M STAIN Salatiga melakukan pendampingan usaha Pengembangan Ekonomi berbasis Peternakan bagi para takmir dan jamaah masjid, santri pesantren dan masyarakat pedesaan di wilayah Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang dan sekitarnya. Materi workshop Peningkatan Produktivitas Masyarakat melalui Pengembangan Usaha Ekonomi Berbasis Kegiatan Peternakan adalah sebagai berikut :

- a) Peningkatan Produktivitas Ekonomi Keluarga melalui pengembangan usaha berbasis Peternakan.

- b) Strategi dan langkah-langkah pembudidayaan ternak kambing di lingkungan masyarakat pedesaan.
 - c) Teknologi alternatif penyiapan pakan ternak
 - d) Pembentukan kelompok usaha peternakan kambing di lingkungan masyarakat
- 2) Pemberdayaan Pesantren

Agenda pengabdian ini berupa workshop pengembangan kegiatan entrepreneur di lingkungan pesantren. . Setelah agenda workshop P3M STAIN Salatiga melakukan pendampingan Pengembangan Kegiatan Enterprener di Lingkungan Pesantren di wilayah Kota Salatiga dan sekitarnya adapun materi workshop adalah:

- a) Peranan Entrepreneur di lingkungan Pesantren.
 - b) Peluang dan Tantangan dalam pengembangan kegiatan entrepreneur di lingkungan pesantren
 - c) Manajemen dan Strategi pengembangan kegiatan entrepreneur di lingkungan pesantren
 - d) Pembentukan kelompok usaha entrepreneur di lingkungan pesantren.
- 3) Pemberdayaan Madrasah

Agenda pengabdian ini berupa workshop Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Implementasi Kurikulum 2013 bagi Guru-guru Madrasah di wilayah Kabupaten Temanggung. adapun materi workshop adalah:

- a) Strategi Implementasi Kurikulum 2013.
- b) Pendekatan scientific dalam pembelajaran sesuai Kurikulum 2013.

- c) Penyusunan perangkat pembelajaran sesuai Kurikulum 2013.
- d) Pengembangan model penilaian pendidikan dalam Kurikulum 2013

4) Pemberdayaan Masjid

Agenda pengabdian ini berupa workshop Pemberdayaan Manajemen dan Pemakmuran Masjid. Sebanyak 40 masjid di wilayah Kota Salatiga dan sekitarnya, adapun materi workshop adalah:

- a) Manajemen Program Kegiatan dan Administrasi Kemasjidan
- b) Krisis masjid dan Upaya Mengatasinya
- c) Strategi dan Langkah-Langkah Memakmurkan Masjid
- d) Orientasi Aplikasi Manajemen Program Kegiatan dan Administrasi Kemasjidan
- e) Orientasi Aplikasi Upaya Riil Mengatasi Krisis Masjid
- f) Orientasi Aplikasi Strategi dan Langkah-Langkah Memakmurkan Masjid.

3. Metode PkM di IAIN Salatiga

Proses yang dilalui dalam pelaksanaan program KKN di IAIN Salatiga adalah dimulai dengan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Tahap perencanaan yang dimaksud adalah dengan menyiapkan perangkat-perangkat penunjang KKN mulai dari membuat pedoman, petunjuk teknis, pembentukan panitia, pendaftaran DPL sampai pendaftaran peserta.. Tahap pelaksanaan dimulai dengan pembekalan, pelepasan di kampus dan penyerahan di lokasi KKN.

Pendaftaran peserta KKN memalui sistem yang *online* yang dimaksudkan untuk menyaring mahasiswa perserta KKN berdasarkan jenis kelamin, riwayat kesehatan dan lain-lain.

“ kita lewat internet, *online*. Mereka tau jadwalnya, secara administrasi mereka sudah selesai dibuktikan dengan ini. kemudian datang ke LP2M. daftar mereka. Cara daftar itu kita kan harus menentukan berapa putra berapa putri, mana yang hamil, siapa yang ada riwayat penyakit, kemudian jangan sampai asalnya orang mana penempatannya, itu sampai terdeksi begitu jadi gak ada orang desa itu KKN ditempatnya.”³⁸

Sebelum melaksanakan kegiatan KKN mahasiswa mendapatkan pembekalan berupa wawasan dan keterampilan praktis sesuai dengan kebutuhan. Yang dibekali kepada mahasiswa berupa materi yang berisi kebijakan KKN Tematik Posdaya berbasis masjid; peran KKN dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah; deskripsi peta desa dan masyarakat lokasi KKN; varian kegiatan ke-posdayaan dalam KKN teatik posdaya berbasis masjid; penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan program kerja KKN; dan dinamika kelompok.

Setelah itu diadakan rapat kerja dosen pembekalan KKN, hal ini dilaksanakan untuk membekali dosen pembimbing dengan materi sebagaimana disebutkan di atas, karena dosen pembimbing yang akan memberi kuliah pembekalan kepada mahasiswa. Terakhir dari proses ini adalah melaksanakan kuliah pembekalan KKN. Selain itu

³⁸ Disampaikan oleh Adang Kuswaya (Ketua LP2M IAIN Salatiga) pada wawancara tanggal 19 Juni 2016.

dalam proses pembekalan ini peserta akan dipertemukan dengan camat dari lokasi tempat dilaksanakan KKN.

“ Kalau hari pertama pembukaan oleh rektor menyampaikan pesan-pesannya, kemudian kepala pusat pengabdian menyampaikan teknis apa yang harus disiapkan dan bagaimana sampai laporan, kemudian peserta dibagi kelas-kelas berdasarkan kecamatan mana, karena nanti setiap camat itu di undang untuk menyampaikan peta lokasi garapannya apa.”³⁹

Pelaksanaan kegiatan KKN didahului dengan agenda pelepasan oleh rektor, selanjutnya pelaksanaan program, supervisi yang dilakukan oleh DPL dan tim supervisor, penulisan laporan dengan format sebagai berikut:

- 1) Sampul laporan dibuat berwarna hijau muda (hard cover)
- 2) Format tulisan sampul luar dan outline laporan, mengikuti petunjuk yang ditetapkan;
- 3) Laporan diketik satu setengah spasi di atas kertas kuarto, dijilid dan dicetak;
- 4) Ringkasan adalah ikhtisar atau intisari dari laporan KKN, berisi tentang analisis potensi dan masalah yang dihadapi, tujuan KKN, metode pendekatan, hasil-hasil yang dicapai, hambatan yang dihadapi, kesimpulan dan saran.
- 5) Ringkasan diketik satu spasi maksimal dua halaman, diletakkan di halaman paling depan pada laporan KKN.

³⁹ *Ibid*

BAB III

PEMBAHASAN

B. Implementasi Pengabdian kepada Masyarakat di beberapa PTKIN

Mandat perguruan tinggi melaksanakan kewajiban dalam tiga dharma (tridharma) perguruan tinggi, yakni pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sudah sangat lama dicanangkan, utamanya sejak UU Nomor 2 Tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional diberlakukan.

Implementasi pengabdian kepada masyarakat – yang sering ditempatkan sebagai dharma ke tiga – dalam tridharma perguruan tinggi di PTKIN pada mulanya mirip kegiatan dakwah. Ceramah, mengisi pengajian dan khutbah jumat merupakan gaya pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh kalangan sivitas akademika PTKIN. Apa yang dilakukan dalam bentuk kegiatan pengabdian seperti itu tidaklah salah, namun kurang terukur hasil capainnya. Ia hanya formalitas belaka dari sebuah kata menggugurkan kewajiban.

Pengabdian semacam itu sungguh suatu amal bakti yang mulia, lahir atas panggilan nurani untuk terjun ke masyarakat memberikan pencerahan melalui kegiatan dakwah. Mengabdikan adalah mengikhhlaskan, merelakan dan memberikan segenap potensi yang dimiliki, entah dalam bentuk ilmu (non fisik) atau dalam bentuk barang (fisik) kepada masyarakat yang benar-benar memerlukan. implementasi pengabdian semacam ini, -sekali lagi- tidak salah, namun yang diharapkan dari pengabdian kepada masyarakat yang menjadik kewajiban perguruan

tinggi maknanya tidak terhenti sampai disitu, ia mirip dengan dharma pendidikan, ada input, proses dan output.

Input pengabdian kepada masyarakat berupa penyiapan SDM pengabdian yang *qualified*. Dosen pengabdian bukan hanya asal mengabdikan, tetapi dia mesti memiliki keahlian sesuai dengan bidang ilmu yang ditekuninya. Dosen pengabdian perlu disiapkan, dilatih dan dibina untuk menjadi insan-insan pengabdian yang tangguh dan profesional. Pelatihan, workshop dan training pengabdian profesional merupakan sedertean program yang perlu dilakukan oleh setiap dosen. Pengabdian perlu dibuat berjenjang dan hierarkis, utamanya jika dana pengabdian disiapkan dari DIPA perguruan tinggi. Hal ini dimaksudkan agar ada kualifikasi pengabdian dengan besaran dana yang disiapkan dalam DIPA perguruan tinggi.

Proses pengabdian dilakukan dengan mengacu kepada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan bagian dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Di dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4834 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, pengabdian kepada masyarakat dilakukan dalam tujuh bentuk, yaitu :

1. Pembelajaran masyarakat, yakni suatu kegiatan yang ditujukan untuk belajar bersama masyarakat atau menguatkan kemampuan, potensi dan aset masyarakat, termasuk dialog, lokakarya, dan pelatihan.
2. Pendampingan masyarakat, yakni kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara intensif dan partisipatif agar tercapai kemandirian dari komunitas atau kelompok mitra.

3. Advokasi, yakni kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa menumbuhkan kepekaan sosial, politik, dan budaya, serta kapasitas/ kemampuan untuk memperjuangkan dan memperoleh hak-hak sebagai warganegara.
4. Pemberdayaan ekonomi, yakni kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pendapatan.
5. Layanan masyarakat, yakni penyediaan layanan masyarakat seperti layanan keagamaan, kesehatan, mediasi, resolusi konflik, konsultasi (psikologi, keluarga, hukum, pembuatan rencana bisnis, proyek), pelatihan, penelitian, dan lain-lain.
6. Ujicoba, adaptasi serta penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG) berbasis IPTEKS, yakni kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pengembangan dan penerapan hasil penelitian (*action research*) ataupun teknologi sederhana untuk mengembangkan potensi dan peluang yang terdapat pada suatu komunitas masyarakat. Misalnya pembuatan alat produksi, pembuatan sistem manajemen, dll.
7. Kegiatan sosial yang bersifat karitatif, seperti bantuan untuk korban bencana alam dan sosial.

Sedangkan output pengabdian kepada masyarakat bisa berbentuk penilaian dosen pengabdian terhadap pemahaman dan kepuasan masyarakat atas kegiatan yang dilakukan dengan berbagai instrumen test. Selain itu, output dari pengabdian ini bisa berupa publikasi hasil pengabdian dalam jurnal, buku dan memperoleh Haki.

Baru dua tahun terakhir ini, setelah “desakan” ide tentang maha pentingnya dharma pengabdian kepada masyarakat Kementerian

Agama dilakukan, melalui suatu kegiatan bernama “Review Kebijakan di Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat Review of the current status of policies and practices regarding community development programs, community services and university-community outreach in the IHES and Develop a strategic policy/ planning documents to support these SILE, yang diselenggarakan di Bali pada April 2014, barulah tatakelola pengabdian kepada masyarakat berdenyut kencang di Kementerian Agama yang diikuti oleh beberapa PTKIN.

Sungguhpun demikian, dari hasil data yang dihimpun dalam penelitian ini, implementasi pengabdian kepada masyarakat sudah dilakukan di PTKIN mengikuti pola yang kemudian dibangun oleh Kementerian Agama, misalnya Pusat Pengabdian kepada Masyarakat LP2M UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (dan juga PTKIN lainnya) telah memulai beragam bentuk pengabdian dosen kepada masyarakat – yang disebut dengan PpMD – sejak tahun 2011. Jenis kegiatan ini dan beberapa variannya juga dilakukan di Kementerian Agama melalui Direktorat Pendidikan Tinggi Islam dalam program bantuan peningkatan mutu pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan setiap tahun dalam bentuk kompetisi.

Implementasi pengabdian kepada masyarakat di beberapa PTKIN dilaksanakan dalam berbagai bentuk dan pola. Mulai dari program pengabdian berbentuk persiapan, semisal pelatihan atau workshop metodologi pengabdian, dan short course community outreach, kemudian program implementatif pengabdian, seperti pengabdian dosen dan mahasiswa di dalam menerapkan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh dosen dan mahasiswa dalam beragam

bentuk serta deseminasi hasil pengabdian dalam bentuk jurnal, haki, dan reward pengabdian.

Alhasil, dalam lima tahun terakhir ini mayoritas PTKIN yang diteliti telah mengimplementasikan pengabdian kepada masyarakat dalam beragam bentuk dan pola. Letak perbedaan dari masing-masing implementasi itu merupakan karakter yang lazim dimiliki setiap PTKIN. Misalnya, di Pusat Pengabdian kepada Masyarakat LP2M UIN Walisongo, terdapat program Karya Pengabdian Dosen (KPD), di UIN Bandung ada program Pengabdian Dosen berbasis hasil riset dan berbasis desa mitra kampus dan sebagainya. Perbedaan implementasi ini merupakan bentuk yang pantas saja dimiliki oleh PTKIN yang pada dasarnya program tersebut merupakan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen dengan sebutan nama program yang berbeda.

Potret implementasi pengabdian di PTKIN ini tidak bisa disebut mewakili seluruh PTKIN Indonesia mengingat sampel dalam penelitian ini, data lengkapnya hanya beberapa PTKIN saja. Sangat boleh jadi di beberapa tempat yang tidak dijadikan objek dalam penelitian ini implementasi pengabdiannya sudah jauh lebih baik, misalnya di UIN Surabaya dan UIN Makassar yang didampingi dengan project SILE tentu hasilnya akan berbeda dengan PTKIN yang tidak didampingi secara langsung, demikian pula sebaliknya, akan ditemukan beberapa PTKIN yang implementasi pengabdiannya baru sebatas KKN yang selama ini dilakukan mahasiswa.

Bagaimanapun keadannya, PTKIN yang diteliti telah menggeser implementasi pengabdian kepada masyarakat dari yang konvensional, tradisional dan tidak variatif berubah ke program yang lebih terukur

dan program yang lebih jelas terkait dengan keahlian dosen dan mahasiswa di dalam melaksanakan pengabdianannya. Hal ini sesuai dengan definisi pengabdian kepada masyarakat yang dimandatkan dalam undang-undang pendidikan tinggi dan peraturan turunannya yang diatur di dalam Keputusan Menteri Agama dan Keputusan Dirjen Pendidikan Islam tentang pengabdian kepada masyarakat bahwa pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika di dalam memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi guna kesejahteraan dan kemajuan bangsa.

C. Bentuk dan Metode Pengabdian kepada Masyarakat

PTKIN yang menjadi objek penelitian ini telah melakukan beragam bentuk dan metode pengabdian kepada masyarakat. Secara garis besar, bentuk pengabdian kepada masyarakat terdiri dari pengabdian yang dilakukan oleh dosen dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa. Sedangkan metode pengabdian kepada masyarakat merupakan tahapan mengenai suatu program pengabdian yang terdiri dari persiapan, pelaksanaan dan evaluasi.

Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa dilakukan dengan metode yang sistematis, mulai dari persiapan, pelaksanaan dan evaluasi atau penilaian. Misalnya Pengabdian pada Masyarakat oleh Dosen (PpMD), Karya Pengabdian Dosen (KPD), Pengabdian Dosen kepada Masyarakat (PDKM) dalam bentuk berbasis hasil riset, desa mitra kampus dan lokasi KKN memiliki metode yang jelas, yaitu diawali dari penyusunan proposal, penilaian proposal, penetapan pemenang proposal, pelaksanaan pengabdian dan seminar hasil pengabdian. Demikian pula dengan

pengabdian mahasiswa kepada masyarakat dalam kegiatan KKN. Diawali dari persiapan survei lokasi, penyusunan buku pedoman, rekrutmen DPL, pelaksanaan pengabdian dan evaluasi/penilaian hasil KKN.

Khusus tentang bentuk kegiatan KKN, pada beberapa PTKIN sejumlah jenis KKN sangat begitu variatif. UIN Jakarta, UIN Bandung, UIN Semarang dan UIN Yogyakarta jenis KKN-nya sudah lebih dari 2, yaitu KKN Reguler, KKN Mandiri (KKN mandiri inipun lebih banyak lagi variasinya), KKN Tematik Posdaya dan KKN Internasional. Hal ini menunjukkan bahwa bentuk pengabdian mahasiswa kepada masyarakat sudah mulai nampak terlihat variasinya. Namun demikian, jika menoleh ke samping di PTN lingkungan Kemenristekdikti, jenis pengabdian kepada mahasiswa sudah lebih maju karena selain cakupan program dan sarannya, juga tersedia anggaran bagi mahasiswa yang memadai secara kompetitif dengan nama program KKN-PPM bagi Perguruan Tinggi di Indonesia.⁴⁰

Serangkaian bentuk pengabdian kepada masyarakat ini pada banyak hal telah mengubah suatu pola pengabdian yang sederhana menjadi program pengabdian yang terencana. Dosen melihat terdapat problem sosial yang perlu dituntaskan, masyarakat bersedia didampingi, diajukan proposal guna memperoleh bantuan dana dari kampus, dosen melakukan pengabdian dengan satu misi “bertekad merubah” dari masyarakat yang serba “tidak” menjadi masyarakat

⁴⁰ Anonimous, *Panduan pelaksanaan Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Di Perguruan Tinggi Edisi X Tahun 2016*. (Jakarta: Direktorat Riset dan Pengabdian kepada , Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2016). Hlm. 517

berdaya yaitu masyarakat yang sejahtera dan cerdas serta akhirnya disusun suatu publikasi atas hasil pengabdianannya itu.

Bentuk pengabdian semacam ini merupakan program baru, jika dibanding dengan bentuk pengabdian kepada masyarakat dengan bentuk yang sangat sederhana, ceramah di masjid dan majelis taklim.

Sekalipun bentuk-bentuk pengabdian itu sudah diatur dalam peraturan perundangan, namun belum tampak dari hasil penelitian ini PTKIN yang bermitra secara institusional menuntaskan probem masyarakat dengan institusi di luar kampus, seperti pemerintah daerah, NGO, dana dari luar negeri dan pihak industri. Kerjasama (kemitraan) ini baru dijalin antara kampus dengan masyarakat atau komunitas di dalam masyarakat yang berbentuk lembaga sosial keagamaan, dan lembaga hukum.

Selain itu, bentuk pengabdian yang dilakukan oleh PTKIN sedikit demi sedikit telah mendekati standar nasional pengabdian kepada masyarakat misalnya pengabdian kepada masyarakat berupaya menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan. Hal ini bisa dilihat dalam metode pengabdian yang menggunakan sistem pengajuan proposal yang dilakukan oleh dosen.

Namun yang belum membudaya dari hasil pengabdian yang diselenggarakan PTKIN tersebut berupa dampak pengabdian bagi dharma pendidikan, yang dalam hal ini hasil pengabdian berupa bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.

Pelaksana Pengabdian pada masyarakat yang telah melakukan pengabdian dengan hasil yang baik, (baik respon dari masyarakat mitra pengabdian maupun deseminasi hasil pengabdian yang terpublikasi di

dalam jurnal dan buku maupun keuinikan di dalam melaksanakan pengabdian) patut memperoleh reward yang pantas. Hal ini sejalan dengan tugas pengelola pengabdian kepada masyarakat yang dicantumkan di dalam Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat (Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang SNPT) pada Pasal 62 ayat (1) huruf g bahwa lembaga yang mengelola pengabdian kepada masyarakat “memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi”. Pusat Pengabdian kepada Masyarakat LP2M UIN Syahid Jakarta pada tahun 2016 ini telah mencanangkan apa yang disebut dengan *Pengabdian Award* bagi sivitas akademika yang berprestasi di bidang pengabdian. PTKIN lain sejauh ini belum melangkah menyusun program penghargaan bagi pengabdi yang berprestasi.

Problem pendanaan rupanya menjadi masalah mendasar pengabdian di PTKIN yang berdampak pada bentuk dan metode pengabdian. Porsi anggaran BOPTN misalnya, masih 30% ke pendanaan penelitian di UIN SGD Bandung. Namun ketersediaan dana dari sumber lain yang disediakan PTKIN, misalnya dari BLU belum merata di setiap PTKIN. Pusat Pengabdian kepada masyarakat LP2M UIN Walisongo dan UIN Sunan Kalijaga yogyakarta misalnya, mendapat dana KKN dari pendaftaran peserta sebagai dana BLU. KKN di sana tidak menggunakan dana BOPTN tetapi bersumber dari pendaftaran mahasiswa KKN.

Mandat peraturan perundangan mengenai pendanaan program pengabdian kepada masyarakat mestinya menjadi kesadaran bersama seluruh elemen PTKIN untuk disediakan juga dalam dana BLU. Pasal 63 ayat (2) dan (3) berkenaan dengan standar pembiayaan pengabdian

kepada masyarakat menyebutkan bahwa perguruan tinggi wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat. Selain dari dana internal perguruan tinggi, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. Lebih tegas lagi dibunyikan di dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4834 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam pada bagian pembiayaan menyebutkan bahwa Pembiayaan program dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat terintegrasi dengan program dan pembiayaan penelitian, yaitu sebesar 30% dari total anggaran Kementerian Agama yang diperuntukkan bagi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam setiap tahunnya. Selain alokasi anggaran di atas, Pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam wajib mengalokasikan dana sebesar 10% dari total anggaran masing-masing Perguruan Tinggi Keagamaan Islam setiap tahunnya.

Dengan demikian, bentuk dan metode pengabdian kepada masyarakat pada PTKIN yang diteliti telah banyak berubah dari program pengabdian kepada masyarakat pada masa-masa sebelumnya. Yang patut memperoleh perhatian dari penelitian ini bahwa hasil pengabdian kepada masyarakat, kemitraan dan pendanaan dalam seluruh bentuk kegiatan dan metodenya yang dilaksanakan oleh PTKIN perlu terus dibenahi. Hasil pengabdian harus dipastikan seberapa besar kemanfaatannya bagi masyarakat diperlukan instrumen penilaian yang jelas, termasuk juga kemitraan perguruan tinggi dalam melaksanakan pengabdian perlu terus dikembangkan agar tugas memberikan

pengabdian bisa berbagi dengan elemen pemerintah lain atau pihak lain, baik dari segi pendanaannya maupun fasilitas lainnya.

D. Konsep Ideal Pengabdian kepada Masyarakat di PTKIN

Setelah potret mengenai implementasi, bentuk dan metode pengabdian kepada masyarakat dipetakan pada PTKIN yang menjadi objek penelitian ini, terlihat masih terdapat ruang-ruang kosong yang nampaknya perlu ditutupi agar implementasi pengabdian kepada masyarakat semakin kokoh di PTKIN. Oleh karena itu, pada bagian ini akan dirumuskan konsep pengabdian kepada masyarakat yang ideal setelah melihat implementasi pengabdian di PTKIN dalam penelitian ini.

Tridharma perguruan tinggi merupakan kewajiban perguruan tinggi di dalam melaksanakan pendidikan/pengajaran, penelitian dan pengabdian.⁴¹ Konsep tridharma ini merupakan konsep yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain, antara pendidikan, penelitian dan pengabdian seluruhnya memiliki keterkaitan. Seorang dosen yang mengajar, bahan ajarnya mesti dari hasil penelitian dan hasil pengabdian. Dosen yang sedang meneliti dapat sekaligus memberdayakan masyarakat dan mengajarnya. Demikian pula dosen yang melakukan pengabdian, dapat digunakan cara mengajar (ceramah,

⁴¹ sejarah sosial pengabdian kepada masyarakat bahwa sejak awal kemerdekaan, kehadiran perguruan tinggi di Indonesia sudah aktif melaksanakan tugas dan kegiatan sebagai pusat pendidikan dan pengajaran, pusat penelitian ilmiah serta pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni bagi masyarakat, bangsa dan negara. Tiga bidang tugas dan kegiatan tersebut pada waktu itu diungkapkan sebagai "tri saka guru" perguruan tinggi, yakni "pendidikan, penelitian, afiliasi industri dan pembangunan". Tiga bidang tugas dan peran itu yang akan menjadi inti bakal konsepsi tridharma perguruan tinggi di Indonesia (reksowardojo, 1985). Lihat mudjia rahardjo, "sejarah sosial pengabdian kepada masyarakat dalam <http://tulisanterkini.com/artikel/keislaman/umum/4767-hakikat-dan-asas-pengabdian-kepada-masyarakat.html>

memberikan pelayanan dsb) serta sekaligus melakukan kajian/penelitian. Sekalipun terdapat pembobotan dalam setiap dharma itu dengan SKS sebagai beban kerja dosen, namun hal itu tidak dimaksudkan sebagai pemisahan antara satu dharma dengan dharma lain dengan tujuan mengecilkan masing-masing isi dari tridharma.

Namun demikian, tridharma perguruan tinggi ini bukan anti terhadap koreksi, sebab di dalamnya terkandung sebuah tanggungjawab berat untuk dilaksanakan oleh setiap dosen. Dalam zaman yang serba berubah cepat seperti sekarang ini, apakah dosen dapat melakukan kerja profesional sebagai pengajar, peneliti dan pengabdian sekaligus ? hal ini perlu dijawab secara mendalam, sebab jika muaranya berakhir pada kata sepakat perlu ada pemisahan antara dosen sebagai pengajar, peneliti dan pengabdian maka akan banyak hal yang perlu diubah, mulai regulasi sampai dengan tatakelola dosen di perguruan tinggi. Biarlah diskusi tentang hal ini diperluas dalam bagian atau forum lain.⁴²

Salah satu bagian dari tri dharma perguruan tinggi itu adalah pengabdian. Jika dihayati dengan mendalam sesungguhnya wajah sebuah perguruan tinggi pada permukaan luarnya terletak dalam

⁴² rumusan tri dharma pt sebetulnya bukan sesuatu yang benar-benar baru. Dalam kongres permusjawaratan pendidikan indonesia yang diselenggarakan di surakarta pada tahun 1947, soepomo menyatakan dalam makalahnya yang berjudul "sekolah perguruan tinggi" bahwa fungsi perguruan tinggi di indonesia adalah sebagai badan pusat ilmu-ilmu pengetahuan dan kebudayaan, dan sebagai badan untuk mendidik para calon pemimpin yang memerlukan pendidikan tinggi guna kepentingan masyarakat dan negara. Pada kongres yang sama, soenaria kalapaking, dalam makalahnya yang berjudul "hal universiteit", juga mempunyai pandangan yang kurang lebih sama dengan soepomo. Menurut kalapaking, fungsi universiteit (baca: pt) adalah menjadi koordinator dan pendorong dalam usaha mempelajari dan mengembangkan ilmu-ilmu pengetahuan dan memberi penerangan kepada masyarakat dalam membangun kebudayaan baru dan tata negara baru, serta mendidik tenaga-tenaga yang dibutuhkan masyarakat dan perlu mendapat didikan secara ilmu pengetahuan. Apa yang diusulkan oleh kalapaking jelas mencakup tiga misi pt yang kemudian disebut sebagai tri dharma pt itu. Lihat hendra gunawan, "meninjau ulang tridharma pt, dalam <http://personal.fmpa.itb.ac.id/hgunawan/files/2014/01/>, diakses 3 agustus 2016

dharma pengabdian kepada masyarakat. Sebuah PT sejauh mana memberi manfaat dan dampak bagi suatu masyarakat dan bangsa terletak dari dharma pengabdian ini. Dalam perspektif pengabdian kepada masyarakat, sebuah perguruan tinggi yang baik adalah perguruan tinggi yang mampu melakukan perubahan sosial melalui dharma pengabdian kepada masyarakat. Di sinilah letak tanggungjawab perguruan tinggi tersebut diuji.

Dalam konteks PTKIN, yang secara historis berasal dari masyarakat, dharma pengabdian kepada masyarakat merupakan tanggungjawab yang sama-sama perlu dipikul dengan dua dharma lain secara sistemik. PTKIN bukan menara gading (*ivory tower*) yang menjaga jarak dengan realitas empirik masyarakat. PTKIN wajib memberdayakan masyarakat melalui dharma pengabdian. Tata kelola pengabdian sama perlunya disiapkan dengan tata kelola pendidikan dan penelitian, baik dari segi SDM, pembiayaan dan kelembagaan.

Kemudian, bagaimana konsep ideal pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di PTKIN ini ? jawabanya bisa dilihat dengan melakukan beberapa pendekatan tata kelola pengabdian, yaitu:

- 1) Perencanaan. Pengabdian kepada masyarakat yang dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan telah disusun dalam rencana institusi, baik renstra, pedoman, panduan dan juknis pengabdian kepada masyarakat. Setiap dosen hendaknya telah menyusun rencana pengabdian setiap semester berdasarkan keahlian yang dimiliki yang selanjutnya diberikan surat tugas oleh LP2M untuk melaksanakan pengabdian. Seperti dalam dharma pendidikan, setiap dosen yang mengajar tercantum surat tugas yang berisi hari, jam, kelas dan matakuliah yang hendak diajarkan. Demikian pula

dengan perencanaan pengabdian. LP2M memberikan tugas yang berisi waktu, tempat dan sasaran masyarakat yang menjadi mitra pengabdian kepada setiap dosen. Dalam kegiatan semacam ini, perguruan tinggi tidak mengeluarkan biaya karena pelaksanaan pengabdian semacam itu menjadi tugas dan fungsi dosen yang sudah dibayar setiap bulan melalui tunjangan profesi. Tahapan dalam kegiatan pengabdian yang terencana seperti ini, para dosen memastikan dengan jelas metode, bahan ajar pengabdian, tempat dan evaluasi yang akan diberikan kepada masyarakat. Jika pembelajaran di kampus objeknya adalah mahasiswa sebagai pelaksanaan dari dharma pendidikan, maka pembelajaran di luar kampus objeknya adalah masyarakat sebagai pelaksanaan dari dharma pengabdian. Beban kerja dosen setiap semester dalam pembelajaran setara dengan 6-9 SKS dan dalam pengabdian setara dengan 1 SKS atau 50 jam minimal;

- 2) Pelaksanaan. Pengabdian dosen yang dilaksanakan oleh LP2M mestinya bersifat *distingtif* antar PTKIN. Pelaksanaan pengabdian dengan biaya BOPTN (saat ini) bisa dilaksanakan secara kompetitif dengan dua varian, yaitu berbasis prodi (mono disiplin) atau berbasis multi prodi (multi disiplin). Jenis kegiatannya diserahkan kepada pengelola pengabdian, yaitu pusat pengabdian kepada masyarakat pada setiap PTKIN. Dalam surat keputusan dirjen, bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat memilih salah satu dari 7 kegiatan. Namun demikian, PTKIN mestinya memiliki *distingsi* dalam pelaksanaan program pengabdian yang menjadi karakter dari setiap PTKIN dengan mempertimbangkan budaya lokal masing-masing daerah. Distingsi

dalam hal ini dapat diartikan sebagai suatu program yang beda dengan kegiatan lain di PTKIN dalam hal pengabdian.

- 3) **Kemitraan.** Kemitraan Universitas dan Masyarakat yang dimandatkan dalam Keputusan Dirjen tentang PkM di PTKIN belum dimanfaatkan oleh banyak PTKIN sehingga pengabdian kepada masyarakat seolah-olah hanya milik PTKIN, padahal tanggungjawab memberdayakan masyarakat bisa dilakukan dengan cara kemitraan. Salah satunya bisa ditempuh melalui MoU antara kampus dengan pihak lain yang kemudian diturunkan pada Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau Surat Perintah Kerja (SPK). MoU ini hendaknya dimanfaatkan oleh dosen pengabdian yang hendak mengusulkan proposalnya untuk bermitra dengan pihak lain. Misalany ada MoU dengan Pemerintah Daerah. MoU ini bisa dimanfaatkan oleh para pengabdian atau dosen pembimbing lapangan untuk melakukan pengabdian dengan biaya sharing dari ke dua belah pihak atau pihak kampus hanya menyediakan SDM-nya.
- 4) **Evaluasi.** Seperti dharma pendidikan, dalam setiap pengajaran selalu diadakan tes, baik melalui UTS maupun UAS. Demikian pula evaluasi terhadap pelaksanaan pengabdian dapat dilakukan dengan penilaian terhadap masyarakat yang dijadikan mitra pengabdian. Penilaian bisa dilakukan dengan cara pre test dan post test bagi kegiatan yang menggunakan bentuk pembelajaran dan penilaian terhadap kepuasan pengabdian bagi bentuk pengabdian yang menggunakan pelayanan, pendampingan, advokasi dan sebagainya.

Gambaran pengabdian yang ideal di atas didasarkan atas telaah data dari pengabdian yang dilaksanakan di PTKIN. Secara umum,

implementasi program pengabdian kepada masyarakat di PTKIN yang diteliti sudah cukup baik, namun perlu kiranya ada karakteristik yang tegas tentang apa dan bagaimana konsep pengabdian ideal itu. Hal ini dapat dilihat dalam tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1
Karakteristik Pengabdian ideal dan pengabdian tidak ideal

No	Pengabdian Ideal	Pengabdian tidak Ideal
1	Ada perencanaan yang baik	Tidak atau belum terencana
2	Dilaksanakan secara sistemik seperti dharma pembelajaran	Dilaksanakan parsial, sewaktu-waktu ada kebutuhan
3	Cakupan programnya luas	Cakupan programnya sempit
4	Linier dengan bidang ilmu	Tidak linier, sesuai selera masing-masing
5	Terintegrasi dengan riset dan pembelajaran	Belum terintegrasi, masih parsial
6	SDM yang terlatih, certified	Siapa saja
7	Ada quality assurance	Tidak ada quality assurance
8	Ada proses evaluasi terhadap program pengabdian	Tidak ada evaluasi terhadap program pengabdian
9	Wajib publikasi	Belum ada publikasi

10	Rewardnya jelas	Reward belum jelas
11	Ada pengakuan angka kredit yang pantas	Angka kredit kecil sekali
12	Dapat dipatenkan	Belum dipatenkan
13	Pengelola pengabdian yang profesional	Pengelola tidak profesional
14	Bermitra dengan instansi lain	Tidak bermitra dengan institusi lain
15	Anggarannya proporsional	Anggarannya kecil

Sumber : diolah dari berbagai regulasi tentang pengabdian kepada masyarakat di PTKIN

Beberapa karakteristik pengabdian yang ideal telah dipraktikkan oleh PTKIN yang menjadi objek penelitian ini. Yang belum nampak ideal dapat dirasakan dari beberapa karakteristik, seperti SDM yang terlatih untuk pengabdian masih belum seragam ada di lingkungan PTKIN. Jika dalam penelitian ada peneliti dengan jenjang dan kualifikasi tertentu karena sudah mengikuti beberapa pelatihan penelitian, maka dalam pengabdian masih belum banyak PTKIN yang mencanangkan para pengabdian yang *qualilfield* yang lahir dari proses pelatihan pengabdian. Bahkan, sudah saatnya jika ada program nasional yang digagas oleh dikti untuk dilaksanakan pelatihan pengabdian bagi dosen PTKIN.

Demikian pula tentang publikasi. Hasil penelitian lebih banyak ditulis pada jurnal penelitian sedangkan hasil pengabdian belum banyak yang terpublikasi dalam jurnal pengabdian sehingga perlu ada dorongan kuat dari para pengelola pengabdian tentang keharusan melahirkan adanya jurnal, utamanya jurnal terakreditasi.

Hasil pengabdian yang dipatenkan, menjalin kemitraan dan penganggaran yang proporsional merupakan pekerjaan rumah PTKIN lainnya yang terus perlu dikejar agar tercapai kata ideal di bidang pengabdian. Kata kunci dari semua itu ialah ada dorongan kuat dari pimpinan PTKIN agar meluangkan kebijakan yang mendorong pengabdian yang bisa dipatenkan, kemitraan yang solid dan penganggaran yang memadai.

Akhirnya, dorongan menciptakan dharma pengabdian kepada masyarakat yang ideal di PTKIN menjadi tanggungjawab seluruh sivitas akademika. Prosesnya perlu diperjuangkan bersama agar hutang konstitusi⁴³ tentang pengabdian segera dapat dilunasi kepada masyarakat Indonesia karena kehadiran PTKIN disyukuri eksistensinya oleh masyarakat Indonesia disebabkan membawa kesejahteraan dan kecerdasan bagi bangsa dan negara.

Penelitian implementasi ini menegaskan suatu keterbatasan penelitian dimana pengabdian kepada masyarakat di PTKIN belum ditemukan distingsinya, evaluasi dan penilaian hasilnya serta sebaran publikasinya sehingga para peneliti lain dapat dengan mudah melanjutkan penelitian berikutnya mengenai hal ini. Selain itu,

⁴³ setidaknya terdapat 7 (tujuh) peraturan perundangan yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat yang perlu dioptimalkan realisasinya, yaitu:

1. UU No 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional;
2. UU No 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi;
3. PP 23 Tahun 2005 tentang badan layanan umum (BLU);
4. Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi
5. Peraturan Menteri Agama RI nomor 55 tahun 2014 tentang penelitian dan pkm pada perguruan tinggi keagamaan;
6. Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi. Pada bab iv standar nasional pengabdian kepada masyarakat;
7. Keputusan direktur jenderal pendidikan Islam nomor 4834 tahun 2015 tentang pedoman pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi keagamaan islam.

penelitian inipun menemukan bantahan tentang teori atau konsep pengabdian yang selama ini dicantumkan di dalam peraturan perundangan mengenai program, bentuk dan model pengabdian di PTKIN belum optimal, melainkan sebaliknya bahwa program, bentuk dan model pengabdian di PTKIN sudah baik. Kekurangan di sana sini merupakan tanda bahwa hidup tidaklah sempurna dan perlu terus dibenahi untuk mendekati kesempurnaannya.

BAB IV

SIMPULAN DAN SARAN

E. Simpulan

Berdasarkan pada uraian-uraian di bab sebelumnya, dapatlah kiranya ditarik simpulan sebagai berikut:

- 1) Implementasi pengabdian kepada masyarakat di PTKIN dilakukan dalam beragam bentuk dan pola. Letak perbedaan dari masing-masing implementasi itu merupakan karakter yang lazim dimiliki setiap PTKIN. Implementasi pengabdian kepada masyarakat di PTKIN yang diteliti telah berubah dari yang konvensional, tradisional dan tidak variatif menuju ke program yang lebih terukur dan program yang lebih jelas terkait dengan keahlian dosen dan mahasiswa di dalam melaksanakan pengabdianannya. Hal ini sesuai dengan definisi pengabdian kepada masyarakat yang dimandatkan dalam undang-undang pendidikan tinggi dan peraturan turunannya yang diatur di dalam Keputusan Menteri Agama dan Keputusan Dirjen Pendidikan Islam tentang pengabdian kepada masyarakat bahwa pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika di dalam memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi guna kesejahteraan dan kemajuan bangsa.
- 2) Bentuk Pengabdian kepada Masyarakat di PTKIN yang menjadi objek penelitian ini telah dilakukan dalam beragam bentuk pengabdian kepada masyarakat. Secara garis besar, bentuk pengabdian kepada masyarakat terdiri dari pengabdian yang dilakukan oleh dosen dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa. Serangkaian bentuk pengabdian

kepada masyarakat ini pada banyak hal telah mengubah suatu pola pengabdian yang sederhana menjadi program pengabdian yang terencana.

- 3) Metode Pengabdian kepada Masyarakat di PTKIN merupakan tahapan mengenai suatu program pengabdian yang terdiri dari persiapan, pelaksanaan dan evaluasi. Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa dilakukan dengan metode yang sistematis, mulai dari persiapan, pelaksanaan dan evaluasi atau penilaian. Yang patut memperoleh perhatian dari penelitian ini bahwa hasil pengabdian kepada masyarakat, kemitraan dan pendanaan dalam seluruh bentuk kegiatan dan metodenya yang dilaksanakan oleh PTKIN perlu terus dibenahi.

F. Saran

Penelitian ini sesungguhnya masih terbatas pada kajian mengenai aspek implementasi pengabdian kepada masyarakat pada beberapa PTKIN sehingga para peneliti lain yang meminati tentang pengabdian kepada masyarakat dapat mengkaji lebih lanjut tentang evaluasi pengabdian kepada masyarakat. Hal ini didasari karena setiap pengabdian kepada masyarakat memiliki input, proses dan out put yang salah satu outputnya adalah evaluasi kegiatan pengabdian. Selain itu, out put juga bisa dimaknai lebih luas menjadi sebuah produk pengabdian berupa karya pengabdian, yakni buku dan jurnal. Para peneliti lain dapat memastikan seberapa banyak dan seberapa hebatnya publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat pada beberapa PTKIN.

Selain adanya keterbatasan, penelitian ini memberikan rekomendasi kepada pengelola Pusat Pengabdian kepada Masyarakat bahwa :

- 1) Diperlukan adanya sebuah metodologi yang memungkinkan disepakati oleh seluruh pengelola PkM di PTKIN bahwa para pengabdian semestinya sudah dilatih pada saat mereka melakukan program pengabdian dalam sebuah kegiatan pelatihan metodologi pengabdian;
- 2) Mahasiswa KKN yang melakukan pembelajaran di tengah masyarakat seyogiannya dibekali juga dengan metodologi pengabdian, apakah terintegrasi dalam suatu perkuliahan dengan nama matakuliah “metodologi pengabdian” atau dilatihkan dalam program pembekalan atau orientasi KKN yang setara dengan 16 jam;
- 3) Penganggaran yang belum proporsional pada seluruh kegiatan PkM perlu mendapat perhatian yang sungguh-sungguh agar pimpinan PTKIN segera merealisasikan anggaran PkM yang 30% terintegrasi dengan penelitian ditambah 10% anggaran disediakan perguruan tinggi sesuai amanat keputusan dirjen tentang PkM di PTKIN dalam bagian pembiaayaan;
- 4) Menggalakkan kegiatan PkM yang berpotensi haki dari segenarp sivitas akademika sehingga tagihan dari PkM semakin dirasa bermanfaat;
- 5) Menyelenggarakan pemberian anugerah (*award*) pengabdian kepada para dosen dan mahasiswa yang bidang, bentuk dan metode pengabdian memberikan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Annonymous, *Arah pengembangan dan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat Lampiran Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor : 78/UN25/TU/2013.*

----- (2011) *Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat.* Jakarta: LP2M UIN Syahid.

----- (2013). *Panduan Penulisan Proposal Program Hibah PkM Universitas Padjadjaran 2013.* Bandung: LPPM UNPAD.

----- (2015). *Panduan KKN ABCD.* Surabaya: UIN Sunan Ampel.

----- (2015). *Panduan Perencanaan dan Penyusunan Proposal CBR Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.* Surabaya: UIN Sunan Ampel.

----- (2015). *Regulasi Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.* Jakarta: Dirjen Pendis.

----- (2016) *Buku Pedoman Karya Pengabdian Dosen (KPD) Tahun 2016 Program Peningkatan Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat.* Semarang: LP2M UIN walisongo Semarang.

----- (2016) *Buku Pedoman Kuliah Kerja Nyata (Kkn) Tematik Posdaya Berbasis Masjid Universitas Islam Negeri (UIN) Walisong Angkatan Ke-66 Tahun 2016.* Semaarang: LP2M UIN Walisongo

----- (2016) *Panduan KKN UIN SGD Bandung.* Bandung: Pusat pengabdian LP2M.

- , (2016). *Buku Pedoman Karya Pengabdian Dosen (KPD) Tahun 2016 Program Peningkatan Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat*. Semarang: LP2M UIN walisongo Semarang.
- , (2016). *Buku Pedoman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Posdaya Berbasis Masjid Universitas Islam Negeri (Uin) Walisongo Angkatan Ke-66 Tahun 2016*. Semarang: LP2M UIN Walisongo
- , (2016). *Buku Pedoman Kuliah Kerja Nyata KKN Mandiri Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang*. Semaarang: LP2M UIN Walisongo.
- , (2016). *Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat*. Bandung: LP2M UIN SGD Bandung.
- , (2016). *Petunjuk Teknis Pengabdian Dosen kepada Masyarakat*. Bandung: LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- , (2016). *Petunjuk Teknis Pengabdian Masyarakat oleh Dosen Tahun 2016*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- , (2016). *Prunjuk Teknis Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Posdaya Berbasis Masjid Mahasiswa S-1 Semester Genap Tahun Akademik 2015/2016*. Salatiga: LP2M IAIN Salatiga.
- , (2016). *Pedoman Pelaksanaan KKN Tematik POSDAYA (Pos Pemberdayaan Keluarga)*. Cirebon: LP2M IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- , (2016). *Panduan Teknis KKN Tematik POSDAYA (Pos Pemberdayaan Keluarga)*. Cirebon: LP2M IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- Eva Nugraha. 2016. *Panduan Untuk Survei Lokasi Kkn-Ppmm 2016* Jakarta : Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat Lp2m Uin Syarif Hidayatullah Jakarta.

- Gary Paul Green and Anna Haines. (2016). *Asset Building Community Development*. Sage Publication, United State of America.
- Iman Mustofa, “Paradigma Pengabdian Di PTKI” dalam <http://stainmetro.ac.id>, diakses 11 Agustus 2016.
- Lexy J. Moleong. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Lubna. (2003) “Pengembangan Masyarakat Melalui Participatory action research”, dalam *Anggiitan Jurnal* Volume 9, Nomor 1, Januari-Juni 2013, hlm. 2
- Margono, S. (1986). *Metodologi Pengabdian pada Masyarakat oleh Perguruan Tinggi*. (Jakarta: Direktorat Pembinaan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Dikti, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Munawar Ahmad. (2007). “Asset Based *Communities Development* (ABCD): Tipologi KKN Partisipatif UIN Sunan Kalijaga Studi Kasus Pelaksanaan KKN ke-61 di Dusun Ngreco Surocolo, Selohardjo, Pundong, Bantul Tahun Akademik 2007” dalam *Aplikasia, Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama*, Vol . VIII, No. 2 Desember 2007.
- Nusa Putra. (t.thn) *Riset Partisipatori: Metode Pemberdayaan Madrasah, Pesantren Dan Masyarakat Dampungan PTAI*. Jakarta: Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Islam.
- Robert G. Bringle, Julie A. Hatcher, and Rachel E. McIntosh, “Analyzing Morton’s Typology of Service Paradigms and Integrity,” dalam *Michigan Journal of Community Service Learning*, MJCSL 13-1 10/11/06 (Fall 2006).
- Sangkot Sirait (2003). “Mempertimbangkan Perubahan Paradigma Pengabdian kepada Masyarakat di IAIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta” dalam *Aplikasia, Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama*, Vol. IV, No. 1 Juni 2003.

Sudin. (2004). “Pengabdian kepada Masyarakat Bagi Perguruan Tinggi Agama Islam”, *Aplikasia, Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama*, Vol. V, No. 2, Desember.

B. Internet

Mudjia Rahardjo, “Sejarah Sosial Pengabdian kepada Masyarakat dalam http://tulisanterkini.com/artikel/_keislaman/umum/4767-hakikat-dan-asas-pengabdian-kepada-masyarakat.html

Hendra Gunawan, “Meninjau Ulang Tridharma PT, dalam <http://personal.fmipa.itb.ac.id/hgunawan/files/2014/01/>, diakses 3 Agustus 2016

www.uinjkt.ac.id

<http://www.unhas.ac.id/kkn/sejarah/>

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

Permen Ristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 4834 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam